KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Arahan
Menteri Koordinator



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah adalah *backbone* (tulang punggung) yang menopang pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata di seluruh penjuru tanah air. Dengan pendekatan perencanaan yang holistik dan berbasis data, infrastruktur tidak boleh lagi dibangun secara sektoral, melainkan ter-integrasi. Hal ini menjadikan tahun 2025 sebagai fondasi krusial dalam mengawal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan visi Asta Cita, khususnya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, memperkuat kemandirian bangsa, serta mendorong hilirisasi.

Di sinilah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengambil peran pengawalan dan dirigen strategis. Fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terus kami tajamkan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di lapangan terintegrasi dengan baik. Pendekatan berbasis data menjadi landasan utama kami, di mana setiap indikator kinerja dan variabel pembangunan dipastikan dievaluasi secara presisi, objektif, dan independen agar intervensi kebijakan yang dihasilkan benar-benar valid dan akuntabel.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini merupakan cerminan nyata dari upaya tersebut. Capaian Indikator Kinerja Utama yang tersaji di dalamnya memotret sejauh mana efektivitas orkestrasi lintas sektor telah kita jalankan bersama. Di samping keberhasilan yang patut disyukuri, kami juga secara transparan dan jujur menguraikan berbagai dinamika serta tantangan di lapangan mulai dari kompleksitas pembiayaan, harmonisasi regulasi, hingga sinkronisasi langkah antara pusat dan daerah.

Bagi kami, setiap kendala bukanlah hambatan, melainkan ruang refleksi dan landasan perbaikan yang berkelanjutan. Agar setiap kebijakan dan perencanaan yang dirumuskan tidak hanya indah di atas kertas, tetapi presisi dan membawa dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Laporan ini kami sampaikan tidak sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan wujud komitmen integritas kami terhadap mekanisme evaluasi dan transparansi pengelolaan ruang publik.

Akhir kata, dengan penguatan tata kelola, konsistensi arah kebijakan, serta kolaborasi yang hangat dari seluruh pemangku kepentingan, saya menaruh keyakinan penuh bahwa pembangunan infrastruktur dan kewilayahan akan terus menjadi motor penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia yang tangguh, merata, dan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,



Agus Harimurti Yudhoyono

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – INDONESIA Telp. +62 21 23951100

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2026
Inspektur,

Muhammad Jalu Wredo Aribowo

Kata **Pengantar**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dan akuntabilitas instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dokumen ini disajikan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran selama tahun 2025.

Laporan Kinerja ini memuat penjabaran capaian Indikator Kinerja Utama yang merepresentasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan fungsi utama Kementerian Koordinator, yakni koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selain menyajikan data pencapaian target, laporan ini juga menguraikan berbagai dinamika dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, beserta langkah-langkah tindak lanjut yang telah diupayakan.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan, pegawai, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi nyata dalam proses evaluasi dan penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyajian dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi landasan evaluasi untuk terus mendorong peningkatan kualitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di masa mendatang.



Jakarta, 28 Februari 2026
Sekretaris Kementerian Koordinator,

Ayodhia G. L. Kalake

Ringkasan Eksekutif

Capaian Kinerja Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Kemenko Infra sesuai Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Laporan kinerja ini mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada rancangan awal Renstra, dengan mengintegrasikan Indikator RPJMN ke dalam salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 berjalan sesuai rencana dengan capaian kinerja sebesar 100,04%. Dari 4 IKSS, jumlah IKSS yang mencapai target adalah sebanyak 2 IKSS, sementara 2 IKSS lainnya masih belum mencapai target dan memerlukan upaya peningkatan lebih lanjut. Rincian capaian IKSS sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Rincian Capaian IKU Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	*IKSS.1.1*	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	99,88%	99,88%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	*IKSS.2.1*	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	100%	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	3,575	115%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	*IKSS.3.1*	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1	77,38	84,94%
	Total					100,04%

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025 yakni sebesar Rp230.000.000.000,00 (Duaratus Tigapuluh Miliar Rupiah), dengan blokir kode A sebesar Rp13.479.933.000,00 (Tigabelas Miliar Empatratus Tujuhpuluh Sembilan Juta Sembilanratus Tigapuluh Tiga Ribu Rupiah). Dengan demikian pagu efektif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah Rp216.520.067.000,00 (Duaratus Enambelas Miliar Limaratus Duapuluh Juta Enampuluh Tujuh Ribu Rupiah). Pagu anggaran Kemenko Infra telah mengalami perubahan. Sehingga rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Unit Kerja Tahun 2025

DESKRIPSI	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI		SISA
		Rp	%	
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	216.520.067.000	215.518.430.460	99.54%	1.001.636.540
Sekretariat Kementerian Koordinator	197.718.157.000	196.742.565.299	99,51%	975.591.701
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	5.389.619.000	5.389.468.808	100%	150.192
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	4.301.970.000	4.301.703.451	99,99%	266.549
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	5.040.445.000	5.024.839.424	99,69%	15.605.576
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	4.069.876.000	4.059.853.478	99,75%	10.022.522

Tingkat penyerapan anggaran Kemenko Infra sampai dengan tahun anggaran 2025 berakhir telah terealisasi sebesar Rp215.518.430.460,00 (Duaratus Limabelas Miliar Limaratus Delapanbelas Juta Empatratus Tigapuluh Ribu Empatratus Enampuluh Rupiah) atau sebesar 99,54%. Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Tahun 2025

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	71.196.188.788	99,27%
Belanja Barang	127.641.469.000	127.170.494.645	99,63%
Belanja Modal	17.157.230.000	17.151.747.027	99,97%
Total Belanja	216.520.067.000	215.518.430.460	99,54%

2025 Kaleidoskop



01

08 / 01 / 2025

Rapat Koordinasi 5 K/L di Bawah Koordinasi Kemenko IPK



02

23 / 01 / 2025

Rapat Koordinasi Optimasi Layanan Kebandarudaraan



03

05 / 02 / 2025

Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan Idulfitri



04

12 / 02 / 2025

Pendamping Presiden Republik Indonesia Prabowo Subiato dalam Kunjungan Kerja Presiden Turki



05

21 / 02 / 2025

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tindak Lanjut Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2025



20

17 / 07 / 2025

Rapat Koordinasi ODOL



19

11 / 07 / 2025

Peninjauan Depo KCIC Tegalluar



18

06 / 05 / 2025

Rapat Koordinasi Kereta Api Cepat dan Rakor RUU Sistem Transportasi Nasional



17

12 / 06 / 2025

International Conference on Infrastructure (ICI) Tema *Sustainable Infrastructure for the Future: Innovation and Collaboration*



16

30 / 06 / 2025

Peresmian Dapur MBG Bekasi



21

24 / 07 / 2025

Peninjauan All Indonesia Soekarno-Hatta International Airport



22

27 / 07 / 2025

Kunjungan Kerja ke Lombok Mengunjungi Area Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Desa Banyu Urip Lombok



23

27 / 07 / 2025

Kunjungan Kerja ke Lombok Menyerahkan Sertipikat Tanah Kepada Masyarakat Lombok Barat



24

13 / 08 / 2025

Rapat Koordinasi Kementerian di Bawah Kemenko Infra



25

19 / 08 / 2025

Peninjauan Pabrik PT MSM







06
05 / 03 2025
Rapat Koordinasi Pengembangan Kawasan Kertajati

07
11 / 03 / 2025
Rapat Koordinasi terkait Pengelolaan Sampah

08
19 / 03 / 2025
Rapat Koordinasi terkait Pembangunan GSW

09
12 / 04 / 2025
Menghadiri Penutupan Posko Mudik Kemenhub

10
06 / 05 / 2025
Rapat Koordinasi tentang ODOL








15
18 / 06 2025
Penyerahan SHM pada Launching Trans Tuntas

14
04 / 06 / 2025
Instruksi Presiden Jalan Daerah dan Rancangan Instruksi Presiden Infrastruktur Daerah

13
26 / 05 / 2025
Peninjauan Pembangunan MRT Sarinah

12
26 / 05 / 2025
Menghadiri Indonesia Maritime Week

11
16 / 05 / 2025
Rapat Koordinasi Persiapan ICI







26
22 / 08 / 2025
Kunjungan Kerja ke TPA Winongo Madiun

27
25 / 08 / 2025
Menerima Bintang Mahaputera Utama atas Dedikasi di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

28
08 / 09 / 2025
Rapat Koordinasi Pembahasan Kereta Cepat dengan COO Danantara dan Menteri Perhubungan

29
08 / 09 / 2025
Rapat Koordinasi GSW bersama COO Danantara dan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa

30
10 / 09 / 2025
Rakor dengan BOPPJ tentang Giant Sea Wall



31

16 / 09 / 2025

Rapat Koordinasi Inpres Nomor 12 Tahun 2025



32

16 / 09 / 2025

Peninjauan Pintu Air Tanjung Agung Bengkulu



33

16 / 09 / 2025

Peninjauan Alur Pelayaran Pelabuhan Baai Bengkulu



34

19 / 09 / 2025

Peresmian Jalur Lingkar Utara Jatigede



35

26 / 09 / 2025

Peninjauan Pembangunan Tol Pelabuhan II Tanjung Priok



50

19 / 12 / 2025

Persiapan Sistem Transportasi Nasional Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), dan Pemulihan Bencana di Sumatra



49

16 / 12 / 2025

Peningkatan Kepastian Hukum Tempat Peribadatan di Cirebon, Jawa Barat



48

08 / 12 / 2025

Groundbreaking Kawasan Aerospace Park Kertajati - Hanggar *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO)



47

03 / 12 / 2025

Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan



46

02 / 12 / 2025

Peninjauan Jalur Nasional di Kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat, yang Terdampak Banjir Besar dan Longsor



36

01 / 10 / 2025

Rapat Persiapan Penyelenggaraan ISF 2025 di BKPM



37

06 / 10 / 2025

Rapat Koordinasi ODOL



38

09 / 10 / 2025

Kunjungan Kerja ke Pembangunan Proyek Jembatan Pandansimo



39

14 / 10 / 2025

Peninjauan ke Sekolah Rakyat



40

15 / 10 / 2025

Rapat Gabungan Dewas & Badan Pelaksana Danantara dilanjutkan Rapat Internal Dewas Danantara



45

24 / 11 / 2025

Rapat Koordinasi dengan Anggota FPD DPR-RI



44

18 / 11 / 2025

Peluncuran Jalur Logistik Kereta Api Barang dan Kapal Roro Cilegon



43

14 / 11 / 2025

Peninjauan Jalan Lingkar Utara Flores



42

14 / 11 / 2025

Peninjauan Bandara Komodo Labuan Bajo



41

03 / 11 / 2025

Rapat Koordinasi Menko "Restrukturisasi Keuangan Kereta Cepat Jakarta Bandung"

Daftar **Isi**

Sambutan	ii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
Kaleidoskop Kemenko Infra Tahun 2025	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel, Gambar, dan Grafik	xiii

01 **Pendahuluan** 1

Kedudukan Tugas dan Fungsi	3
Struktur Organisasi	4
Peran Strategis	7
Sumber Daya	8
Sistematika Penyajian	13

02 **Perencanaan Kinerja** 15

Rencana Strategis	17
Program dan Kegiatan	18
Perjanjian Kinerja	19
Dukungan Anggaran Kinerja	22
Pengukuran Kinerja	23

03 Akuntabilitas Kinerja 27

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 29

Sasaran Strategis (SS) 1 30

IKSS 1.1 Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 31

Kontribusi PDRB KTI 32

Indeks Ketahanan Air Nasional 43

Stok Infrastruktur 49

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan 55

Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional 61

Sasaran Strategis (SS) 2 68

IKSS 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 68

Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy*-OSPP) 69

Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 72

Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi 74

Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan 79

Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang Terintegrasi melalui *Transit-oriented Development* (TOD)/*Transit-oriented Affordable Housing* (TOAH) 82

IKSS 2.2 Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 85

Sasaran Strategis (SS) 3 89

IKSS 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 89

3.2 Capaian Kinerja Lainnya 97

3.3 Realisasi Anggaran 102

3.4 Analisa Sumber Daya 104

Kondisi Sumber Daya Pegawai 104

Implementasi Aplikasi 105

Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna 106

Penggunaan Sarana dan Prasarana 107

Implementasi Kebijakan SDM 108

3.5 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 109

04 Penutup

Penutup	112
Kesimpulan	114
Rekomendasi	115
Lampiran	116

Daftar **Tabel**

Tabel 1 Rincian Capaian IKU Tahun 2025 v

Tabel 2 Realisasi Anggaran Unit Kerja Tahun 2025 vi

Tabel 3 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Tahun 2025 vi

Tabel 4 Rincian Sarana dan Prasarana 9

Tabel 5 Anggaran Program Kegiatan 10 12

Tabel 6 Anggaran Jenis Belanja 12

Tabel 7 Anggaran Eselon I 12

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Renstra 18

Tabel 9 Anggaran Kegiatan 19

Tabel 10 IKSS Renstra dan PK 2025 20

Tabel 11 Target Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025 20

Tabel 12 Rincian Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025 21

Tabel 13 Rincian Pagu Anggaran per IKU 22

Tabel 14 Kualitas IKU 24

Tabel 15 Capaian Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025 29

Tabel 16 Capaian Kinerja SS.1 30

Tabel 17 Perbandingan Capaian dan Target IKSS 1.1 31

Tabel 18 Perbandingan Capaian dan Target PDRB KTI 33

Tabel 19 Perbandingan Capaian dan Target IKAN 44

Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target Stok Infrastruktur 50

Tabel 21 Capaian Persentase RTAHL 2019-2024 55

Tabel 22 Perbandingan Capaian dan Target RTAHL 57

Tabel 23 Perbandingan Capaian dan Target PDRB Perkotaan terhadap PDRB Nasional 62

Tabel 24 Ringkasan Perbandingan Lokpri 64

Tabel 25 Capaian Kinerja SS.2 67

Tabel 26 Capaian Kinerja IKSS.2.1 68

Tabel 26 Capaian Kinerja IKSS.2.1 68

Tabel 27 Capaian Kinerja OSPP 70

Tabel 28 Capaian Kinerja ILASPP 73

Tabel 29 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi 75

Tabel 30 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2025 79

Tabel 31 Capaian Kinerja Penyediaan Hunian Tapak dan Vertikal yang Terintegrasi melalui TOD/TOAH 82

Tabel 32 Capaian Stasiun Jatake 83

Tabel 33 Nilai Persepsi Tingkat Kepuasan Pelayanan Kemenko Infra 86

Tabel 34 Capaian Kinerja Layanan Kepuasan KSP Kemenko Infra 86

Tabel 35 Rincian Hasil Survei per Unit Kerja 86

Tabel 36 Rekap Nilai Kepuasan Layanan KSP Kemenko Infra Triwulanan 87

Tabel 37 Capaian Kinerja SS.3 89

Tabel 38 Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi 90

Tabel 39 Rincian Hasil Evaluasi RB Kemenko Marves 2024 90

Tabel 40 Matriks Hasil Evaluasi Komponen RB Kemenko Marves Tahun 2024 90

Tabel 41 Rencana Aksi RB Kemenko Infra 2025 93

Tabel 42 Hasil Evaluasi Ex Ante dan Rencana TL 2026 96

Tabel 43 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan III 2025 103

Tabel 44 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan III 2025 104

Tabel 45 Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2025 106

Tabel 46 Pembagian Ruang Kerja 107

Daftar **Gambar**

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3
Gambar 2 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	5
Gambar 3 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra	8
Gambar 4 Infografis Perjalanan Pagu Anggaran Kemenko Infra	11
Gambar 5 Peta Strategis Kemenko Infra	17
Gambar 6 Simulasi Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi SIK-Infra	25
Gambar 7 Kunjungan Kerja Menko AHY ke Lombok	32
Gambar 8 Faktor Pendorong KTI	36
Gambar 9 Faktor Penghambat KTI	36
Gambar 10 Grafik Capaian PDRB KTI	36
Gambar 11 Menko AHY Bertemu Para Gubernur Papua, Percepatan Pembangunan Infrastruktur KTI Indonesia untuk Pemerataan dan Kesejahteraan	37
Gambar 12 Rakor Pembangunan IKN	37
Gambar 13 Menko AHY Tinjau Progres Pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar	38
Gambar 14 Faktor Pendorong Penghambat 3 Provinsi KTI	38
Gambar 15 Lokasi Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut Kotabaru	39
Gambar 16 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara – RPJMN 2025-2029	39
Gambar 17 Ilustrasi Integrasi Kawasan Logistik dan Industri Perikanan di Pesisir kota Ambon	40
Gambar 18 Kunjungan Kerja Pembangunan Bandara Komodo	40
Gambar 19 Pengembangan Jalan Lintas Utara Flores	41
Gambar 20 Forum Koordinasi Penataan Ruang di Sulawesi	41
Gambar 21 Upaya yang Telah Dilakukan di Wilayah KTI	42
Gambar 22 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	42
Gambar 23 Tinjauan Irigasi	43
Gambar 24 Kategori dan Dimensi IKtA-N	43
Gambar 25 Alur Perhitungan Nilai IKtA-N	44
Gambar 26 Skor Indeks Ketahanan Air	45

Gambar 27 Skor 5 Dimensi IKtA-N 46

Gambar 28 Tinjauan Lapangan Bendungan Pidekso, Wonogiri 46

Gambar 29 Tinjauan Pengerjaan Irigasi 47

Gambar 30 Indonesia–Singapura Perkuat Sinergi Menuju Ketahanan Air 2045 dan Pengelolaan Air Berkelanjutan 47

Gambar 31 Menko AHY dalam Kegiatan IWWEF PERPAMSI 48

Gambar 32 Capaian Stok Infrastruktur per Komponen 50

Gambar 33 Rakor RUU Sistem Transportasi 51

Gambar 34 Peluncuran All Indonesia 52

Gambar 35 Rakor Pengelolaan Sampah 53

Gambar 36 Program 3 Juta Rumah 53

Gambar 37 Rata-Rata Hunian Layak Provinsi (sumber: BPS) 56

Gambar 38 Data Capaian RTLH 57

Gambar 39 Faktor Pendorong dan Penghambat Nasional RTLH 59

Gambar 40 Faktor Pendorong Penghambat Daerah RTLH 60

Gambar 41 Tren Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional 61

Gambar 42 Capaian berdasarkan Lokasi prioritas 62

Gambar 43 Peninjauan MRT Fase II di Jakarta 64

Gambar 44 Rakor terkait RUU Sistem Transportasi Nasional 65

Gambar 45 Kunjungan Lapangan KCIC di Tegalluar Bandung 65

Gambar 46 Siklus Perencanaan Tata Ruang dalam Kerangka OSPP (Integrasi 4 Matra) 69

Gambar 47 Pertemuan Kemenko Infra dengan Akademisi ITS dan UNDIP 70

Gambar 48 Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kunjungan Lapangan terkait Prototipe Penerapan OSPP dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang 71

Gambar 49 Pertemuan Menko AHY dengan World Bank 72

Gambar 50 Rapat Pembahasan Progres ILASPP 73

Gambar 51 Peninjauan kesiapan All Indonesia di Bandara Soeta 74

Gambar 52 Lini Masa All Indonesia 75

Gambar 53 Launching All Indonesia Bersama Para Stakeholder 76

Gambar 54 Infografis All Indonesia 76

Gambar 55 Launching All Indonesia 77

Gambar 56 Menko AHY Simulasi All Indonesia 77

Gambar 57 Progres Inpres Irigasi 80

Gambar 58 Kunjungan lapangan ke-3 (tiga) Lokasi Pembangunan Stasiun Baru “Jatake”, “Lumpang”, dan “Tenjo Baru” 83

Gambar 59 Kunjungan Kerja Percepatan Pengembangan TOD 84

Gambar 60 FGD Penyamaan Persepsi dan Integrasi Sektoral Transit Oriented Development 85

Gambar 61 Penyelenggaraan ICI 100

Gambar 62 Presiden Memuji Kepemimpinan AHY 100

Gambar 63 Menko AHY pada Penyelenggaraan ICI 101

Gambar 64 Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025 102

Gambar 65 Infografis Pelaksanaan WFA Kemenko Infra 107

Daftar **Grafik**

Grafik 1 Distribusi PDRB per Triwulan Tahun 2025 (sumber: BPS) 33





01
PENDAHULUAN






Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan capaian IKU Kemenko Infra pada periode tahun 2025.

1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kemenko Infra yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

1. Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
4. Pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
7. Penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi;
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. Instansi lain yang dianggap perlu.

1.2 Struktur **Organisasi**

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pembentukan kementerian ini merupakan bagian dari reformasi struktural pemerintah dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan inklusif.

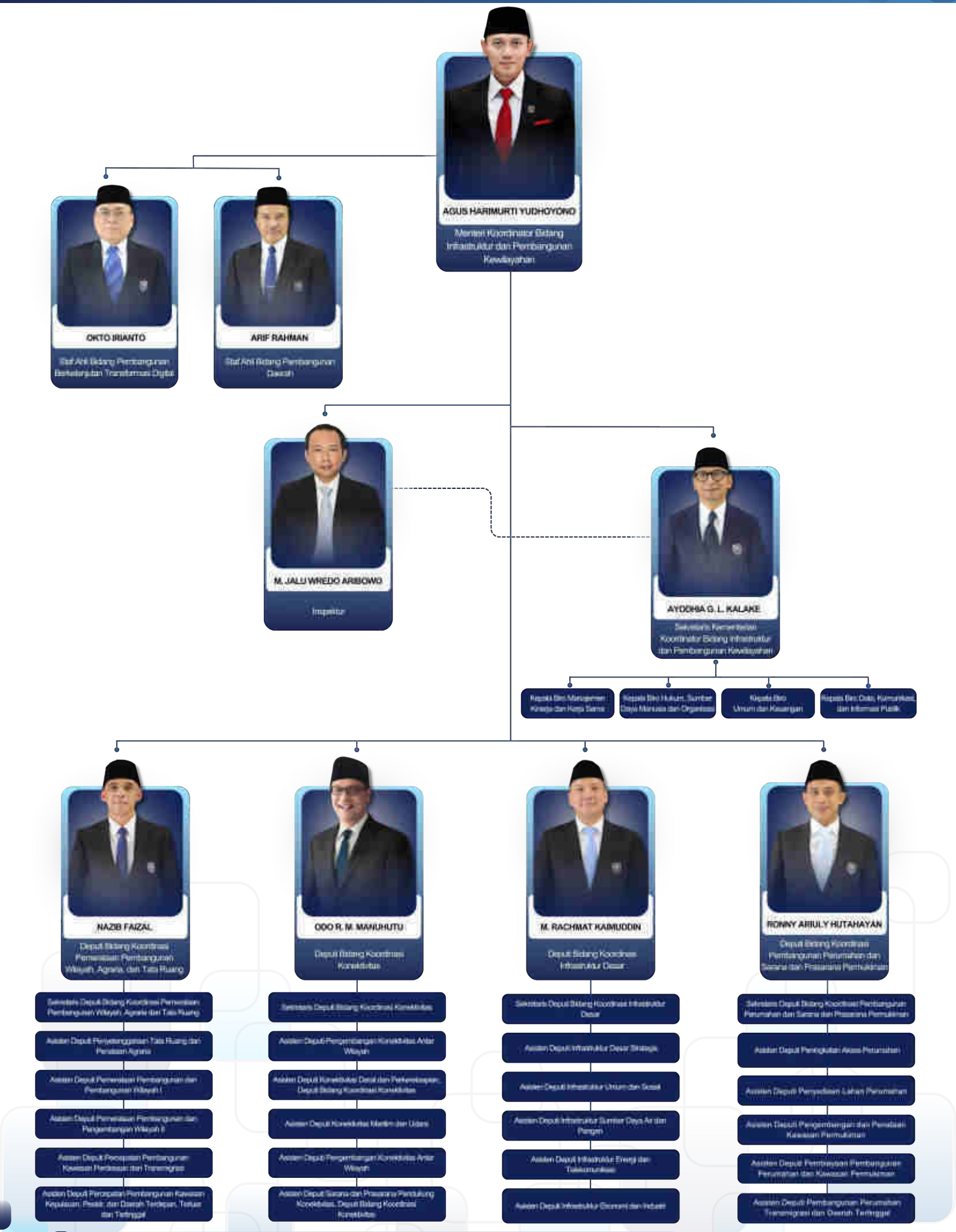
Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, struktur organisasi Kementerian Koordinator diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Empat (4) Deputi, yaitu:
   - Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
   - Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
   - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
   - Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman.
3. Dua (2) Staf Ahli, yaitu:
   - Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
   - Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital.

Struktur organisasi ini disusun untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Visualisasi lengkap susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 145 Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 **Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu juga oleh Staf Khusus Menteri Koordinator dan Tenaga Ahli Menteri, yang terdiri dari:

1. Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi;
3. Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Pembangunan;
4. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
5. Staf Khusus Menteri Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri;
6. Tenaga Ahli Menteri Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan;
7. Tenaga Ahli Menteri Bidang Data dan Teknologi Informasi;
8. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kerja Sama Internasional;
9. Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Investasi;
11. Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Pimpinan; dan
12. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan.

Tugas **dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai berikut:

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KONEKTIVITAS

Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

Menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman

STAF AHLI

Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah dan pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital.

INSPEKTORAT

Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kemenko Infra.

1.3 Peran Strategis

Peran strategis Kemenko Infra dalam melaksanakan pembangunan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Selanjutnya terkait tugas menteri koordinator yang harus dilaksanakan serta permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kemenko Infra dalam pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yakni:

Kapasitas

Pembangunan infrastruktur relatif terbatas, hal ini menyebabkan masalah ketersediaan, aksesibilitas & distribusi infrastruktur sehingga berdampak pada:

- Biaya Investasi Tinggi;
- Pembebasan Lahan Sulit & Mahal;
- Inefisiensi & Kebocoran Anggaran;
- Anggaran Negara Terbatas;
- Terbatasnya Ketersediaan;
- Terbatasnya Aksesibilitas; dan
- Pendistribusian yang Tidak Merata.

Pemanfaatan

Masih rendah karena masalah pemerataan, hambatan pemanfaatan yang tinggi (tidak lancar), dan tidak terintegrasi, sehingga efek pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan masih belum optimal yang mengakibatkan:

- Rendahnya Jumlah Pengguna;
- Rendahnya Kualitas Infrastruktur;
- Tingginya Hambatan Penggunaan (Tidak Mulus);
- Kurangnya Integrasi;
- Kecilnya Efek Multiplier; dan
- Tidak optimalnya dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Keberlanjutan Yang Lemah

Karena tantangan cuaca, keandalan bencana yang rendah, biaya pemeliharaan yang tinggi, dampak lingkungan yang besar, & kurangnya dukungan untuk transisi ekonomi hijau hal ini terjadi karena:

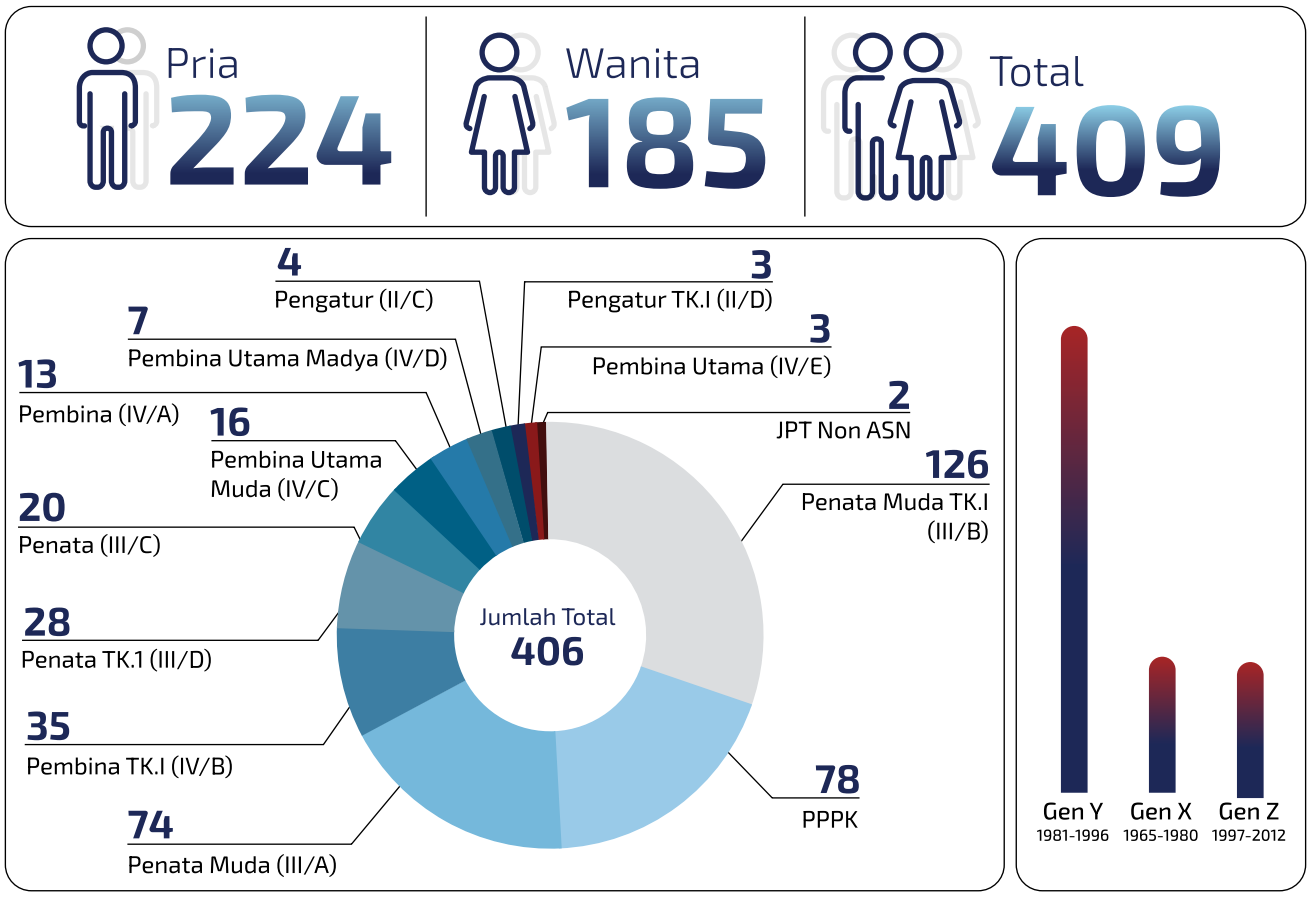
- Tantangan Cuaca & Iklim;
- Rendahnya Keandalan Bencana;
- Tingginya Biaya Pemeliharaan;
- Tingginya Frekuensi *Downtime*;
- Tingginya Dampak Lingkungan;
- Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca (Perubahan Iklim); dan
- Rendahnya Dukungan Transisi Ekonomi Hijau.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, Kemenko Infra fokus pada 4 program prioritas yaitu bidang koordinasi pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang; bidang koordinasi konektivitas; bidang koordinasi infrastruktur dasar; dan bidang koordinasi pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman.

1.4 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra sampai dengan saat ini memiliki 409 pegawai terdiri dari 224 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 185 perempuan, dengan rincian PNS 331 pegawai dan Tenaga PPPK 78 pegawai. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 3 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra

Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Kemenko Infra berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 409 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: Pembina Utama Madya (IV/e) berjumlah 3 pegawai; Pembina Utama (IV/d) berjumlah 7 pegawai; Pembina Utama (IV/c) berjumlah 16 pegawai; Pembina Utama Muda (IV/b) berjumlah 35 pegawai; Pembina Tk.I (IV.a) berjumlah 13 pegawai; Penata Tk.I(III/d) berjumlah 28 pegawai; Penata (III/c) berjumlah 20 pegawai; Penata Muda Tk.I (III/b) berjumlah 126 pegawai; Penata Muda (III/a) berjumlah 74 pegawai; Pengatur Tk.I (II/d) berjumlah 3 pegawai; Pengatur (II/c) berjumlah 4 pegawai; dan PPPK 78 Orang; serta JPT Non-ASN berjumlah 2 pegawai.

2. Sarana dan **Prasarana**

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Kemenko Infra didukung dengan adanya sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun data yang kami sajikan di antaranya sebagai berikut.

Tabel 4 Rincian Sarana dan Prasarana

URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
TANAH / GEDUNG / BANGUNAN				Kemenko Marves
Sertifikat				SHM
a. Tanah			229.663.659.000	
Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m^2	223.987.714.000	Kemenko Marves
Semenan - Kalideres	613	m^2	5.675.945.000	Kemenko Marves
b. Gedung/Bangunan			220.650.478.835	
Jl. Thamrin – (Kantor)	21.307	m^2	210.522.263.904	Kemenko Marves
Semenan – Kalideres (Gudang)	780	m^2	904.530.000	Kemenko Marves
Parkir VIP		m^2	9.223.684.931	Kemenko Marves
KENDARAAN BERMOTOR				
1. Roda 2	19	Unit	334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2. Roda 4	32	Unit	9.762.790.000	Belanja Modal (APBN)
INVENTARIS LAINNYA				
1. Electric Generating Set	1	Unit	12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2. Pompa Air	1	Unit	178.000.000	Belanja Modal (APBN)
3. Alat Bengkel Bermesin	4	Unit	11.873.000	Belanja Modal (APBN)
4. Alat Bengkel Tak Bermesin	1	Unit	3.477.250	Belanja Modal (APBN)
5. Alat Ukur	31	Unit	234.452.568	Belanja Modal (APBN)
6. Alat Kantor	722	Unit	9.801.867.425	Belanja Modal (APBN)
7. Alat Pengolahan	1	Unit	3.500.000	Belanja Modal (APBN)

URAIAN	JUMLAH	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
8. Alat Rumah Tangga	3.740	Unit	33.354.797.789	Belanja Modal (APBN)
9. Alat Studio	325	Unit	6.386.832.978	Belanja Modal (APBN)
10. Alat Komunikasi	137	Unit	860.990.778	Belanja Modal (APBN)
11. Alat Pemancar	10	Unit	133.453.500	Belanja Modal (APBN)
12. Alat Kedokteran	24	Unit	261.724.630	Belanja Modal (APBN)
13. Alat Kebersihan dan Kesehatan	31	Unit	165.884.300	*Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak*
14. Recorder	3	Unit	47.511.954	Belanja Modal (APBN)
15. Infrared Thermometer	5	Unit	20.557.000	Belanja Modal (APBN)
16. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	Unit	334.116.800	Belanja Modal (APBN)
17. Alat Pengelola Air	2	Unit	687.385.000	*Cooling Tower, Wireless Data Transmission System*
18. Alat untuk Metal Detector	1	Unit	49.555.555	Alat Khusus Keamanan Lainnya
19. Alat Pembaca Barcode	20	Unit	70.777.300	*Barcode Reader, Battery Handycam*
20. Komputer Unit	1.077	Unit	19.469.199.056	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
21. Alat Komputer	731	Unit	20.790.016.849	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
22. Alat Pelindung Kesehatan	1	Unit	21.450.000	Belanja Modal (APBN)
23. Alat SAR	6	Unit	96.595.000	Belanja Modal (APBN)
24. Alat Kerja Perekam	7	Unit	12.053.600	Belanja Modal (APBN): *Voice Recorder*
25. Unit Peralatan Proses/Produksi	1	Unit	1.518.000	Belanja Modal (APBN)
26. Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	Unit	6.400.000	Belanja Modal (APBN)
27. Alat Olah Raga	3	Unit	39.405.200	Belanja Modal (APBN)
28. Aset Tetap Lainnya	211	Unit	258.032.100	Belanja Modal (APBN)
29. Aset Tak Berwujud	12	Unit	3.203.295.329	Belanja Modal (APBN)



3. Sumber Daya **Keuangan**

Berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Nomor: SP DIPA-132.01.1.694776/2025, Revisi DIPA ke-7 (tujuh) Kemenko Infra memperoleh alokasi pagu anggaran definitif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp230.000.000.000,00 (Duaratus Tigapuluh Miliar Rupiah) dengan blokir kode A sebesar Rp13.479.933.000,00 (Tigabelas Miliar Empatratus Tujuhpuluh Sembilan Juta Sembilanratus Tigapuluh Tiga Ribu Rupiah). Dengan demikian pagu efektif Kemenko Infra s.d. Desember Tahun 2025 berakhir adalah Rp216.520.067.000,00 (Duaratus Enambelas Miliar Limaratus Duapuluh Juta Enampuluh Tujuh Ribu Rupiah).

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, pengelolaan sumber daya anggaran Kemenko Infra mengalami beberapa penyesuaian yang bersifat dinamis dan strategis, sejalan dengan kebijakan nasional serta kebutuhan pelaksanaan kegiatan prioritas. Pada Triwulan I, penyesuaian anggaran dilakukan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN yang mendorong penyesuaian rencana kerja dan alokasi anggaran agar lebih efektif dan berorientasi pada prioritas.

Pada Triwulan II, dilakukan revisi anggaran antarprogram guna mendukung pelaksanaan *International Conference on Infrastructure* (ICI) 2025 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Namun pada Triwulan III, pagu anggaran Kemenko Infra relatif tetap karena kebutuhan pendanaan kegiatan prioritas telah terakomodasi pada periode triwulan II, sehingga fokus diarahkan pada optimalisasi realisasi anggaran dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Memasuki Triwulan IV, dilakukan penyesuaian anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan renovasi ruang kerja, pengadaan sarana pendukung kerja guna menunjang kelancaran operasional dan pencapaian kinerja hingga akhir tahun anggaran, serta memperkuat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan agar tercapai keselarasan program dan optimalisasi hasil sesuai target yang telah ditetapkan.

Perjalanan anggaran dari Pagu Dipa Awal sampai Pagu Efektif Final Kemenko Infra dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4 **Infografis Perjalanan Pagu Anggaran Kemenko Infra**

Rincian pagu anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 5 Anggaran Program Kegiatan

NAMA KEGIATAN	PAGU AWAL	NILAI BLOKIR	PAGU EFEKTIF	%
Program Dukungan Manajemen	177.559.342.000	2.151.441.000	199.568.959.000	92%
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	52.440.658.000	11.328.492.000	16.951.108.000	8%
Total Belanja	230.000.000.000	13.479.933.000	216.520.067.000	

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, adapun pagu per jenis belanja sebagai berikut.

- Belanja Pegawai dengan pagu efektif sebesar Rp71.721.368.000,00 (Tujuhpuluh Satu Miliar Tujuhratus Duapuluh Satu Juta Tigaratus Enampuluh Delapan Ribu Rupiah)
- Belanja Barang dengan pagu efektif sebesar Rp127.641.469.000,00 (Seratus Duapuluh Tujuh Miliar Enamratus Empatpuluh Satu Juta Empatratus Enampuluh Sembilan Ribu Rupiah); dan
- Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp17.157.230.000,00 (Tujuhbelas Miliar Seratus Limapuluh Tujuh Juta Duaratus Tigapuluh Ribu Rupiah) Rincian Anggaran per Jenis Belanja dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 6 Anggaran Jenis Belanja

URAIAN	PAGU AWAL	NILAI BLOKIR	PAGU EFEKTIF	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	-	71.721.368.000	33%
Belanja Barang	151.261.037.000	13.479.933.000,00	127.641.469.000	59%
Belanja Modal	7.017.595.000	-	17.157.230.000	8%
Total Belanja	230.000.000.000	13.479.933.000	216.520.067.000	

Sedangkan anggaran untuk seluruh unit kerja Eselon I dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Anggaran Eselon I

ESELON 1	PAGU AWAL	NILAI BLOKIR	PAGU EFEKTIF	%
Deputi 1	7.433.382.000	2.149.638.000	5.389.619.000,00	2%
Deputi 2	7.665.300.000	3.363.330.000	4.301.970.000,00	2%
Deputi 3	7.492.463.000	2.392.937.000	5.040.445.000,00	2%
Deputi 4	7.539.257.000	3.422.587.000	4.069.876.000,00	2%
Setmenko	199.869.598.000	2.151.441.000	197.718.157.000,00	91%
Total	230.000.000.000	13.479.933.000	216.520.067.000,00	

1.5 Sistematika **Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kemenko Infra adalah sebagai berikut:

BAB I **Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

BAB II **Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2025, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

BAB III **Akuntabilitas Kinerja**

1. Realisasi kinerja Kemenko Infra
   Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Kemenko Infra berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.

2. Realisasi Anggaran
   Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

3. Realisasi Kinerja lainnya
   Pada subbab ini disajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Perjanjian Kinerja dari program dan kegiatan Kemenko Infra.

BAB IV **Penutup**

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran

Berisi Bukti dukung Perjanjian Kinerja Menko s.d. Eselon I, kegiatan Tahun 2025, dan data dukung lainnya terhadap pencapaian kinerja.

International

Conference on Infrastructure (ICI) 2025







02

PERENCANAAN KINERJA



Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Menko Infra diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perjanjian kinerja para Pejabat Eselon I lingkup Kemenko Infra. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategis Kemenko Infra sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada masing-masing periode tahunan.

2.1 Rencana Strategis

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 adalah: **"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045."** Dalam mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenko Infra menetapkan visi sebagai berikut:



> **"Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas Sebagai Tulang Punggung Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2025.**

Visi tersebut menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Infra untuk lima tahun ke depan, serta menjadi bagian integral dari upaya memperkuat konektivitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

VISI RPJMN	**BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045**						
Visi dan Misi Renstra	*"Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkualitas Sebagai Tulang Punggung Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2025."* 1. Membangun infrastruktur yang terintegrasi produktif dan berdaya saing. 2. Meningkatkan tata kelola ruang dan pengambangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.						
Tujuan	Pembangunan Infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan			Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan			
Indikator Tujuan	Kontribusi PDRB KTI			Presentase tata kelola koordinasi kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan			
Sasaran Strategis	Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang merata dan berdampak			Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkualitas		Terwujudnya tata kelola kelembagaan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang baik	
Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indeks Ketahanan Air Nasional	Stok infrastruktur terhadap PDB	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional	Presentase penyelesaian isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan	Nilai kepuasan layanan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan	Indeks reformasi birokrasi Kemenko Infra

Gambar 5 Peta Strategis Kemenko Infra

Dalam mencapai visi diperlukan misi untuk mencapainya, Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029, Kemenko Infra sesuai dengan tugas dan fungsinya fokus pada misi ke-3 yaitu: melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Namun tetap terlibat baik langsung ataupun tidak langsung pada 7 misi lainnya, yakni misi ke-1, 2, 4, 5, 6, 7 dan 8, maka misi Kemenko Infra sebagai berikut:

1. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, produktif, dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kelola ruang dan pengembangan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai lima tahun ke depan, sebagai berikut:

Tabel 8 Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan	Sasaran
1. Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang berkeadilan	1. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan
2. Penguatan kelembagaan dan peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	1. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkualitas. 2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang baik

2.2 Program dan **Kegiatan**

Kemenko Infra pada tahun 2025 memiliki 2 program yaitu 1) Program dukungan manajemen; dan 2) Program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Program dukungan manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu dukungan manajemen internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan program koordinasi pelaksanaan kebijakan terdiri dari 4 kegiatan yakni:

1. Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
2. Koordinasi Konektivitas;
3. Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
4. Koordinasi Pembangungan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Penyusunan anggaran berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan *performance based budgeting* dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pelaksanaan program dan kegiatan didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 9 Anggaran Kegiatan

ESELON 1	PAGU EFEKTIF	%
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	**216.520.067.000**	100%
Dukungan Manajemen	199.568.959.000	92,17%
Pelaksanaan Kebijakan	16.951.108.000	7,83%
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	5.004.842.000	29,53%
Koordinasi Konektivitas	3.717.168.000	21,93%
Koordinasi Infrastruktur Dasar	4.577.850.000	27,01%
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	3.651.248.000	21,54%

2.3 Perjanjian **Kinerja**

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 mengacu pada rancangan awal Renstra, dengan mengintegrasikan indikator RPJMN ke dalam salah satu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), yaitu persentase capaian target pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Dalam proses finalisasi, struktur IKSS dalam Renstra mengalami penyesuaian, di mana indikator RPJMN ditetapkan menjadi indikator kinerja tersendiri. Meskipun demikian, secara substansi target yang tercantum dalam Renstra telah terakomodasi dalam PK Tahun 2025. Mengingat Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) tentang Renstra baru ditetapkan pada 29 Desember tahun 2025, revisi PK tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan. Namun, penyelarasan indikator antara Renstra dan PK akan dilakukan sepenuhnya pada periode mendatang. Tabel perbandingan antara Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

RENSTRA				
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
Tujuan 1: Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Berkeadilan		Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia		21,4
SS. 1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berdampak	*IKSS. 1.1*	Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia	3,50
		IKSS. 1.2	Stok Infrastruktur terhadap PDB	46,50
		IKSS. 1.3	Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	67
		IKSS. 1.4	Proporsi PDRB Perkotaan Terhadap PDB Nasional	57,29

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025				
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SS. 1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	*IKSS. 1.1*	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%

Tabel 10 IKSS Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

RENSTRA					PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025				
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
Tujuan 2: Penguatan Kelembagaan dan Peran koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan			Nilai Tata Kelola Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	92%					
SS. 2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	*IKSS. 2.1*	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	92%	*SS. 2*	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	*IKSS. 2.1*	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%
		IKSS. 2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,2			*IKSS. 2.2*	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,2
SS. 3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Baik	*IKSS. 3.1*	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	92	*SS. 3*	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	*IKSS. 3.1*	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1

Target keluaran capaian kinerja IKSS Menko Infra disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11 Target Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA			
				TW1	TW2	TW3	TW4
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	*IKSS.1.1*	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan				100%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	*IKSS.2.1*	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	✓	✓	✓	✓
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	3,1	3,1	3,1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	*IKSS.3.1*	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan				91,1

Secara lebih rinci terkait rincian kinerja pada IKSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Rincian Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			TW1	TW2	TW3	TW4
IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI)				✓
		2. Indeks Ketahanan Air Nasional				✓
		3. Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)				✓
		4. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				✓
		5. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional				✓
IKSS.2.1	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	1. Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy* - OSPP)	✓	✓	✓	✓
		2. *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP)	✓	✓	✓	✓
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi	✓	✓	✓	✓
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	✓	✓	✓	✓
		5. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang Terintegrasi Melalui *Transit-Oriented Development* (TOD)/*Transit-Oriented Affordable Housing* (TOAH)	✓	✓	✓	✓
IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Hasil pengukuran tingkat kepuasan kementerian/ lembaga/*stakeholders* terhadap pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk berkoordinasi dan bersinergi	✓	✓	✓	✓
IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025				✓

2.4 Dukungan **Anggaran Kinerja**

Tahun 2025, dukungan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut:

Tabel 13 Rincian Pagu Anggaran per IKU

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN (RP.)
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	*IKSS.1.1*	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	7.827.087.000
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	*IKSS.2.1*	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	9.124.021.000
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3.1	1.850.802.000
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	*IKSS.3.1*	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91.1	4.817.270.000



2.5 Pengukuran **Kinerja**

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personel dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut.

1

Capain Kinerja

Capaian Kinerja = ∑ %Skor IKU

Keterangan:

- Capaian kinerja merupakan nilai keseluruhan capaian IKU yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- Pencapaian capaian kinerja dilihat dari Total Capaian Kinerja di mana rentang nilainya adalah 0 – 120%.
- Capaian Kinerja dihitung dari pencapaian seluruh IKU yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

2

Persentase (%) Skor IKU

%Skor IKU = Koefisien Bobot IKU x %Capain IKU

Keterangan:

- Persentase skor IKU merupakan nilai keseluruhan dari perkalian antara koefisien bobot IKU dengan persentase capaian IKU.
- Bobot IKU sesuai dengan kesepakatan dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

3

Formula Capaian IKU Per Triwulan

a (capaian Output IKU) / a (target output IKU) X 100%

Keterangan:

- Capaian kinerja triwulan merupakan nilai keseluruhan capaian IKU per triwulan yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- Pencapaian capaian kinerja triwulan dilihat dari Total Capaian Kinerja triwulan dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%.
- Capaian Kinerja triwulan dihitung dari pencapaian seluruh IKU triwulan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

4

Koefisien Bobot IKU

$$\text{Koefisien Bobot IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}}{\sum \text{Bobot IKU}}$$

Keterangan:

- Koefisien Bobot IKU merupakan nilai dari bobot IKU dibagi dengan keseluruhan bobot IKU yang ditetapkan berdasarkan kualitas IKU.
- Kualitas IKU sesuai dengan yang ditetapkan pada lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Bobot dari kualitas IKU sebagai berikut.

Tabel 14 Kualitas IKU

KUALITAS IKU	BOBOT
Ultimate Outcome	0,4
Intermediate Outcome	0,3
Immediate Outcome	0,2
Output	0,1

1. *Ultimate Outcome* (0,4) = hasil atau dampak akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari suatu program/kegiatan tertentu. Ini adalah hasil akhir yang paling penting atau signifikan yang ingin dicapai. Mencerminkan tujuan jangka panjang atau visi yang ingin dicapai. Ini bisa mencakup pencapaian tujuan organisasi, keberhasilan dalam mencapai misi organisasi, atau pencapaian hasil kinerja. Bobot kualitas IKU 0,4 ditentukan berdasarkan kesepakatan.

   Bobot kualitas IKU 0,4 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. *Intermediate Outcome* (0,3) = hasil yang dicapai dalam proses mencapai *ultimate outcome* atau hasil akhir yang diinginkan. *Intermediate outcome* merupakan langkah-langkah atau pencapaian yang harus dicapai untuk mencapai tujuan akhir. Bobot kualitas IKU 0,3 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

3. *Immediate Outcome* (0,2) = hasil yang langsung dan secara langsung terkait dengan program/kegiatan yang dilakukan. Ini adalah hasil yang terjadi segera setelah intervensi atau tindakan tertentu dilakukan, dan seringkali merupakan langkah pertama dalam mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome.*

   Immediate outcome penting karena memberikan umpan balik langsung tentang efektivitas tindakan atau intervensi yang dilakukan. Dengan memantau *immediate outcome*, individu atau organisasi dapat mengevaluasi seberapa baik suatu kegiatan berjalan dan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome* yang diinginkan.

   Bobot kualitas IKU 0,2 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

4. *Output* (0,1) = hasil, atau layanan yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. *Output* adalah apa yang dihasilkan sebagai hasil dari upaya yang dilakukan. Ini seringkali merupakan langkah pertama dalam menilai kinerja suatu sistem atau individu, karena *output* merupakan hasil yang dapat diukur secara langsung.

   Bobot kualitas IKU 0,1 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

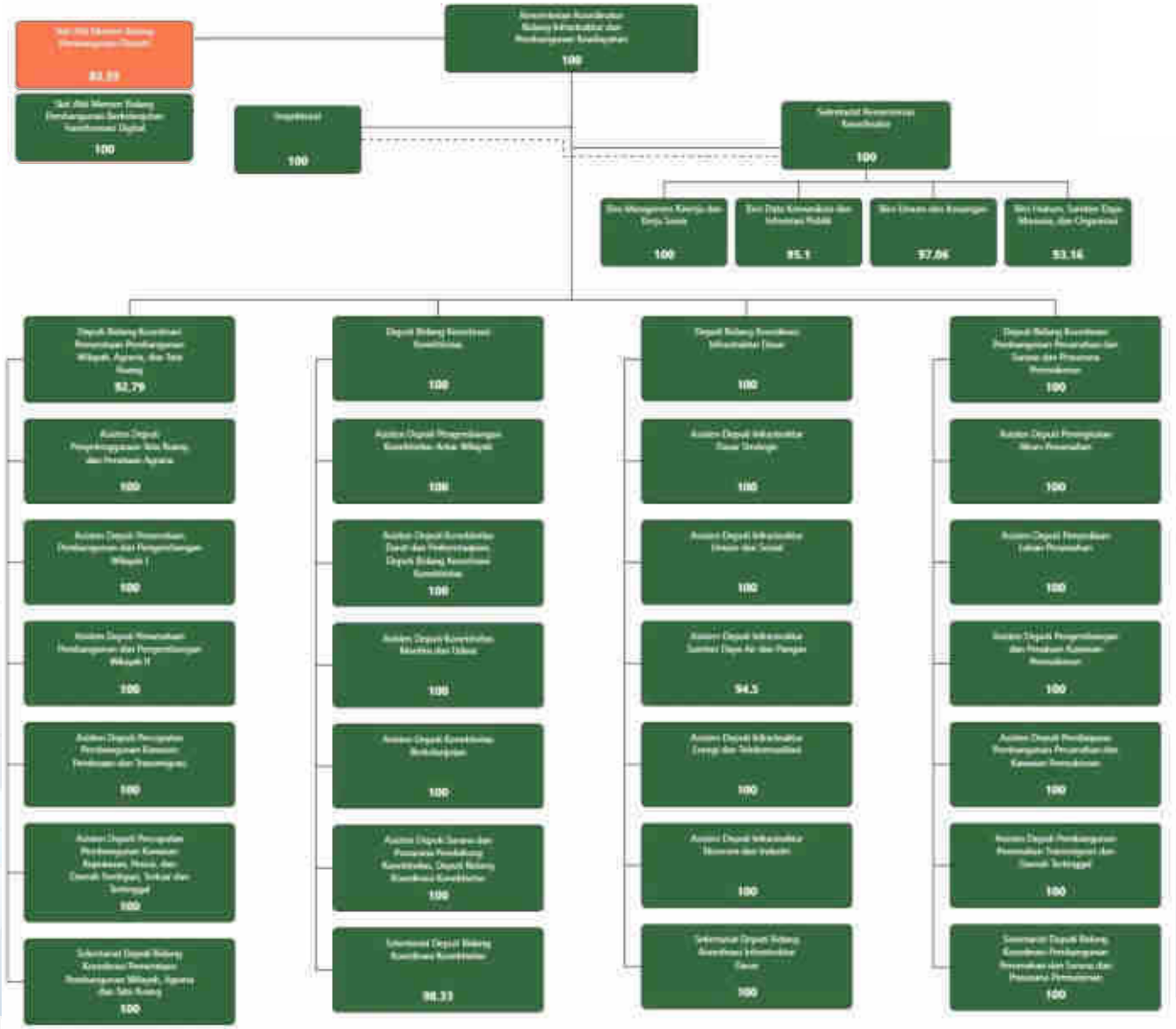
5

Predikat Organisasi

PREDIKAT	NKO
Istimewa	100 < NKO ≤ 120
Baik	90 ≤ NKO ≤ 100
Butuh Perbaikan	70 ≤ NKO < 90
Kurang	50 ≤ NKO <70
Sangat Kurang	<50
Data Tidak Lengkap	Data Tidak Lengkap

Keterangan:

- Istimewa, apabila melampaui *trajectory target* (dengan rentang nilai capaian 100 < NKO ≤ 120);
- Istimewa, apabila melampaui *trajectory target* (dengan rentang nilai capaian 100 < NKO ≤ 120);
- Butuh Perbaikan, apabila sudah ber-progress namun butuh perbaikan (dengan rentang nilai capaian (dengan rentang nilai 90 ≤ NKO ≤ 100);
- Kurang, apabila realisasi di bawah target (dengan rentang nilai 50 ≤ NKO <70); dan
- Sangat Kurang, apabila realisasi jauh di bawah target (dengan rentang nilai < 50).



Gambar 6 Simulasi Nilai Kinerja Organisasi pada Aplikasi SIK-Infra



Peresmian

Perumahan FPLP





03

AKUNTABILITAS KINERJA






Akuntabilitas Kinerja Kemenko Infra merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kemenko Infra menindaklanjuti dengan menyusun laporan kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam memastikan ketercapaian kinerja organisasi, Kemenko Infra secara periodik melakukan pemantauan dan validasi kinerja. Setelah tahun 2025 berakhir dengan memperhatikan waktu keluaran target IKU, penghitungan capaian kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun pada awal tahun.

3.1 Capaian **Kinerja Tahun 2025**

Realisasi Capaian Kinerja Kemenko Infra pada Tahun 2025 menunjukkan capaian agregat sebesar 100,04%. Dalam PK tahun 2025, terdapat empat Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan demikian, capaian 100,04% merefleksikan kinerja yang sangat baik terhadap seluruh IKU yang telah ditargetkan.

Adapun keempat IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja Kemenko Infra secara keseluruhan adalah:

1. Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
2. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; dan
4. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Infra.

Berikut adalah rincian realisasi capaian kinerja untuk periode tahun 2025:

Tabel 15 Capaian Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	*IKSS.1.1*	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	100%	99,88%	99,88%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	*2.1*	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	100%	100%
		2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	3,575	115%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	*3.1*	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1	77,38	84,94%

Adapun perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kemenko Infra sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		KUALITAS IK	Persentase Capaian *a*	Bobot *b*	Koefisien *c* c= b/total b	Nilai *d* d= a*c
IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	*Ultimate Outcome*	99,88%	0,4	0,31	30,73%
IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	*Intermediate Outcome*	100,00%	0,3	0,23	23,08%
IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	*Intermediate Outcome*	115,32%	0,3	0,23	26,61%
IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	*Intermediate Outcome*	84,94%	0,3	0,23	19,60%
Nilai Kinerja Organisasi						**100,02%**

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

SS.1
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur **dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan**

Sasaran Strategis 1 memastikan bahwa seluruh wilayah, baik kota besar maupun daerah terpencil, mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Sementara itu, keberlanjutan dalam pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam, lingkungan, dan sosial dapat dijaga dan digunakan secara bijak agar tidak merugikan generasi mendatang. SS. 1 memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase capaian target pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Tabel 16 Capaian Kinerja SS.1

INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/NASIONAL 2025
Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	100%	99,88%	99,88%	100%	-

IKSS 1.1

Persentase Capaian Target **Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan terkait Indikator sasaran pembangunan yang bersumber dari Indikator Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2024-2029 atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi tanggung jawab Kemnko Infra. Indikator sasaran pembangunan tersebut merupakan gabungan dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB nasional;
2. Indeks Ketahanan Air Nasional;
3. Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);
4. Rumah Tangga dengan Akses terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan; dan
5. Proporsi PDRB Wilayah Perkotaan terhadap PDB Nasional.

Realisasi capaian dari target kelima indikator di atas kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan angka akhir sebagai realisasi dari indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Formula dari indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah:

$$\frac{\textit{Jumlah Indikator RPJMN yang diselesaikan oleh Menko}}{\textit{Jumlah Indikator RPJMN yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase capaian target pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada tahun 2025 disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 17 **Perbandingan Capaian dan Target IKSS 1.1**

INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/NASIONAL 2025
Kontribusi PDRB KTI	20,9	21,4	20,85	97,43%	21,4	21,4
Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48	3,5	3,595	102,71%	3,50	3,50
Stok Infrastruktur	43,00	46,5	45,4	97,63%	46,50	46,50
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65,25	67	68,4	102,09%	67,00	67,00
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	56,56	57,29	57,03	99,55%	57,29	57,29
Rata-rata Capaian				**99,88%**		

Interpretasi dari capaian indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah akan tercapai keseluruhan apabila angka rata-ratanya mencapai 100%. Jika lebih dari itu, maka mengindikasikan seluruh indikator komposit di dalamnya menunjukkan capaian yang melebihi target semuanya, sedangkan apabila angka rata-rata persentase kurang dari 100% maka mengindikasikan kalau ada salah satu atau lebih indikator yang tidak tercapai targetnya.

Pada tahun 2025, rata-rata capaian sebesar 99,88%, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan target pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan telah tercapai. Secara lebih detail capaian masing-masing indikator akan dijelasakan sebagai berikut:

1. Kontribusi **PDRB KTI**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bukan sekadar deretan angka statistik. Ia adalah indikator vital yang mencerminkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah. Dalam konteks nasional, kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mencakup Sulawesi, Maluku, Papua, hingga Nusa Tenggara menjadi tolak ukur keberhasilan pemerataan pembangunan.

Penetapan PDRB KTI sebagai indikator kinerja utama di Kemenko Infra merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini terpusat di barat (Jawa-sentris) menuju pembangunan yang inklusif. Tujuannya jelas: menjadikan wilayah timur yang kaya sumber daya alam sebagai pusat pertumbuhan baru dan mengurangi kesenjangan antarwilayah yang selama ini menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan.

Kesenjangan ekonomi antarkawasan menjadi tantangan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Berikut beberapa penyebab kontribusi PDRB KTI yang masih rendah:

1. Kesenjangan Pembangunan, KTI masih dianggap tertinggal dibandingkan Kawasan Barat Indonesia dengan kontribusi PDRB yang lebih kecil;
2. Keterbatasan infrastruktur, ketersediaan infrastruktur seperti listrik dan jalan di KTI masih terbatas, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi;
3. Tantangan akses ke pasar dan informasi di KTI masih menjadi tantangan yang memengaruhi daya saing produk-produk lokal.

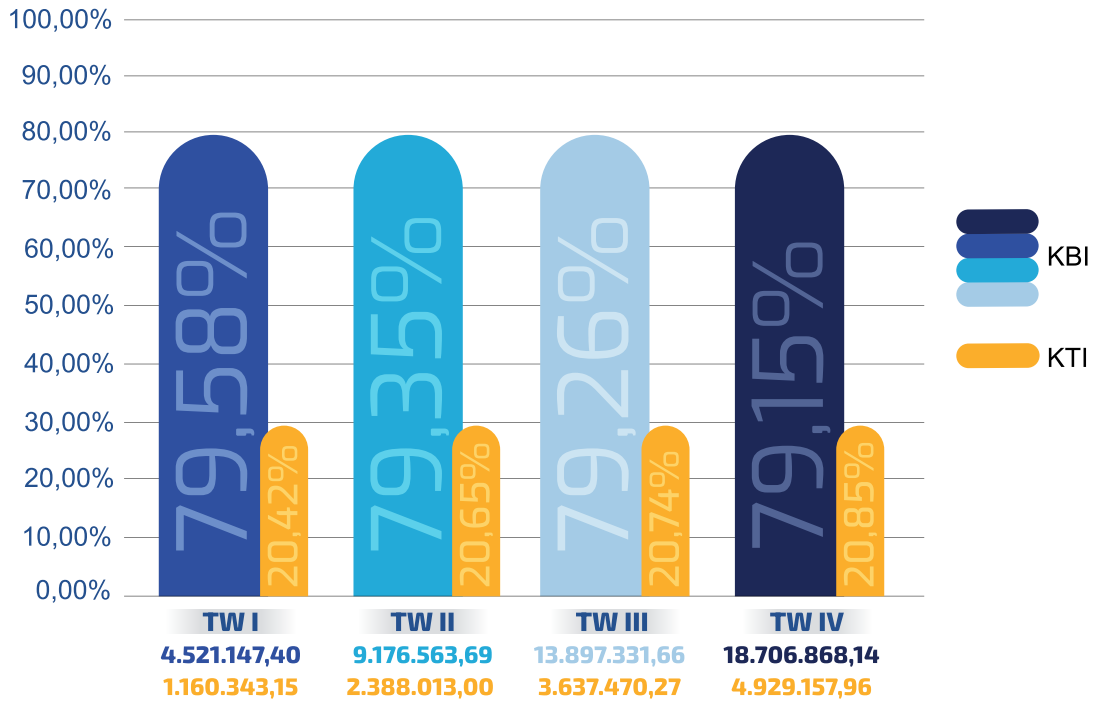


Gambar 7 Kunjungan Kerja Menko AHY ke Lombok

Kontribusi PDRB KTI dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Sedangkan Kawasan Timur Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 mencakup wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PDRB KTI (\%)} = \frac{\sum \text{PRDB KTI}}{\sum \text{PRDB KBI} + \sum \text{PRDB KTI}} \times 100\%$$

Berdasarkan data BPS Tahun 2025 mengenai PDRB seluruh provinsi di Indonesia, realisasi kontribusi PDRB KTI secara kumulatif per triwulan adalah sebagai berikut:



Grafik 1 Distribusi PDRB per Triwulan Tahun 2025 (sumber: BPS)

Terdapat tren peningkatan kontribusi KTI yang konsisten sepanjang tahun 2025, Hal ini menunjukkan adanya pergerakan positif meskipun dominasi Kawasan Barat Indonesia (KBI) masih berada di angka 79,15% pada akhir tahun. Realisasi Kontribusi PDRB KTI secara kumulatif pada Triwulan IV tercatat mencapai 20,85% terhadap nasional. Angka ini setara dengan 97,43% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 21,4%.

Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju struktur ekonomi yang lebih seimbang secara spasial, di mana wilayah timur tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan mentah, tetapi menjadi motor penggerak industri pengolahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Semakin tinggi nilai Kontribusi PDRB KTI menggambarkan keberhasilan pemerataan pembangunan untuk mengubah paradigma dari Jawa-sentris menjadi inklusif, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Capaian Kontribusi PDRB KTI terhadap PDB Nasional dan perbandingan terhadap target nasional disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Capaian dan Target PDRB KTI

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
20,9	21,4	20,9	97,66%	21,4	21,4

Dalam Renstra Kemenko Infra dan target RPJMN Tahun 2025, Kemenko Infra telah menetapkan target kontribusi PDRB KTI yang selaras, yakni sebesar 21,4%. Meskipun angka realisasi belum sepenuhnya menyentuh target 21,4%, capaian sebesar 97,43% ini mengindikasikan kinerja yang sangat memadai. Hal ini menunjukkan bahwa strategi intervensi pembangunan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 telah berada pada jalur yang tepat untuk mendorong wilayah timur menjadi motor penggerak industri pengolahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Adapun perbandingan target maupun capaian pada saat laporan kinerja ini disusun, belum terdapat instansi pemerintah lain (baik di tingkat K/L nasional/daerah maupun negara lain) yang memiliki data capaian dengan karakteristik, ruang lingkup, dan variabel indikator kinerja yang identik (ekuivalen) untuk disandingkan secara langsung (*apple-to-apple*).

Dalam upaya meningkatkan capaian tersebut dan mengatasi kesenjangan dengan wilayah barat, terdapat sejumlah faktor pendorong dan penghambat secara nasional. Berikut adalah rincian faktor-faktor tersebut:

FAKTOR PENDORONG

1. **Keunggulan dan Hilirisasi Sumber Daya Alam**
   - Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya nikel, yang terkonsentrasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua.
   - Penguatan hilirisasi sektor nikel yang terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana investasi sektor ini tumbuh 20,8% (*yoy*) pada tahun 2024.
   - Pengembangan hilirisasi komoditas lokal lainnya, seperti industri perikanan (tuna di Biak, program Kampung Nelayan Merah Putih), hilirisasi sagu di Seram Bagian Timur, dan revitalisasi kelapa di Maluku Utara.
2. **Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru**
   - Penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KI Konawe dan KI Morowali berperan besar menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi.
   - Pengembangan simpul maritim dan logistik, seperti *Maluku Integrated Port* (MIP).
3. **Pembangunan Konektivitas dan Logistik**
   - Percepatan pembangunan pelabuhan terpadu, jalan strategis, dan bandara *gateway* di Kalimantan Selatan, Maluku, NTT, dan Papua untuk memperlancar arus barang.
4. **Perbaikan Tata Ruang dan Perencanaan**
   - Dukungan ekosistem inovasi biru (BISA) dari aspek pengembangan wilayah.
   - Penguatan perencanaan lintas pulau melalui konsolidasi data spasial dan program ILASPP di Sulawesi, yang bertujuan membuat proyek investasi memiliki kepastian hukum dan layak secara finansial (*bankable*).



Gambar 8 Kunjungan Kerja Menko AHY ke Lombok

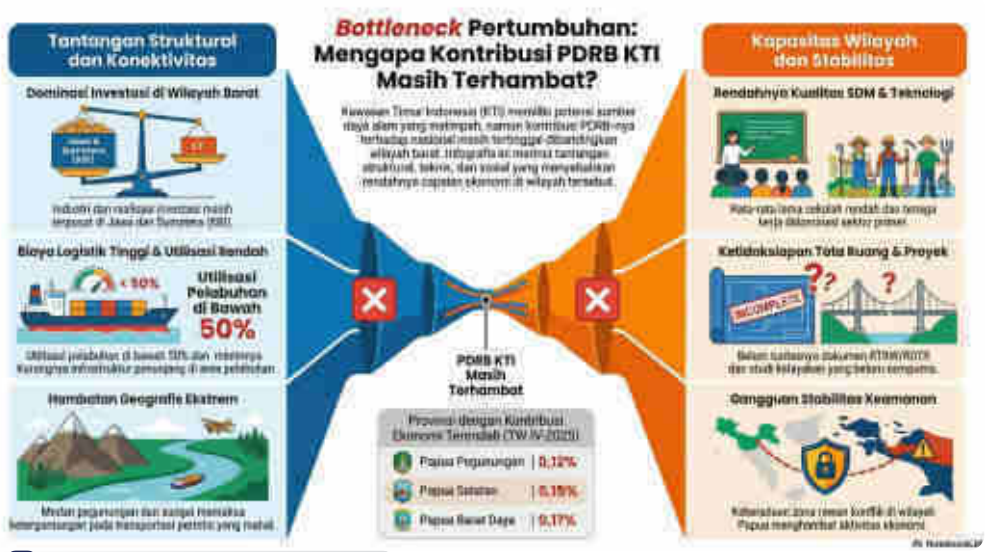


FAKTOR PENGHAMBAT

1. **Konsentrasi Industri dan Investasi di Wilayah Barat**
   - Industri cenderung terkonsentrasi di kawasan aglomerasi ekonomi wilayah barat (KBI), sehingga porsi realisasi investasi dan kontribusi PDB nasional masih terpusat di Jawa dan Sumatra.
2. **Lemahnya Sistem Logistik dan Konektivitas**
   - Biaya logistik masih tinggi akibat minimnya muatan balik dan utilisasi pelabuhan yang rata-rata masih di bawah 50 persen.
   - Kondisi geografis yang ekstrem di beberapa wilayah (seperti pegunungan di Papua) memaksa ketergantungan pada transportasi perintis yang mahal.
   - Terdapat *bottleneck* konektivitas, seperti masalah pendanaan jembatan Kalimantan-Pulau Laut dan tantangan pengamanan pada ruas jalan Trans Papua.
3. **Kualitas SDM dan Teknologi yang Rendah**
   - Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi di KTI masih rendah, tercermin dari rata-rata lama sekolah yang di bawah wilayah barat.
   - Tenaga kerja didominasi sektor primer, minim tenaga ahli, dan industri berteknologi tinggi belum berkembang merata, yang membatasi kapasitas hilirisasi.
4. **Masalah Tata Ruang dan Kesiapan Proyek**
   - Belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah provinsi mempengaruhi kepastian lokasi dan waktu implementasi investasi.
   - Banyak proyek strategis (seperti MIP Ambon atau KEK Mekar Putih) yang *deal flow* investasinya melambat karena dokumen kesiapan (*readiness criteria*) seperti studi kelayakan (FS) dan *masterplan* belum sempurna;
5. **Ketidakterpaduan Hilirisasi dan Masalah Keamanan**
   - Ekosistem industri untuk komoditas seperti perikanan, sagu, dan kelapa masih berjalan sporadis dan belum kompak dalam hal lahan, pembiayaan, serta logistik.
   - Isu stabilitas keamanan di wilayah tertentu, seperti di beberapa kabupaten di Papua Pegunungan yang ditetapkan sebagai zona rawan, turut menghambat aktivitas ekonomi.



Gambar 8 Faktor Pendorong KTI



Gambar 9 Faktor Penghambat KTI

Highlight gambaran pelaksanaan pencapaian indikator Kontribusi PDRB KTI pada 3 provinsi dengan capaian tertinggi dan capaian terendah, sebagai berikut.



Gambar 10 Grafik Capain PDRB KTI

Sumber: BPS - diolah

Faktor penghambat kurang optimalnya capaian Persentase Distribusi PDRB ADHB - KTI di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Gorontalo antara lain:

1. Keempat provinsi tersebut mengalami tantangan kondisi geografis ekstrem (pegunungan, rawa dan sungai, bahkan kepulauan) serta keterbatasan konektivitas yang menyebabkan harga barang tinggi dan daya saing rendah.



Gambar 11 Menko AHY Bertemu Para Gubernur Papua

2. Pada keempat provinsi tersebut, perekonomian minim nilai tambah. Kontribusi PDRB di Papua Pegunungan bergantung pada stimulus pemerintahan dan aktivitas pertanian mengadopsi sistem subsisten; Papua Selatan didominasi oleh Lapangan Usaha (LU) Konstruksi; dan Papua Barat Daya disokong oleh LU Industri Pengolahan. Perekonomian di Provinsi Gorontalo didominasi sektor pertanian.

3. Provinsi-provinsi di Papua menghadapi isu stabilitas keamanan, di mana Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maybrat ditetapkan sebagai zona perang milisi oleh TPNPB-OPM.

Faktor pendorong 3 daerah dengan capaian distribusi persentase PDRB ADHB - KTI optimal pada Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, sebagai berikut:



Gambar 12 Rakor Pembangunan IKN

1. Perekonomian Kalimantan Timur pada Triwulan IV-2025 tumbuh positif sebesar 5,04 persen (*y-on-y*), utamanya didorong oleh kinerja kuat industri pengolahan melalui hilirisasi migas dan peningkatan kapasitas kilang, masifnya serta pembangunan infrastruktur IKN yang terus memacu sektor konstruksi. Momentum pertumbuhan ini semakin diperkokoh oleh tingginya konsumsi pemerintah dan stabilitas produksi sektor pertambangan yang tetap menjadi penopang utama meski menghadapi fluktuasi harga. Kombinasi antara sektor basis sumber daya alam, aktivitas ekspor hasil hilirisasi, dan proyek strategis nasional ini berhasil menjaga soliditas ekonomi daerah sepanjang tahun 2025.

2. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang mencatat angka impresif 8,47% pada tahun 2025 utamanya didorong oleh akselerasi hilirisasi nikel yang memacu kinerja industri pengolahan logam dasar, khususnya di kawasan industri Morowali. Dominasi ekspor komoditas besi dan baja ke pasar global menjadi motor penggerak utama dari sisi permintaan, didukung oleh realisasi investasi infrastruktur pendukung smelter yang menjaga kinerja positif sektor konstruksi.

Transformasi struktural ini, yang dipadukan dengan stabilitas produksi sektor pertanian, berhasil menempatkan Sulawesi Tengah sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi nasional melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai angka tertinggi pasca pandemi sebesar 5,43% pada tahun 2025 didorong oleh akselerasi sektor jasa (terutama pariwisata, keuangan, dan kesehatan) yang mencatat laju pertumbuhan impresif. Stabilitas struktur ekonomi tetap terjaga melalui kontribusi dominan sektor pertanian dan perdagangan sebagai basis sementara dari utama, sisi permintaan, kinerja ekspor komoditas unggulan dan konsumsi rumah tangga yang solid menjadi motor penggerak vital. Sinergi ini semakin diperkuat oleh keberhasilan pembangunan infrastruktur konektivitas yang efektif meningkatkan efisiensi arus logistik dan Masyarakat.



Gambar 13 Menko AHY Tinjau Progres Pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar

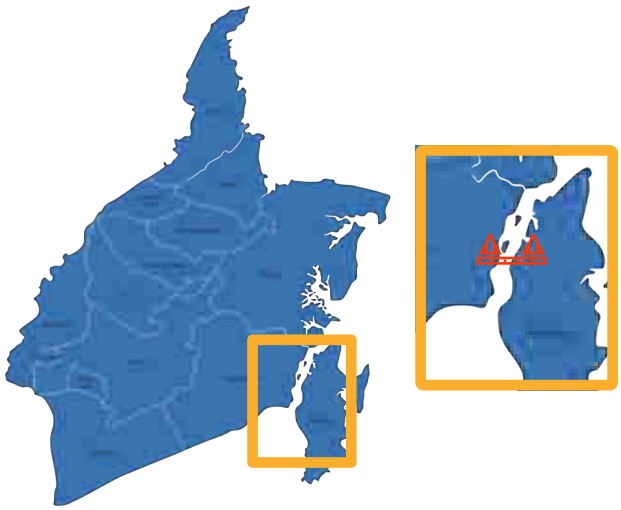


Gambar 14 Faktor Pendorong dan Penghambat 3 Provinsi KTI

Dalam upaya mendorong kontribusi PDRB KTI melalui serangkaian intervensi yang terfokus pada penguatan konektivitas, penuntasan tata ruang, hilirisasi sumber daya lokal, dan penataan agraria di berbagai wilayah meliputi:

Kalimantan Selatan – Pulau Laut & KEK Mekar Putih (Maritime Gate ALKI II)

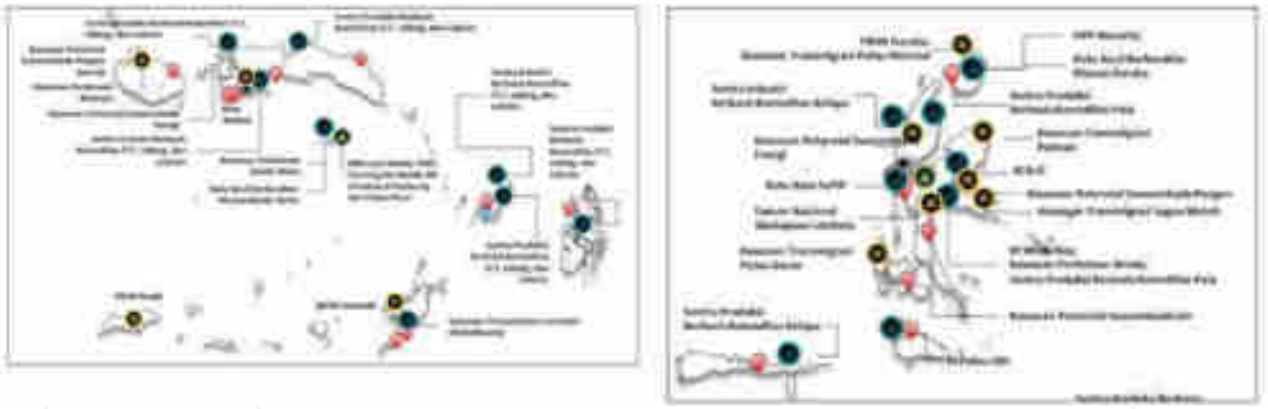
- Orkestrasi konektivitas Pulau Laut: percepatan prasyarat KEK Mekar Putih (sertifikasi lahan ≥50%, konsistensi RTRW Kotabaru 2025), akselerasi PPKH jalan/jembatan koridor Banjarbaru Batulicin Pulau Laut, serta pendampingan pra-FS Pelabuhan Mekar Putih (data pasang surut, batimetri, desain sisi laut–darat).
- DED bentang utama Jembatan Kalimantan Pulau Laut tuntas; membuka akses ekonomi dan logistik ke maritime gate ALKI II. Dampak ke PDRB KTI: membuka seamless arus barang orang–barang ke simpul pelabuhan, menekan biaya logistik, serta menarik investasi industri pengolahan di pesisir Kalsel.



Gambar 15 Lokasi Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut Kotabaru

Maluku & Maluku Utara – Pelabuhan Terpadu (MIP), KNMP, Sagu & Kelapa

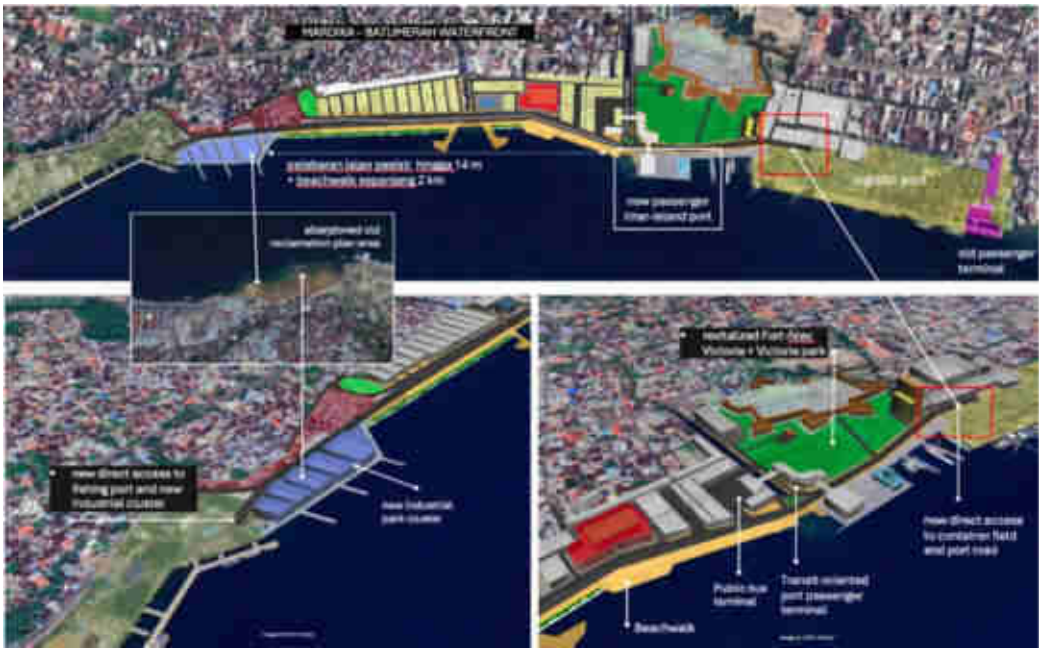
- Maluku (Ambon/MIP): sinkronisasi kebijakan pusat–daerah untuk Ambon/Maluku *Integrated Port* sebagai PSN; lokasi indikatif Waisarisa (±950 ha) disiapkan (logistik, industri perikanan, terminal roro) bersamaan dengan penyempurnaan dokumen kesiapan (RTRW, FS) dan *business case.*



Gambar 16 Arah Pengembangan Kewilayahan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara – RPJMN 2025-2029

- KNMP Maluku: ekspansi Kampung Nelayan Merah Putih (dari 2 lokasi di 2025 → 7 lokasi di 2026; Ambon, MBD, Maluku Tenggara 2, SBB 2, SBT 1), sebagai *grassroots* peningkat *output* perikanan & nilai tambah lokal.
- Usulan PSN Sagu (SBT): hilirisasi 35.000 ha. Pemda menyiapkan pemetaan geospasial, rencana induk, dan DED agar sagu menjadi komoditas industri & ketahanan pangan KTI.
- Maluku Utara (kelapa): identifikasi 8 lokasi (±7.528,88 ha) lahan potensial (APL/transmigrasi, rendah konflik) dan program revitalisasi kebun rakyat (perhutanan sosial ±252.000 ha; 327 kelompok) untuk target produksi 100 ribu butir/hari mengaitkannya ke koridor industri Halmahera. Dampak ke PDRB KTI: konektivitas pelabuhan + hilirisasi perikanan/sagu/kelapa memperbesar output industri pengolahan dan perdagangan di Maluku–Malut, menggeser PDRB dari ekstraktif ke bernilai tambah.

- Kota Ambon (NUDP–ICP/CIP): pilot perencanaan *waterfront* revitalisasi akses pelabuhan Yos Sudarso, *industrial linkage* Pelabuhan Perikanan Tantui, *flood mitigation* dan ruang publik agar fungsi kota sebagai simpul layanan & industri perikanan naik kelas.



Gambar 17 Ilustrasi Integrasi Kawasan Logistik dan Industri Perikanan di Pesisir kota Ambon

Nusa Tenggara Timur – Flores (Bandara Komodo, Lintura, Air & Pangan)

- Bandara Komodo (Labuan Bajo): peningkatan peralatan keselamatan & layanan (X ray, BHS, TGS, utilitas) dan *road map* pengembangan terminal internasional 2026 2027; integrasi bandara pariwisata/perekonomian;



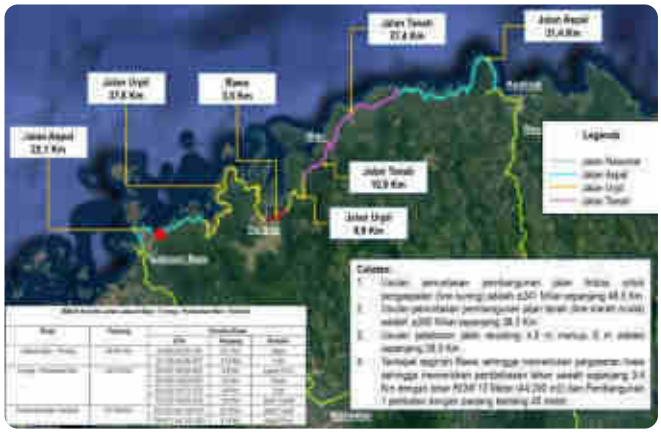
Gambar 18 Kunjungan Kerja Pembangunan Bandara Komodo

- Lintas Utara Flores (Lintura): penanganan ±53 km perkerasan 2025; rencana ±10 km (2026) dan ±4 km (2027)—mengaitkan permukiman & pusat ekonomi utara dengan Bandara Komodo;
- Forum koordinasi Tata Ruang Pulau Flores dalam rangka mendukung pengembangan Pariwisata Super Premium Labuan Bajo dan sekitarnya.

- Ketahanan air–pangan: program JIAT (25 titik pembangunan, 100 rehabilitasi; 10 sumur baru; 20 rehabilitasi; progres ~90%); integrasi embung/sumur bor untuk menyokong produktivitas, khususnya kabupaten defisit air. Dampak ke PDRB KTI: mobilitas wisata usaha meningkat; akses logistik komoditas (perikanan/pertanian) membaik; produktivitas pertanian naik via air menambah *local value-added* KSPN & kawasan sekitar.

Papua – Trans Papua Trase Wamena–Jayapura & Integrasi Klaster

- Prioritas percepatan lintas provinsi; harmonisasi struktur ruang Pulau Papua dengan Trans Papua, penyelesaian Wamena, target Jayapura termasuk pengamanan segmen rawan bersama TNI AD.
- Integrasi klaster: koridor sentra dengan pangan Merauke–Muting–Salor, klaster migas Fakfak Bintuni, pertambangan Mimika, pariwisata Raja Ampat/Triton agar konektivitas menghasilkan nilai tambah ekonomi wilayah. Dampak ke PDRB KTI: penurunan *economic distance*, akselerasi aktivitas perdagangan/pangan/energi, dan perbaikan koneksi antarpusat pertumbuhan sehingga output riil KTI bertambah.



Gambar 19 Pengembangan Jalan Lintas Utara Flores

Sulawesi – ILASPP (Administrasi Pertanahan & Tata Ruang Terintegrasi)



Gambar 20 Forum Koordinasi Penataan Ruang di Sulawesi

- ILASPP (ATR/BPN, Kemendagri, BIG): kontrak PTSL Terintegrasi (588.000 ha), penyiapan TOR RDTR/RTR KSN, penguatan peta dasar 1:5.000 di Sulawesi; rekomendasi Deputi 1 agar peta dasar dimanfaatkan RDTR–OSS, segera untuk mitigasi adaptasi iklim, dan analisis spasial daerah. Dampak ke PDRB KTI: percepatan kepastian ruang & perizinan (KKPR) menyunurkan investasi ke KTI; RDTR integratif mempercepat *project delivery* simpul-simpul pertumbuhan.

Secara umum kegiatan/program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 21 Upaya yang Telah Dilakukan di Wilayah KTI

Identifikasi atas faktor pendorong dan penghambat serta upaya yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, tindak lanjut dan rekomendasi berikut disusun untuk memperkuat capaian dan mengatasi tantangan yang ada.

TINDAK LANJUT

1. Mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur di simpul-simpul utama (pelabuhan terpadu, bandara *gateway*, dan jalan strategis) melalui finalisasi kontrak serta perizinan lahan.
2. Mendorong transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif ke industri pengolahan bernilai tambah tinggi pada komoditas perikanan, sagu, dan kelapa.
3. Mengonsolidasi data spasial dan tata ruang (peta dasar) untuk memberikan kepastian hukum dan menjadikan proyek investasi lebih layak secara finansial (*bankable*).

REKOMENDASI

1. Memperkuat nilai tambah produksi melalui hilirisasi serta diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada sektor ekstratif (misal pertanian dan industri pangan; pariwisata) agar tidak volatil, lebih resilien, dan berkelanjutan.
2. Membangun kluster industri dan logistik lokal yang fokus pada keunggulan komparatif KTI (pengolahan ikan, agroindustri, produksi nikel) untuk meningkatkan efektivitas skala ekonomi dan biaya logistik dapat turun.
3. Membangun infrastruktur dasar, layanan publik & pembangunan sosial sebagai upaya peningkatan stabilitas dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 22 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

2. Indeks Ketahanan **Air Nasional**

Indeks Ketahanan Air Nasional (IKtA-N) memiliki peranan penting dalam mengukur dan mengawasi kondisi ketersediaan, kualitas, dan pengelolaan sumber daya air di suatu negara. Indeks ini menjadi alat evaluasi yang komprehensif untuk menilai seberapa mampu suatu wilayah atau negara dalam memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan ekosistem secara berkelanjutan. Dengan adanya Indeks Ketahanan Air Nasional, pemerintah dapat mengidentifikasi risiko-risiko terkait krisis air seperti kekeringan, polusi, dan tekanan akibat perubahan iklim. Selain itu, indeks ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif serta berorientasi pada mitigasi risiko dan adaptasi terhadap tantangan masa depan.

Indeks ketahanan air nasional pada tahun 2022 kemudian dihitung melalui Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) menggunakan formula perhitungan tersendiri yaitu Kebijakan Nasional Sumber Daya Air. Mengacu capaian angka indeks ketahanan air nasional pada tahun 2022 yaitu sebesar 3,48.



Gambar 23 Tinjauan Irigasi

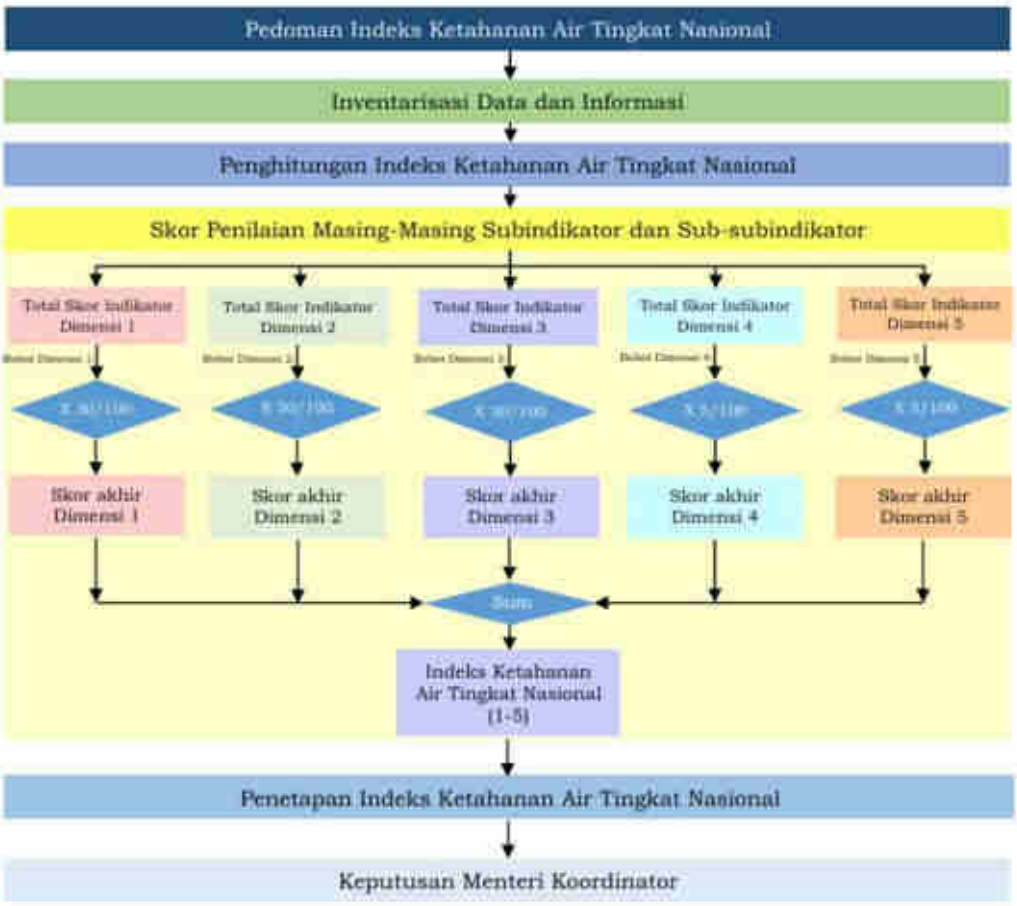
Penghitungan IKtA-N dilakukan secara periodik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sekali, sebagai upaya monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sumber daya air secara nasional dan wilayah sungai

Berikut merupakan penjabaran kategori Indeks Ketahanan Air berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, di antaranya: tangguh, handal, moderat, rentan dan bahaya sesuai pada gambar di bawah ini:



Gambar 24 Kategori dan Dimensi IKtA-N
Sumber: Pedoman IKtA-N

Berikut adalah alur proses penghitungan IKtA-N pada gambar di bawah ini:



Gambar 25 Alur Perhitungan Nilai IKtA-N

Sumber: Pedoman IKtA-N

Secara nasional, nilai IKtA-N mencapai 3,595, yang menempatkan ketahanan air Indonesia pada kategori "MODERAT" yang secara agregat melampaui target RPJMN Tahun 2025 sebesar 3,5. Nilai ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh indikator pada lima dimensi IKtA-N dan mencerminkan capaian kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional sepanjang tahun 2025. Nilai IKtA-N diperoleh melalui proses penghitungan yang mengintegrasikan data sektoral, hasil pelaksanaan program strategis, serta hasil pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan dan program pengelolaan sumber daya air telah berjalan searah dengan target awal RPJMN, meskipun masih terdapat ruang penyempurnaan pada beberapa indikator.

Capaian Indeks Ketahanan Air Nasional dan perbandingan terhadap target nasional disampaikan seperti pada tabel berikut:

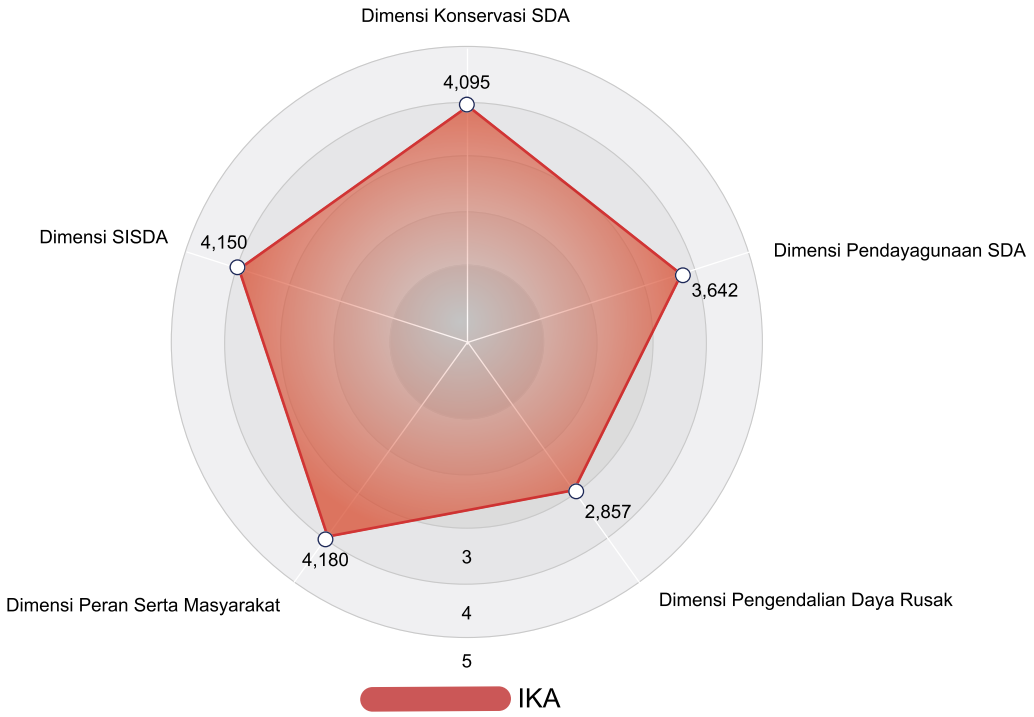
Tabel 19 Perbandingan Capaian dan Target IKAN

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/NASIONAL 2025
3,48	3,50	3,595	102,71%	3,50	3,50

Dalam Renstra Kemenko Infra dan target RPJMN Tahun 2025, Kemenko Infra telah menetapkan target Indeks Ketahanan Air Nasional telah selaras, yakni sebesar 3,50. Realisasi capaian indikator tercapai 3,595 atau sebesar 102,71% ini mengindikasikan kinerja yang sangat memadai. Hal ini menunjukkan bahwa strategi intervensi pembangunan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 telah berada pada jalur yang tepat.

Adapun perbandingan target maupun capaian pada saat laporan kinerja ini disusun, belum terdapat instansi pemerintah lain (baik di tingkat K/L nasional/daerah maupun negara lain) yang memiliki data capaian dengan karakteristik, ruang lingkup, dan variabel indikator kinerja yang identik (ekuivalen) untuk disandingkan secara langsung (*apple-to-apple*).

Skor Indeks Ketahanan Air



Gambar 26 Skor Indeks Ketahanan Air

Dimensi Partisipasi Masyarakat (4,180) dan Sistem Informasi SDA (4,150), serta Konservasi SDA (4,095) menjadi penyumbang nilai terbesar. Tingginya nilai konservasi didorong oleh tren positif pada perlindungan sumber air dan peningkatan akses sanitasi layak.

Dimensi Pendayagunaan SDA (3,642) menunjukkan performa solid berkat progres penyediaan air baku dan dampak nyata pelaksanaan Inpres Irigasi yang mendongkrak keandalan air irigasi dan indeks pertanaman.

Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air (2,857) masih berada pada kategori "Rentan". Ini adalah satu-satunya dimensi dengan skor di bawah 3,0. Rendahnya nilai ini disebabkan oleh keterbatasan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana yang belum optimal dibandingkan upaya pencegahan fisik.



Gambar 27 Skor 5 Dimensi IKtA-N

Capaian tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong maupun faktor penghambat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor Pendorong

1. Penetapan IKTA-N sebagai indikator prioritas dalam RPJMN memberikan "mandat kuat" bagi seluruh sektor.
2. Tersedianya penghitungan memudahkan kementerian/ lembaga pedoman teknis (K/L) dalam menyuplai data yang terstandar.
3. Eksekusi fisik di lapangan, terutama penyediaan air baku dan irigasi, berkontribusi langsung pada kenaikan skor.
4. Meningkatnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya air berkelanjutan.
5. Penerapan inovasi teknologi melalui digitalisasi Sistem Air Minum (SCADA) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya air.
6. Tersedianya dan terjaganya sumber daya air yang memadai;
7. Dukungan kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden terkait irigasi dan agenda Swasembada Air untuk mendorong percepatan implementasi di lapangan.
8. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
9. Penyediaan infrastruktur sumber daya air yang memadai.



Gambar 28 Tinjauan Lapangan Bendungan Pidekso, Wonogiri

Faktor Penghambat

1. Belum ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) menjadi hambatan utama.
2. Akibat belum adanya Perpres DSDAN, Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) tentang Pedoman IKTA-N belum dapat ditetapkan secara formal. Saat ini, pedoman masih bersifat operasional dan belum mengikat penuh secara hukum.
3. Variasi kelengkapan data antar-walidata masih memerlukan waktu ekstra untuk validasi dan penyesuaian.
4. Ketimpangan kapasitas antar daerah karena beberapa daerah masih menghadapi kendala SDM, keterbatasan operasional dan pemeliharaan, serta lambatnya proses pengadaan.
5. Perubahan iklim dan alih fungsi lahan yang mengurangi kapasitas lahan dalam menahan air.
6. Penurunan kualitas sungai dan air tanah di wilayah padat penduduk.



Gambar 30 Indonesia–Singapura Perkuat Sinergi Menuju Ketahanan Air 2045 dan Pengelolaan Air Berkelanjutan



Gambar 29 Tinjauan Pengerjaan Irigasi

Dalam upaya mendorong keberhasilan IKta-N upaya yang telah dilakukan oleh Kemenko Infra meliputi:

1. Rapat Koordinasi *Kick Off Meeting* Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
2. Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan
3. Rapat Pembahasan Neraca Air Nasional dan Tindak Lanjut Penetapan Indeks Ketahanan Air Nasional.
4. Rapat Koordinasi Monitoring Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
5. Pembahasan RPermenko Indeks Ketahanan Air Nasional.
6. Peninjauan Revitalisasi Jaringan Irigasi Air.
7. Monev dan Kunjungan Lapangan Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Berdasarkan hasil analisis, capaian, serta dinamika proses penentuan nilai IKtA-N Tahun 2025, rekomendasi kebijakan yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah sebagai berikut:



Gambar 31 Menko AHY dalam Kegiatan IWWEF PERPAMSI

1 Percepatan Penguatan Kerangka Regulasi Pemerintah perlu mendorong percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) sebagai landasan utama tata kelola sumber daya air nasional. Penetapan Perpres ini menjadi prasyarat untuk penyusunan dan penetapan Permenko tentang Pedoman Penghitungan sehingga proses penentuan nilai IKtA-N memiliki kepastian hukum dan legitimasi yang lebih kuat.

2 Pemantapan Nilai IKtA-N sebagai Indikator RPJMN Nilai IKtA-N Tahun 2025 yang saat ini masih bersifat sementara perlu segera dimantapkan melalui penyelesaian penyesuaian data oleh walidata. Pemantapan ini penting agar IKtA-N dapat digunakan secara optimal sebagai indikator evaluasi capaian RPJMN dan dasar pengambilan keputusan kebijakan lintas sektor.

3 Diperlukan penguatan mekanisme walidata, baik dari sisi kualitas, konsistensi, maupun ketepatan waktu penyampaian data. Integrasi sistem informasi sumber daya air lintas kementerian/lembaga dan daerah perlu terus didorong agar proses penghitungan IKtA-N semakin efisien dan akurat.

4 Fokus Peningkatan Dimensi Pengendalian Daya Rusak Air mengingat dimensi pengendalian daya rusak air masih menjadi faktor pembatas peningkatan nilai IKtA-N, diperlukan fokus kebijakan pada penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kesiapsiagaan bencana, serta integrasi pengelolaan risiko banjir dan kekeringan dalam perencanaan pembangunan.

5 Pemanfaatan IKtA-N sebagai Instrumen Pengendali Kebijakan IKtA-N perlu dimanfaatkan tidak hanya sebagai indikator pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali perencanaan dan penganggaran pembangunan sumber daya air. Dengan demikian, program dan kegiatan pada Tahun 2026 dapat lebih terarah pada peningkatan indikator-indikator yang secara langsung memengaruhi nilai IKtA-N.

6 Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah untuk menjaga keberlanjutan proses penentuan nilai IKtA-N, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat, baik dalam penyediaan data, pelaksanaan program, maupun evaluasi capaian ketahanan air nasional.

3. Stok **Infrastruktur**

Stok infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik, menjadi fondasi utama bagi aktivitas ekonomi karena meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang serta jasa. Dengan ketersediaan infrastruktur yang baik, biaya logistik dapat ditekan, waktu pengiriman dipersingkat, dan konektivitas antar wilayah menjadi lebih lancar, sehingga mendorong produktivitas dan daya saing sektor ekonomi. Pengelolaan dan pengembangan stok infrastruktur yang optimal sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi PDB secara signifikan. Stok Infrastruktur dalam hal ini dinyatakan sebagai persentase dari PDB, sehingga mengukur berapa banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghasilkan *output* suatu negara.

Perhitungan dari stok infrastruktur terhadap PDB dihasilkan dengan melihat nilai aset infrastruktur yang terbangun. Nilai aset infrastruktur terbangun diperoleh atas nilai aset infrastruktur n-1 ditambah nilai aset infrastruktur baru – depresiasi nilai. Nilai aset infrastruktur dibagi ke dalam komposisi sektoral.

Komposisi sektoral adalah pembagian atau disagregasi total nilai stok infrastruktur nasional ke dalam kelompok-kelompok bidang layanan infrastruktur yang spesifik. Pemisahan ini dilakukan karena setiap sektor memiliki karakteristik fisik, nilai ekonomi, umur aset, dan laju penyusutan (depresiasi) yang berbeda-beda.

Komposisi sektoral terdiri dari 6 sektor utama yang menjadi pembentuk total stok infrastruktur Indonesia, yaitu:

01
Transportasi
Mencakup jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Sektor ini memiliki bobot terbesar dalam stok nasional.



02
Energi
Mencakup pembangkit listrik, transmisi, gardu induk, dan infrastruktur migas.



03
TIK (Teknologi Informasi & Komunikasi):
Mencakup menara telekomunikasi, serat optik (*fiber optic*), dan pusat data. Sektor ini memiliki karakteristik unik berupa laju depresiasi yang sangat tinggi (cepat usang).



04
WSS (*Water Supply & Sanitation*)
Mencakup instalasi pengolahan air minum, jaringan pipa distribusi, dan sistem sanitasi/air limbah.



05
Irigasi
Mencakup bendungan, bendung, dan saluran irigasi primer/sekunder/tersier untuk pertanian.



06
Perumahan (*Housing*)
Mencakup aset fisik perumahan rakyat yang dibangun oleh pemerintah.



Setiap sektor memiliki depresiasi berbeda. Aset TIK menyusut nilainya jauh lebih cepat (~12,9% per tahun) dibandingkan kelima aset lainnya yaitu, Transportasi, Energi, WSS, Irigasi dan Perumahan (~5,2% per tahun).

Proporsi atau persentase dari stok infrastruktur terhadap PDB sesuai data yang terdapat dalam RPJMN 2025-2029, mencatat capaian pada tahun 2019 adalah 43% yang digunakan sebagai *baseline*.

Capaian Stok infrastruktur dan perbandingan terhadap target nasional disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target Stok Infrastruktur

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
43,00	**46,5**	**45,4** *(proyeksi 2025)*	**97,63%**	**46,50**	**46,50**

Dalam Renstra Kemenko Infra dan target RPJMN Tahun 2025, Kemenko Infra telah menetapkan target Stok Infrastruktur yang selaras, yakni sebesar 46,50%. Meskipun angka realisasi belum sepenuhnya menyentuh target yaitu 45,4%, capaian sebesar 97,63% ini mengindikasikan kinerja yang sangat memadai. Hal ini menunjukkan bahwa strategi intervensi pembangunan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 telah berada pada jalur yang tepat. Capaian tersebut merupakan nilai proyeksi untuk tahun 2025 yang dihitung oleh Bappenas.

Adapun perbandingan target maupun capaian pada saat laporan kinerja ini disusun, belum terdapat instansi pemerintah lain (baik di tingkat K/L nasional/daerah maupun negara lain) yang memiliki data capaian dengan karakteristik, ruang lingkup, dan variabel indikator kinerja yang identik (ekuivalen) untuk disandingkan secara langsung (*apple-to-apple*).

Secara nominal, total nilai kekayaan infrastruktur Indonesia mengalami kenaikan, namun rasionya terhadap ekonomi cenderung stagnan. PDB tumbuh "lebih cepat" daripada kemampuan negara menyediakan infrastruktur pendukungnya. Jika tren ini berlanjut, infrastruktur akan menjadi penghambat (*bottleneck*) pertumbuhan ekonomi di masa depan (macet, biaya logistik mahal, listrik kurang).

Terjadi transformasi struktural yang signifikan pada komposisi aset di tahun 2025, di mana terjadi pergeseran dari infrastruktur konektivitas fisik ke infrastruktur digital.



Sektor	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025	Perbedaan
Energi	1.670,5	1.741,4	70,9
TIK	908,2	1.251,1	342,95
Transportasi	2.410,9	2.274,4	-136,54
WSS	248,4	213,5	-34,94
Irigasi	348,1	315,9	-32,17
Perumahan	270,1	372,1	101,99
Total Capital Stock	5.856,2	6.168,4	312,20
Total Capital Stock (% yoy)	1,8	5,331	3,57
Total Capital Stock (% of GDP)	45,3	**45,4**	0,16

Gambar 32 Capaian Stok Infrastruktur per Komponen

Sumber: Paparan Bappenas pada evaluasi RKP TW III

Sektor Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), Proyeksi Capaian 2025: Melonjak dari Rp908,2 triliun (2024) menjadi Rp1.251,1 triliun. Pertumbuhan Bersih: + Rp342,95 trilun hal ini mencerminkan prioritas transformasi digital. Sektor ini menjadi pendorong utama pertumbuhan stok nasional. Investasi baru yang masuk sangat masif, mampu menutup laju depresiasi TIK yang tinggi (usang cepat), dan memberikan surplus aset terbesar.

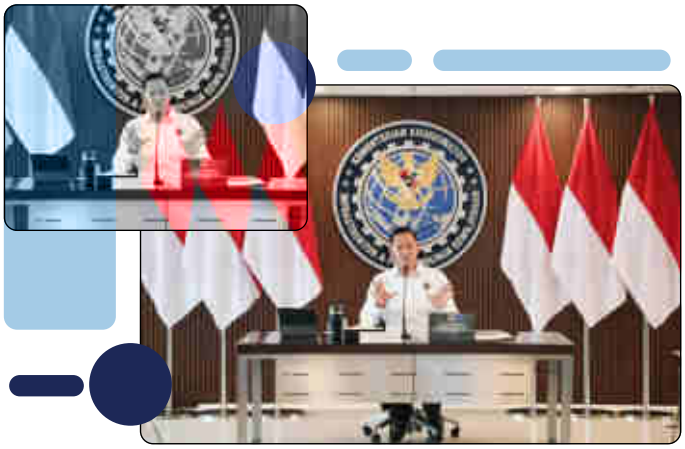
Sektor Transportasi, Proyeksi Capaian 2025: Menurun dari Rp2.410,9 triliun (2024) menjadi Rp2.274,4 triliun. Penurunan Bersih: - Rp136,54 triliun. Meskipun merupakan sektor dengan nilai aset terbesar, transportasi mengalami *negative net investment*. Artinya, nilai jalan, jembatan, atau pelabuhan yang rusak/usang pada 2025 lebih besar daripada nilai proyek baru yang dibangun.

Secara nominal, kekayaan infrastruktur kita naik menjadi Rp6.168,4 triliun di 2025. Namun secara kualitas relatif terhadap ekonomi, kapasitas kita menurun (rasio turun). Fokus pembangunan ke depan harus menyeimbangkan antara membangun baru (terutama TIK) dan menyelamatkan aset lama (Transportasi & Air) agar nilainya tidak tergerus.

Beberapa upaya/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Stok infrastruktur adalah sebagai berikut:

1 Program Tol Laut

Program Tol Laut bertujuan menurunkan disparitas harga di daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan) dan mendukung distribusi logistik nasional. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan fiskal, armada kapal, infrastruktur pelabuhan yang minim fasilitas bongkar muat, serta volume muatan balik yang belum optimal. Kendala operasional seperti kerusakan mesin kapal dan cuaca buruk juga menghambat kinerja.



Gambar 35 Rakor Pengelolaan Sampah

2 Regulasi Kereta Api Bekecepatan Tinggi



Indonesia menargetkan peningkatan Indeks Infrastruktur dan Konektivitas menjadi 75,0 pada 2029. Saat ini, belum ada kerangka hukum nasional spesifik yang mengatur kereta cepat (keselamatan, operasional, kelembagaan), yang sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum proyek lanjutan (seperti jalur ke Surabaya). Sampai dengan Tahun 2025 telah diajukan dan mendapatkan persetujuan izin prakarsa dari Kemensetneg untuk penyusunan RPP Penyelenggaraan Kereta Cepat dan RPerpres Komite Kereta Cepat (KCIC).

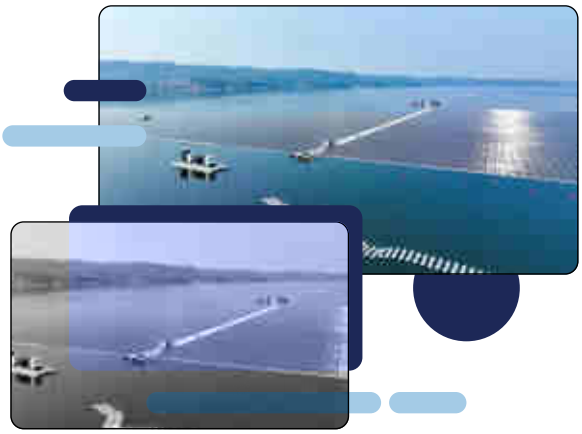
3 Peluncuran "All Indonesia"

Aplikasi tunggal untuk deklarasi kedatangan penumpang internasional telah resmi diluncurkan dan berlaku di seluruh bandara dan pelabuhan mulai 1 Oktober 2025.



Gambar 34 Peluncuran All Indonesia

4 Pemanfaatan PLTS Apung di Indonesia



terdapat 259 Bendungan Pemerintah dengan total potensi PLTS Apung sebesar 14.701 MW namun dalam pemanfaatannya masih hanya sedikit. Bendungan/waduk dalam pemanfaatannya untuk pembangkit listrik bisa dilakukan melalui PLTA, PLTM dan PLTS Apung. Dari total 259 bendungan milik pemerintah terdapat 257 bendungan yang memiliki potensi PLTS apung 14.701 MW. Pemanfaatan waduk sebagai lokasi PLTS terapung (*floating solar* PV) menjadi solusi inovatif. Teknologi ini memanfaatkan permukaan waduk untuk pemasangan panel surya tanpa mengganggu fungsi utama waduk sebagai penyedia air baku, irigasi, dan pengendali banjir. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai aspek teknis, lingkungan, regulasi, dan model bisnis agar implementasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

5 Koordinasi dan Sinkronisasi Inpres

Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2025.



6 Implementasi Waste-to-Energy (WtE)



Gambar 35 Rakor Pengelolaan Sampah

Implementasi *Waste-to-Energy* (WtE) atau Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sesuai Perpres Nomor 35 Tahun 2018 (yang kini diperbarui oleh Perpres Nomor 109 Tahun 2025) difokuskan pada percepatan pembangunan PLTSa di kota-kota besar untuk mengatasi krisis sampah. Kebijakan ini menekankan penggunaan teknologi ramah lingkungan, percepatan seleksi badan usaha, penugasan BUMD, dan skema *tipping fee*. Kemenko Infra berperan untuk mengawal pelaksanaan dari 2 Kota yaitu, Surabaya dan Palembang, dalam implementasi fasilitas WtE atau lebih dikenal dengan PSEL.

7 Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal

Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui *Transit-Oriented Development* (TOD)/*Transit Oriented Affordable Housing* (TOAH). Program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian yang strategis, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program ini mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sistem transportasi massal guna meningkatkan aksesibilitas, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendorong efisiensi mobilitas perkotaan.



8 Pengawalan Program 3 Juta Rumah



Gambar 36 Program 3 Juta Rumah

Pengawalan program 3 juta rumah untuk mengatasi *backlog* perumahan dengan membangun/ merenovasi 3 juta hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Targetnya adalah 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta di desa/pesisir, didukung insentif seperti PPN DTP, pembebasan BPHTB, dan perizinan cepat.

Dalam pencapaian target Stok Infrastruktur tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan penghambat sebagai berikut:

Faktor **Pendorong**

1. Kebijakan nasional yang bersinergi untuk mendorong pembangunan infrastruktur juga dilakukan oleh pihak swasta.
2. Asta Cita Bapak Presiden untuk mendukung program swasembada pangan, air, dan energi membutuhkan pondasi utama yaitu infrastruktur.

Faktor **Penghambat**

1. Terjadinya efisiensi anggaran untuk koordinasi dalam pencapaian investasi infrastruktur.
2. Adanya perbedaan distribusi Infrastruktur antar daerah terutama faktor kerusakan infrastruktur akibat beban berlebih dan bencana alam.
3. Masih adanya keterbatasan data belanja modal.
4. Ketidakseimbangan distribusi infrastruktur antar daerah di Indonesia.
5. Kondisi global yang tidak menentu seperti perang dagang antara China dan Amerika serta tarif Trump yang dapat menghambat investasi asing (PMA) terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia.
6. Perhitungan baru dapat dilaksanakan T+1 setelah tahun berjalan.

Tindak **Lanjut**

1. Optimalisasi koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintah melalui pemanfaatan platform digital (rapat daring, *dashboard* bersama).
2. Penyusunan skala prioritas infrastruktur berbasis urgensi dan dampak ekonomi.
3. Penguatan sinergi pembiayaan alternatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembiayaan kreatif, dan pemanfaatan dana swasta.
4. Penegakan regulasi pengendalian muatan kendaraan (*Over Dimension Over Loading*/ ODOL).



4. Rumah Tangga dengan **Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan**

Menurut RPJMN 2020–2024, rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau adalah rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi kriteria kelayakan dan dapat dijangkau secara ekonomi. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, definisi ini diperluas menjadi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, yang mencakup:

Hunian **Layak**

1 Hunian yang memenuhi standar keselamatan bangunan, memiliki luas minimum per orang sesuai standar nasional, serta memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak.

Terjangkau

2 Hunian yang dapat dijangkau secara ekonomi oleh rumah tangga, baik melalui kepemilikan maupun sewa, dengan mempertimbangkan rasio pengeluaran rumah tangga terhadap pendapatan untuk kebutuhan perumahan.

Berkelanjutan

3 Hunian yang terintegrasi dengan aksesibilitas transportasi publik, layanan dasar, dan lapangan kerja; mendukung keberlanjutan lingkungan seperti efisiensi energi dan manajemen limbah; serta dapat dipertahankan secara sosial dan ekonomi oleh rumah tangga dalam jangka panjang.

Hingga tahun 2025 BPS telah menghitung Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak hingga tahun 2024 dengan data capaian sebagai berikut:

Tabel 21 Capaian Persentase RTAHL 2019-2024

TAHUN	CAPAIAN (%)
2019	56,51
2020	59,54
2021	60,90
2022	60,66
2023	63,15
2024	65,25

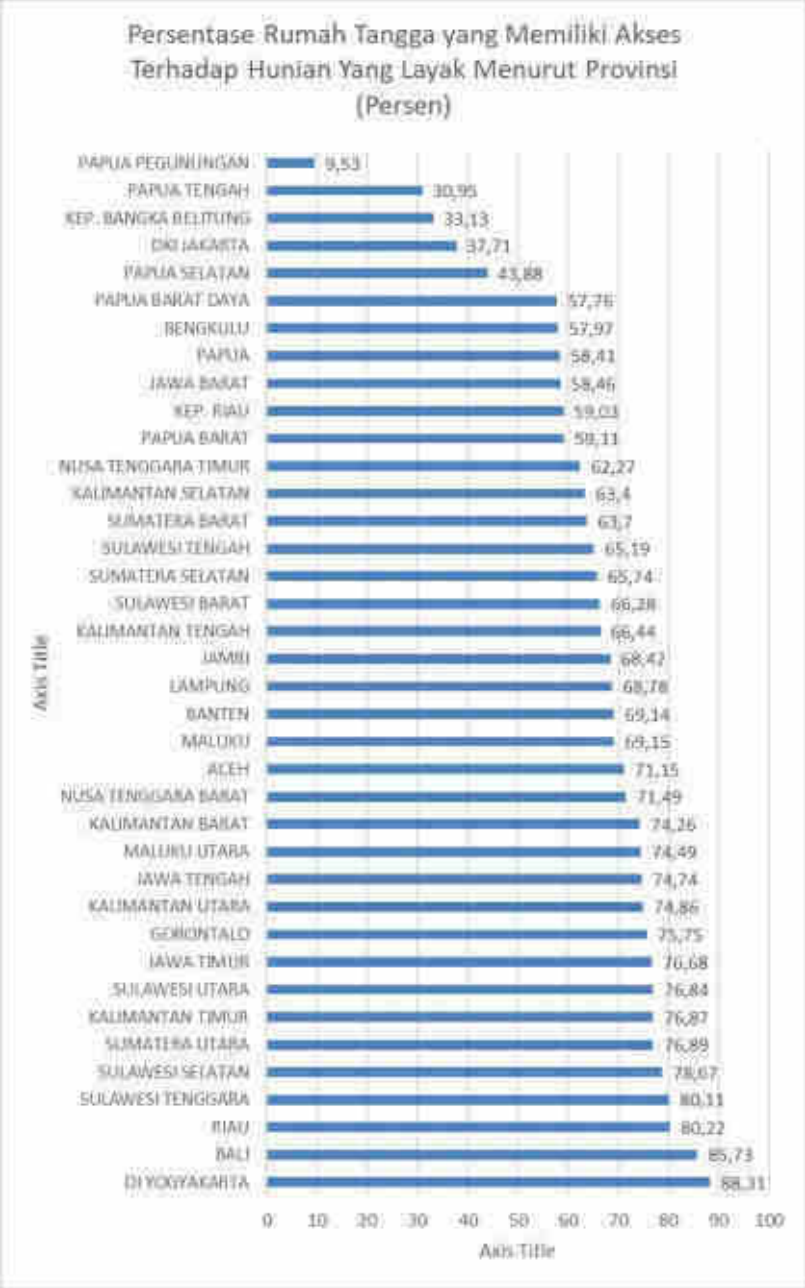
Sumber: Data BPS diolah

Secara nasional, rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak berada di angka 68,4% pada tahun 2025. Namun sebaran persentase di setiap Provinsi sangat bervariasi. Persentase terkecil tercatat berada di Papua Pegunungan dengan hanya 9,53% rumah tangga yang memiliki akses hunian layak. Ini menunjukan tantangan signifikan dalam penyediaan hunian layak di wilayah tersebut. Di sisi lain, persentase terbesar dimiliki oleh D.I Yogyakarta dengan angka yang relatif tinggi yaitu 88,31%, secara rinci data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Badan Pusat Statistik menyampaikan bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (*sufficient living space*);
2. Memiliki akses terhadap air minum layak;
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak; dan
4. Ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu:

- atap terluas berupa: beton/ genteng/seng/kayu/sirap;
- dinding terluas berupa: tembok /plesteran anyaman bambu/ kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan
- lantai terluas berupa:marmer/ granit/keramik/parket/vinil/ karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/ papan/semen/bata merah.



Gambar 37 Rata-Rata Hunian Layak Provinsi

Sumber: BPS

Komponen-komponen tersebut di atas secara substansi merepresentasikan dimensi kelayakan huni, keterjangkauan dalam konteks sosial ekonomi rumah tangga, serta keberlanjutan lingkungan hunian yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup. Data tersebut diperbarui secara berkala oleh Badan Pusat Statistik yang juga merujuk pada hasil Susenas yang diselenggarakan pada bulan Maret setiap tahunnya. Adapun data yang digunakan sebagai sumber dalam laporan ini adalah yang telah diperbarui oleh Badan Pusat Statistik pada 16 Desember 2025.



Capaian Kinerja Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Tahun 2025 serta perbandingan terhadap target nasional disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 22 Perbandingan Capaian dan Target RTAHL

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
65,25	67	68,4	102,09%	67,00	67,00

Dalam Renstra Kemenko Infra dan target RPJMN Tahun 2025, Kemenko Infra telah menetapkan target Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan telah selaras, yakni sebesar 67. Realisasi capaian indikator tercapai 68,4 atau sebesar 102,09% ini mengindikasikan kinerja yang sangat memadai. Hal ini menunjukkan bahwa strategi intervensi pembangunan yang dijalankan sepanjang tahun 2025 telah berada pada jalur yang tepat.

Adapun perbandingan target maupun capaian pada saat laporan kinerja ini disusun, belum terdapat instansi pemerintah lain (baik di tingkat K/L nasional/daerah maupun negara lain) yang memiliki data capaian dengan karakteristik, ruang lingkup, dan variabel indikator kinerja yang identik (ekuivalen) untuk disandingkan secara langsung (*apple-to-apple*).



Gambar 38 Data Capaian RTLH

Terdapat korelasi negatif antara tingkat kesejahteraan ekonomi daerah (PDRB dan UMP) dengan tingkat akses hunian layak. Provinsi dengan pendapatan tertinggi seperti DKI Jakarta justru menempati posisi ke empat terendah (37,71%), sementara daerah dengan upah menengah-rendah seperti D.I Yogyakarta mencatatkan capaian tertinggi (88,31%). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya pendapatan tidak menjamin kemudahan akses hunian akibat faktor harga lahan yang sangat tinggi dan kepadatan penduduk di kawasan urban.

Harga tanah di kawasan perkotaan padat seperti Jakarta mencapai 40–70% dari harga rumah, yang membatasi pasokan rumah subsidi dan keterjangkauan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Salah satu kriteria hunian layak adalah minimal 7,2 m2 per kapita. Tingginya kepadatan penduduk di Jakarta menyebabkan banyak rumah tangga tinggal di ruang yang sempit dan tidak memenuhi standar kecukupan ruang tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menarik migrasi besar-besaran, yang jika tidak dibarengi dengan penyediaan lahan (*land banking*), akan memicu tumbuhnya kawasan kumuh.

Penyediaan rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan turut dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan implementatif di tingkat nasional dan daerah. Untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berikut disajikan analisis faktor pendorong dan penghambat secara nasional, serta faktor utama pada provinsi dengan persentase capaian tertinggi dan terendah. Berikut adalah rincian faktor-faktor tersebut:

Faktor Pendorong Nasional

- Program 3 Juta Rumah dalam RPJMN 2025–2029 menetapkan target peningkatan akses hunian layak dari 65,25% tahun 2024 menjadi 74% pada 2029.
- Dukungan pembiayaan nasional melalui FLPP dengan realisasi sekitar 278 ribu unit tahun 2025 dan BSPS lebih dari 44 ribu unit (berdasarkan data KemenPKP), serta penguatan BP Tapera dan perbankan.
- Pengembangan hunian berbasis *Transit Oriented Development* didorong melalui penyusunan RPerpres TOD, mencakup Manggarai, Jatake, Tenjo Baru, dan Kedungsepur untuk meningkatkan keterjangkauan hunian perkotaan.
- Intervensi negara pada hunian khusus dilakukan melalui pembangunan hunian pascabencana di Agam dan Tanah Datar serta pemanfaatan eks Wisma Atlet Kemayoran bagi ASN, TNI, dan Polri.
- Penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah melalui peran Kemenko Infra meningkatkan sinkronisasi kebijakan lahan, pembiayaan, dan kawasan kumuh guna mendukung efektivitas Program 3 Juta Rumah.

Faktor Penghambat Nasional

- Keterbatasan lahan terjangkau dan kenaikan harga tanah yang mencapai 40–70% dari harga rumah membatasi pasokan rumah subsidi, terutama di kawasan perkotaan bertekanan pembangunan tinggi.
- Penetapan harga rumah subsidi berbasis provinsi belum mencerminkan variasi UMR, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi kabupaten/kota, sehingga menurunkan minat pengembang dan keterjangkauan MBR.
- Ditemukannya kualitas konstruksi tidak sesuai standar serta indikasi pelanggaran hukum pada beberapa proyek perumahan menunjukkan lemahnya pengawasan sejak perencanaan hingga pelaksanaan program.
- Hunian pascabencana dan rumah susun masih menghadapi keterbatasan dukungan sosial ekonomi, pembiayaan operasional, serta akses transportasi, sehingga pemanfaatan hunian belum berkelanjutan.
- Pendataan penerima bantuan perumahan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara *by name by address* meningkatkan risiko tumpang tindih antara BSPS, Rutilahu APBD, CSR, dan Dana Desa.



Gambar 39 Faktor Pendorong dan Penghambat Nasional RTLH

Faktor Pendorong Provinsi dengan Persentase Tertinggi

- **Inovasi Kebijakan dan Integrasi Ekonomi**
  Keberhasilan daerah didorong oleh kemampuan mengintegrasikan kebijakan perumahan dengan sektor ekonomi utama serta melakukan inovasi tata ruang. Contohnya, Bali mengintegrasikan perumahan dengan kawasan pariwisata untuk pekerja, sementara D.I Yogyakarta menerapkan inovasi hunian vertikal dan pendekatan berbasis transportasi massal (*Transit Oriented Development*) untuk mengatasi keterbatasan lahan perkotaan.
- **Kolaborasi dan Kapasitas Perencanaan**
  Faktor ini mencakup kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra internasional, serta kapasitas fiskal daerah yang baik. Di D.I Yogyakarta, kolaborasi lintas sektor memperkuat perencanaan berbasis data. Sedangkan di Bali, kualitas perencanaan dan koordinasi memungkinkan penggunaan kombinasi pendanaan dari APBD, APBN, dan swasta.
- **Ketersediaan Lahan dan Dukungan Infrastruktur (PSU)**
  Ketersediaan lahan yang memadai menjadi faktor kunci, seperti yang terjadi di Riau di mana pertumbuhan kawasan industri mendorong pengembangan perumahan baru. Selain itu, dukungan aktif pemerintah daerah dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) terbukti meningkatkan minat pengembang untuk membangun rumah layak huni bahkan di luar pusat perkotaan.

Faktor Penghambat Provinsi dengan Persentase Terendah

- **Kendala Geografis dan Tingginya Biaya Konstruksi**
  Kondisi geografis yang sulit, baik berupa wilayah kepulauan maupun topografi pegunungan ekstrem, menjadi penghambat utama. Di Kepulauan Bangka Belitung, kondisi kepulauan memicu tingginya biaya logistik material, sementara di Papua Pegunungan, medan yang sulit dan penduduk yang terpencar menyebabkan biaya konstruksi dan transportasi melonjak tajam. Hal ini berdampak pada kenaikan harga rumah yang menurunkan keterjangkauan masyarakat serta minat pengembang.
- **Keterbatasan Infrastruktur Dasar dan Dukungan Pasca-Huni**
  Pembangunan fisik rumah sering kali tidak diikuti oleh ketersediaan ekosistem pendukung yang memadai. Di Papua Tengah, minimnya infrastruktur dasar permukiman (air minum, sanitasi, listrik) menyebabkan hunian belum memenuhi standar kelayakan. Selain itu, di Papua Pegunungan, keberlanjutan hunian terhambat oleh kurangnya dukungan pasca-huni, minimnya akses layanan dasar, serta terbatasnya aktivitas ekonomi lokal di sekitar lokasi hunian.
- **Skala Pasar Kecil dan Kapasitas Kelembagaan Terbatas**
  Aspek ekonomi dan tata kelola juga menjadi hambatan signifikan. Di wilayah kepulauan, skala pasar perumahan yang relatif kecil dan minimnya pembiayaan non-APBN menghambat pengembangan perumahan massal. Masalah ini diperberat oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang masih dalam tahap berkembang, khususnya di Daerah Otonom Baru (DOB) seperti Papua Tengah, yang memperlambat perencanaan dan penyediaan hunian secara merata.



Gambar 40 Faktor Pendorong Penghambat Daerah RTLH

Tantangan dan Upaya yang Dilakukan

Tantangan dalam menyediakan rumah layak huni di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah strategis, tingginya biaya konstruksi dan pembebasan lahan, hingga kesenjangan antara daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dengan harga rumah yang terus meningkat. Selain itu, masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan akses transportasi juga menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan hunian yang benar-benar layak. Permasalahan lain muncul dari keterbatasan data yang akurat untuk perencanaan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam pelaksanaan program perumahan rakyat, termasuk dalam pengawasan kualitas bangunan dan pemenuhan standar teknis.

Dalam mendukung capaian kinerja ini, Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terus melakukan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Beberapa koordinasi yang telah dilakukan yaitu:

1. Rapat dengan Bappenas terkait Program 3 Juta Rumah di wilayah Perkotaan dan Perdesaan;
2. Rapat terkait peningkatan efektivitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
3. Rapat penyediaan rumah khusus bagi ASN/TNI/POLRI;
4. Rapat terkait pembiayaan perumahan dengan berbagai *stakeholder* keuangan; dan
5. Kolaborasi strategis dengan Lembaga Non Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri seperti World Bank, GoTo Group, HUD Institute dan lainnya.

5. Proporsi PDRB Perkotaan **Terhadap PDB Nasional**

Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional merupakan indikator penting untuk memahami kontribusi sektor perkotaan dalam perekonomian suatu negara. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kota-kota biasanya menjadi pusat industri, jasa, perdagangan, dan inovasi yang menyediakan lapangan kerja serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Dengan memantau angka dari proporsi ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memastikan alokasi sumber daya yang tepat serta mengatasi tantangan urbanisasi seperti kemacetan, kemiskinan perkotaan, dan tekanan terhadap infrastruktur.

Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional dihitung untuk memahami sejauh mana kontribusi wilayah perkotaan sebagai motor penggerak pertumbuhan nasional. Proporsi diperoleh dari pembagian total PDRB wilayah perkotaan (mencakup 36 Kota Prioritas Non Wilayah Metropolitan, 10 Wilayah Metropolitan, dan Kota-Kota Otonom) dengan total PDB Nasional.

$$\frac{\sum (PRDB\ Kabupaten\ \&\ Kota\ Anggota\ 36\ Perkotaan\ Non\ WM + 10\ WM + Kota\ Otonom}{\sum PDB\ Nasional} X\ 100\%$$

Perhitungan menggunakan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk menghilangkan pengaruh inflasi dan menunjukkan pertumbuhan riil. Analisis mencakup entitas kota otonom serta kawasan aglomerasi (Wilayah Metropolitan) yang terintegrasi secara ekonomi.

Wilayah perkotaan dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik ekonomi dan kewenangannya:

- Kota Otonom: Wilayah perkotaan dengan kewenangan pemerintahan mandiri;
- Wilayah Prioritas (36 Kota): Kawasan perkotaan yang menjadi fokus pengembangan nasional untuk menumbuhkan titik ekonomi baru;
- Wilayah Metropolitan (WM): Kawasan aglomerasi yang terintegrasi secara ekonomi dan infrastruktur (contoh: Jabodetabek dan Mebidangro);
- Kawasan Barat Indonesia (KBI): Meliputi wilayah di Sumatra dan Jawa; dan
- Kawasan Timur Indonesia (KTI): Meliputi wilayah di Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Hingga akhir tahun 2025 BPS masih belum merilis capaian Triwulan IV atau capaian Tahun 2025, sehigga capaian yang digunakan adalah capaian Triwulan III Tahun 2025. Tren capaian menunjukkan peningkatan yang stabil setiap tahunnya, yang mengindikasikan keberhasilan intervensi kebijakan perkotaan.



Gambar 41 Tren Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional

Sumber: BPS diolah

Proporsi PDRB Perkotaan menunjukan kenaikan yang positif dan stabil. Ekonomi Indonesia semakin bertransformasi menjadi ekonomi berbasis perkotaan yang produktif. Tren kenaikan (*Year-on-Year*) Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional terus meningkat setiap tahunnya, menandakan peran kota yang semakin dominan sebagai mesin ekonomi negara.

Dengan target nasional (RPJMN/Renstra) yang ditetapkan sebesar 57,29%, tingkat ketercapaian kinerja hingga Triwulan III Tahun 2025 telah menyentuh angka 99,55%. Performa ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan perkotaan yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infra berada pada jalur yang tepat.

Capaian Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional perbandingan terhadap target nasional disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 23 Perbandingan Capaian dan Target PDRB Perkotaan terhadap PDRB Nasional

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
56,56	57,29	57,03	99,55%	57,29	57,29

Dalam Renstra Kemenko Infra dan target RPJMN Tahun 2025, Kemenko Infra telah menetapkan target PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional yang selaras, yakni sebesar 57,29%. Hingga Triwulan III Tahun 2025, realisasi telah mencapai 57,03% tingkat ketercapaian saat ini adalah 99,55%, yang dikategorikan melampaui performa target dalam periode berjalan dan mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan perkotaan yang dilakukan berhasil mendorong aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan lebih tinggi.

Adapun perbandingan target maupun capaian pada saat laporan kinerja ini disusun, belum terdapat instansi pemerintah lain (baik di tingkat K/L nasional/daerah maupun negara lain) yang memiliki data capaian dengan karakteristik, ruang lingkup, dan variabel indikator kinerja yang identik (ekuivalen) untuk disandingkan secara langsung (*apple-to-apple*).

Berdasarkan data BPS hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian ekonomi di masing-masing Lokasi Prioritas (Lokpri) menunjukkan karakteristik yang unik. Berikut adalah rincian capaian kinerja di masing-masing kategori tersebut:



Gambar 42 Capaian berdasarkan Lokasi prioritas

1 Wilayah Metropolitan (WM)

Kategori ini merupakan penyumbang terbesar bagi ekonomi perkotaan nasional, dengan total kontribusi mencapai 77,7%. Namun, terdapat ketimpangan yang sangat tajam antara wilayah barat dan timur di sektor ini.

- Kawasan Barat Indonesia (KBI):
  - **Capaian:** Menyumbang 71,76% dari total PDRB perkotaan (Nilai kumulatif: Rp4.135,4 Triliun).
  - **Karakteristik:** Didominasi oleh aglomerasi raksasa di Pulau Jawa.
  - **Kontributor Utama:** Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Surabaya.
- Kawasan Timur Indonesia (KTI):
  - **Capaian:** Hanya menyumbang 5,97% (Nilai kumulatif: Rp343,8 Triliun).
  - **Karakteristik:** Skala ekonomi metropolitan di timur jauh lebih kecil dibandingkan barat.
  - **Kontributor Utama:** Makassar, Denpasar, dan Badung

2 36 Kota Prioritas

Kategori ini menyumbang 12,9% dari total ekonomi perkotaan. Ini adalah satu-satunya kategori di mana KTI mampu menyaingi KBI secara signifikan, didorong oleh keberhasilan hilirisasi industri.

- Kawasan Barat Indonesia (KBI):
  - **Capaian:** Menyumbang 6,79% (Nilai kumulatif: Rp391,2 Triliun).
  - **Kontributor Utama:** Cilegon (industri baja/kimia), Pekanbaru, dan Malang.
- Kawasan Timur Indonesia (KTI):
  - **Capaian:** Menyumbang 6,12% (Nilai kumulatif: Rp352,5 Triliun).
  - **Analisis:** Meskipun sedikit di bawah KBI, angka ini menunjukkan efisiensi luar biasa. Pertumbuhan agresif di wilayah ini menjadi sinyal keberhasilan pemerataan ekonomi melalui industrialisasi.
  - **Kontributor Utama:** Balikpapan (penyangga IKN/migas) dan Morowali (pusat nikel).

3 Kota Otonom

Kategori ini menyumbang 9,4% dari total ekonomi perkotaan. Kota-kota ini berfungsi sebagai pusat ekonomi mandiri di daerah yang tidak termasuk dalam kawasan metropolitan besar

- Kawasan Barat Indonesia (KBI):
  - **Capaian:** Menyumbang 6,47% (Nilai kumulatif: Rp373,0 Triliun).
  - **Kontributor Utama:** Kediri, Padang, dan Dumai
- Kawasan Timur Indonesia (KTI):
  - **Capaian:** Menyumbang 2,89% (Nilai kumulatif: Rp166,7 Triliun).
  - **Kontributor Utama:** Bontang, Pontianak, dan Tarakan.

Tabel 24 Ringkasan Perbandingan Lokpri

KATEGORI LOKPRI	KONTRIBUSI KBI (Rp TRILIUN)	KONTRIBUSI KTI (Rp TRILIUN)	KOTA KONTRIBUTOR UTAMA	KETERANGAN
Wilayah Metropolitan	4.135,4 (71,76%)	343,8 (5,97%)	**KBI** : Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya **KTI** : Makassar, Denpasar, Badung	KBI sangat dominan (pusat uang berputar)
36 Kota Prioritas	391,2 (6,79%)	352,5 (6,12%)	**KBI** : Cilegon, Pekanbaru, Malang **KTI** : Balikpapan, Morowali, Samarinda	Paling seimbang, KTI mengejar lewat kota industri.
Kota Otonom	373,0 (6,47%)	166,7 (2,89%)	**KBI** : Kediri, Padang, Dumai **KTI** : Bontang, Pontianak, Tarakan	KBI unggul, peran sebagai pusat regional.



Gambar 43 Peninjauan MRT Fase II di Jakarta

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sementara Wilayah Metropolitan KBI masih menjadi "mesin utama" ekonomi, 36 Kota Prioritas di KTI adalah "bintang baru" yang tumbuh cepat berkat industrialisasi sumber daya alam.

Capaian Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional, turut dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan implementatif di tingkat nasional dan daerah. Untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berikut disajikan analisis faktor pendorong dan penghambat secara nasional. Berikut adalah rincian faktor-faktor tersebut:

Faktor Pendorong

1. Peningkatan konektivitas, infrastruktur, dan percepatan fasilitasi pelaksanaan proyek strategis perkotaan dengan mendorong investasi dan penguatan skema pembiayaan alternatif.

2. Perencanaan tata ruang terpadu dengan penyelarasan RDTR yang terintegrasi dalam sistem OSS, penerapan *One Spatial Planning Policy*, serta pemanfaatan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 yang didukung oleh Proyek *Integrated Land Administration* & *Spatial Planning Project* (ILASPP).

3. Penguatan Arsitektur Kebijakan Kota:
Reaktivasi TKSPPN (Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional) dan penerapan *Urban Policy Lab* di wilayah metropolitan prioritas menjadi pendorong utama. Langkah ini mencakup penetapan KPI khusus perkotaan dan tata kelola lintas batas yang memastikan setiap kebijakan dapat menggerakkan dampak ekonomi secara terukur.



Gambar 44 Rakor terkait RUU Sistem Transportasi Nasional

4. Percepatan Simpul Mobilitas dan TOD:
Adanya kepastian regulasi dan kelembagaan lintas sektor di sekitar simpul transit mendorong terciptanya nilai tambah kawasan. Hal ini memacu investasi, penciptaan lapangan kerja, dan konsumsi melalui mekanisme *Land Value Capture.*



Gambar 45 Kunjungan Lapangan KCIC di Tegalluar Bandung

Faktor Penghambat

1. Masalah Pembebasan Lahan dan Aset: Isu sengketa atau ketidakjelasan status aset dan lahan pada proyek simpul mobilitas (contohnya kasus di Stasiun Senen) berisiko menunda jadwal konstruksi. Penundaan fisik ini secara langsung menunda realisasi dampak ekonomi (*economic uptake*) di kawasan tersebut.

2 Vulnerabilitas Aglomerasi Terhadap Banjir: Gangguan banjir di kawasan aglomerasi besar menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi (*downtime*), khususnya pada sektor jasa dan perdagangan. Lambatnya finalisasi Inpres pengurangan risiko banjir dan sinkronisasi eksekusi lintas instansi menentukan seberapa besar gangguan ekonomi ini dapat ditekan ekonomi ini dapat ditekan.

3 Keterbatasan pembiayaan proyek pembangunan perkotaan secara APBN, kapasitas fiskal daerah, dan investasi sebagai dampak dari minimnya integrasi dan sinkronisasi rencana tata ruang.

4 Belum terintegrasinya data yang relevan dengan perencanaan dan pembangunan perkotaan.

5 Proyek strategis perkotaan mendorong konektivitas dan investasi, tetapi belum sepenuhnya selaras dengan tata ruang dan *pipeline* pembiayaan.

6 Kota menengah mulai tumbuh sebagai pusat ekonomi, tetapi integrasi desa-kota belum optimal, sehingga *spillover* pertumbuhan terbatas.

7 Urbanisasi: Tanpa kesiapan infrastruktur dan layanan dasar, berisiko memicu kemiskinan perkotaan dan ketimpangan akses sumber penghidupan.

Berdasarkan analisa capaian, faktor pendorong, faktor penghambat dan upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025, direkomendasikan langkah-langkah berikut:

01

Penguatan koordinasi antar K/L dan harmonisasi kewenangan pusat–daerah melalui Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional, *Multilateral Meeting*, dan Forum Pemerintah Daerah.



02

Optimalisasi integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan perkotaan (Rencana Tata Ruang, *Masterplan,* dan *Integrated City Planning*) guna mendorong pembiayaan yang lebih efektif, memperkuat kapasitas fiskal daerah, integrasi desa-kota, kesiapan infrastruktur layanan dasar, serta membuka ruang bagi investasi pembangunan perkotaan.

03

Pemanfaatan data terpadu/integrasi data yang relevan untuk perencanaan dan pembangunan perkotaan melalui *dashboard* perkotaan atau *dashboard* kewilayahan.



SS.2
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan **Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas**

SS.2 dimaksudkan untuk menjabarkan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Infra. SS.2 memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tabel 25 Capaian Kinerja SS.2

INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/NASIONAL 2025
Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	100%	100%	100%	92%	-
Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	3,1	3,58	115%	3,1	-
Total				107,5%		

IKSS 2.1
Persentase Penyelesaian **Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada K/L di bawah koordinasi Kemenko Infra. Isu strategis yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy*-OSPP).
2. Integrated *Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP).
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi.
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
5. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang terintegrasi melalui *Transit-Oriented Development* (TOD)/*Transit-Oriented Affordable Housing* (TOAH).

Penyelesaian dari isu-isu di atas menjadi realisasi atas target yang ditetapkan, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah:

$$\frac{\textit{Jumlah Isu Strategis yang diselesaikan oleh Menko}}{\textit{Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \; X\ 100\%$$

Persentase capaian target pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada tahun 2025 disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 26 Capaian Kinerja IKSS 2.1

INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/NASIONAL 2025
Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy-OSPP*)	-	100%	100%	100%	100%	-
Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)	-	100%	100%	100%	100%	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi	-	100%	100%	100%	100%	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	-	100%	100%	100%	100%	-
Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui T*ransit oriented Development* (TOD)/*Transit Oriented Affordable Housing* (TOAH)	-	100%	100%	100%	100%	-
Total				100%		

Interpretasi dari capaian indikator Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan tercapai keseluruhan apabila angka rata-ratanya mencapai 100%. Dengan demikian, nilai maksimal dari capaian indikator ini adalah 100% sedangkan apabila angka rata-rata persentase kurang dari 100% maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ada salah satu atau lebih indikator yang tidak terselesaikan isu strategisnya.

1. Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy*-OSPP)

Tingginya konflik pemanfaatan ruang di Indonesia yang teridentifikasi mencapai 57.419.720 hektare (30%), pemerintah mengimplementasikan Kebijakan Satu Tata Ruang (OSPP). Sistem ini bertujuan mewujudkan satu Rencana Tata Ruang (RTR) yang tunggal dan terintegrasi sebagai satu-satunya rujukan hukum (*single reference*) untuk seluruh pemanfaatan ruang, dari darat hingga udara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan demikian, OSPP secara sistematis menyelesaikan tumpang tindih untuk menciptakan kepastian hukum, memperlancar investasi, serta mengarahkan pembangunan nasional agar lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan.

Penguatan OSPP merupakan agenda strategis untuk menjawab fragmentasi kebijakan tata ruang serta tingginya konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas matra. OSPP dirancang sebagai kerangka kebijakan integratif yang menyatukan penataan ruang darat, laut, udara dan ruang dalam bumi dalam satu sistem perencanaan nasional yang koheren, selaras dengan kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia, serta mendukung kepastian hukum pembangunan dan investasi.



Gambar 46 Siklus Perencanaan Tata Ruang dalam Kerangka OSPP (Integrasi 4 Matra)

Pada tahap awal, target OSPP tahun 2025 direncanakan untuk diatur melalui Peraturan Presiden. Namun, hasil koordinasi intensif lintas K/L, Pemerintah Daerah, serta masukan akademisi dan pakar tata ruang menunjukan bahwa pengintegrasian OSPP ke dalam regulasi penyelenggaraan tata ruang yang sudah ada akan memberikan daya ikat yang lebih kuat dan operasional. Oleh karena itu, OSPP diarahkan menjadi bagian substantif dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang.

Dalam proses tersebut, Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang berperan aktif menyampaikan masukan kebijakan kepada Kementerian ATR/BPN, khususnya terkait penguatan integrasi penataan ruang empat matra, mekanisme sinkronisasi lintas sektor, serta penguatan peran koordinasi pemerintah pusat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Pendekatan ini menegaskan pergeseran paradigma penataan ruang dari sektoral dan terpisah menjadi satu sistem perencanaan terpadu.

Substansi OSPP yang didorong dalam revisi PP Nomor 21 Tahun 2021 mencakup integrasi ruang udara dan ruang bawah permukaan bumi ke dalam RTRW dan RDTR, penguatan keterpaduan tata ruang darat dan laut, serta pemanfaatan peta tematik integratif sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan pembangunan. Dengan demikian, OSPP tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi terimplementasi langsung dalam proses penyusunan, evaluasi, dan pengendalian tata ruang.



Gambar 47 Pertemuan Kemenko Infra dengan Akademisi ITS dan UNDIP

Sepanjang tahun 2025 Kemenko Infra mendorong penguatan fondasi OSPP melalui fasilitasi diskusi teknis dengan perguruan tinggi dan mitra internasional, koordinasi pemanfaatan data geospasial lintas sektor, serta pengembangan prototipe integrasi OSPP pada wilayah percontohan. Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai lokasi prototipe dengan pertimbangan kesiapan dalam penyusunan RTRW dan RDTR, kelengkapan bentang alam darat laut, keberadaan ruang udara strategis pertahanan, serta aktivitas pemanfaatan ruang dalam bumi.

Capaian Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy*-OSPP) Tahun 2025 disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 27 Capaian Kinerja OSPP

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
-	100%	100%	100%	-	-

Secara nomenklatur, target spesifik terkait isu strategis OSPP tidak dijabarkan secara mandiri di dalam Renstra Kemenko Infra maupun RPJMN Tahun 2025. Hal ini dikarenakan OSPP merupakan sub-komponen yang terintegrasi di dalam indikator utama, yaitu “Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan”. Lebih lanjut, sebagai wujud eskalasi komitmen kinerja, target indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja ditetapkan secara optimal sebesar 100%, lebih progresif dibandingkan dengan proyeksi awal yang tercantum di dalam Renstra sebesar 92%.

Adapun untuk komparasi kinerja dengan tahun sebelumnya, kementerian belum memiliki data dasar (*baseline*) mengingat mandat isu strategis tersebut baru dieksekusi pada Tahun Anggaran 2025. Di samping itu, belum terdapat instansi pembanding, baik di tingkat nasional (K/L/D) maupun internasional, yang memiliki kesetaraan karakteristik, ruang lingkup program, maupun variabel pengukuran. Oleh karenanya, penyandingan capaian kinerja secara identik dan langsung (*apple-to-apple*) belum dapat disajikan dalam Laporan Kinerja periode ini.

Capaian OSPP menunjukkan kemajuan signifikan dalam perumusan kerangka konseptual dan regulatif OSPP, termasuk harmonisasi nomenklatur tata ruang, penguatan integrasi data spasial, serta penyelarasan tata ruang dengan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Integrasi OSPP ke dalam revisi PP Nomor 21 Tahun 2021 memperkuat posisinya sebagai instrumen pengendali pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

Meski demikian, implementasi OSPP masih menghadapi tantangan, antara lain kesiapan kelembagaan, keterbatasan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data lintas matra, serta perlunya harmonisasi lanjutan terhadap regulasi sektoral. Selain itu, digitalisasi tata ruang khususnya untuk penataan ruang laut dan udara masih membutuhkan dukungan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ke depan, Kemenko Infra melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang akan terus mengawal proses Revisi PP Nomor 21 Tahun 2021 agar muatan OSPP terakomodasi secara komprehensif dan operasional. Tindak lanjut juga diarahkan pada penguatan forum koordinasi lintas K/L, penyusunan pedoman teknis integrasi empat matra, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui pendampingan dan pelatihan.

Dengan terintegrasinya OSPP dalam regulasi penyelenggaraan tata ruang, kebijakan ini diharapkan menjadi fondasi penataan ruang nasional yang lebih terpadu, adaptif, dan berkelanjutan, serta mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang secara nasional.



Gambar 45 **Koordinasi dengan Pemda dan Kunlap terkait Prototipe Penerapan OSPP dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang**

Untuk mendukung capaian dari target Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dari OSPP, upaya yang telah dilakukan s.d. tahun 2025 yakni:

1. Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi
   - Menegaskan komitmen tata ruang sebagai panglima pembangunan wilayah.
   - Penyerahan simbolik peta dasar skala 1:5.000 kepada seluruh Gubernur Pulau Sulawesi.
   - Target percepatan legalisasi RDTR Sulawesi mencapai 451 dokumen hingga 2029.

2. Forum Tata Ruang Pulau Flores
   - Menghasilkan komitmen kolaborasi antar kabupaten se-Pulau Flores untuk penyelarasan RT-RW dan percepatan legalisasi RDTR terintegrasi OSS.
   - Identifikasi isu strategis seperti pembangunan jalan lintas utara Flores, pengembangan energi baru terbarukan (*geothermal*), dan penyelesaian revisi RDTR secara parsial.
   - Disepakati bahwa “Tata ruang Flores bukan hanya dokumen teknis, tetapi instrumen nyata pembangunan wilayah yang berkeadilan dan lestari”.

3. FGD penyusunan materi teknis RPerpres RTR-KSN Kawasan TN Sembilang
   - Membahas isu strategis, kriteria delineasi, dan konsep pengembangan Kawasan TN Sembilang;
   - Fokus pada harmonisasi tata ruang konservasi dengan wilayah penyangga agar tidak menghambat aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.
   - Direncanakan tindak lanjut berupa konsultasi publik di Provinsi Jambi untuk penyepakatan delineasi RTR-KSN TN Sembilang.

Kendala OSPP sampai tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. **Keterlambatan Revisi RTRW dan Penyusunan RDTR di beberapa daerah:** Sejumlah daerah di Kawasan timur Indonesia, seperti NTT dan sebagian wilayah Sulawesi, masih tertinggal dalam penyusunan atau revisi dokumen RTRW dan RDTR akibat keterbatasan SDM, kapasitas teknis, dan dukungan anggaran.
2. **Integrasi RDTR dengan OSS belum optimal:** Meskipun terdapat peningkatan jumlah RDTR yang telah terintergrasi, kesenjangan masih cukup besar antarwilayah, terutama di kabupaten/kota dengan infrastruktur digital terbatas.
3. **Koordinasi lintas sektor dan antarpulau belum maksimal:** Forum koordinasi menunjukan bahwa konsolidasi antar daerah dalam penyelarasaan tata ruang lintas batas administratif masih perlu diperkuat, khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah yang memiliki keterkaitan ekonomi antar kabupaten.
4. **Tantangan harmonisasi tata ruang di Kawasan Strategis Nasional (KSN):** Seperti di kawasan TN Sembilang, diperlukan sinergi antara perlindungan ekosistem dengan rencana pembangunan wilayah penyangga agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.

2. *Integrated Land Administration* ***and Spatial Planning Project*** **(ILASPP)**

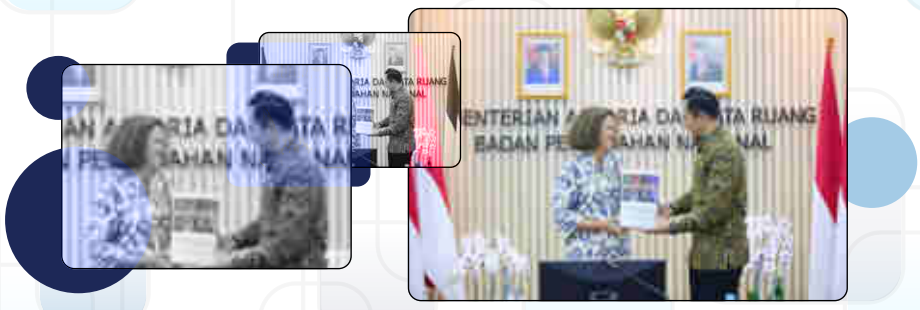
Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) merupakan inisiatif strategis nasional yang dirancang untuk memperkuat tata ruang agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim, menjamin kepastian hak atas tanah (keamanan tenurial), serta memodernisasi sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Proyek ini didukung oleh pendanaan pinjaman sebesar USD653 juta atau setara dengan Rp11,08 triliun.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ILASPP secara spesifik menargetkan tiga isu fundamental:

1. Integrasi Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan: Menyatukan kedua bidang untuk mewujudkan pengelolaan lahan berkelanjutan, yang ditopang oleh pemenuhan peta skala besar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peta tematik lainnya.
2. Dukungan terhadap Komitmen Iklim: Secara aktif mendukung target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui kebijakan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim serta melalui pengamanan hak atas tanah.
3. Modernisasi Sistem Informasi Tanah: Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang modern untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memungkinkan evaluasi properti massal, dan menjamin ketersediaan peta dasar berskala besar yang akurat.

Target ILASPP tahun 2025 adalah terlaksananya *Integrated Land Administration and Spatial Planning* (ILASP) melalui sebagai berikut: 1) Pembentukan *Project Management Unit* (ATR/BPN); 2) Pembentuan *Project Implementation Unit* (Dagri, BIG, ATR); 3) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL); 4) Sosialisasi tanah ulayat; 5) Peta dasar skala besar 1:5000 urban Pulau Sulawesi.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Infra memegang mandat utama dalam mengawal keterpaduan pelaksanaan proyek yang melibatkan tiga *Project Implementation Unit* (PIU) utama, yaitu Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG), dengan rencana perluasan cakupan ke Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi pada tahun 2026.



Gambar 49 Pertemuan Menko AHY dengan World Bank

Capaian *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP) Tahun 2025 disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 28 Capaian Kinerja ILASPP

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
-	100%	100%	100%	-	-

Secara nomenklatur, target spesifik terkait isu strategis ILASPP tidak dijabarkan secara mandiri di dalam Renstra Kemenko Infra maupun RPJMN Tahun 2025. Hal ini dikarenakan ILASPP merupakan sub-komponen yang terintegrasi di dalam indikator utama, yaitu "Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan". Lebih lanjut, sebagai wujud eskalasi komitmen kinerja, target indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja ditetapkan secara optimal sebesar 100%, lebih progresif dibandingkan dengan proyeksi awal yang tercantum di dalam Renstra sebesar 92%.

Adapun untuk komparasi kinerja dengan tahun sebelumnya, Kemenko Infra belum memiliki data dasar (*baseline*) mengingat mandat isu strategis tersebut baru dieksekusi pada Tahun Anggaran 2025. Di samping itu, belum terdapat instansi pembanding, baik di tingkat nasional (K/L/D) maupun internasional, yang memiliki kesetaraan karakteristik, ruang lingkup program, maupun variabel pengukuran. Oleh karenanya, penyandingan capaian kinerja secara identik dan langsung (*apple-to-apple*) belum dapat disajikan dalam Laporan Kinerja periode ini.

Efektivitas koordinasi lintas sektor yang dikawal oleh Kemenko Infra menjadi indikator utama keberhasilan ILASPP saat ini, melampaui kendala realisasi keuangan agregat yang tercatat sebesar Rp73,07 miliar atau 6,6% dari total pagu. Meski penyerapan anggaran masih berada pada tahap awal, penguatan sinergi tersebut telah membuahkan capaian substansial di setiap unit pelaksana:

1. **Kementerian ATR/BPN**
   - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi telah dilaksanakan di delapan provinsi, mencakup area seluas 588.000 hektar dengan nilai kontrak Rp246,96 miliar.
   - Pengadministrasian tanah ulayat di 8 provinsi telah dipantau kepatuhannya hingga Oktober 2025, disertai penyusunan dokumen *Regional Social Assessment.*
   - Digitalisasi dokumen pertanahan di 37 Kantor Pertanahan telah diselesaikan, termasuk optimalisasi anggaran sebesar Rp4,1 miliar untuk penambahan 820.000 berkas.
   - Penyusunan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk 13 paket senilai Rp23,62 miliar telah memasuki tahap kontraktual.
2. **Badan Informasi Geospasial (BIG)**
   - Penyelesaian generalisasi peta wilayah Sulawesi yang saat ini dalam tahap finalisasi *Quality Assurance/Quality Control* (QA/QC).
   - Pelaksanaan kontrak peta skala kecil hingga menengah senilai Rp5,93 miliar.
   - Inisiasi pengadaan sistem produksi peta terintegrasi dengan nilai investasi Rp27,97 miliar.
3. **Badan Informasi Geospasial (BIG)**
   - Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) penegasan batas desa telah mendapatkan *No Objection* dari World Bank pada 16 Oktober 2025.
   - Persiapan tender bantuan teknis untuk penegasan batas desa di kabupaten prioritas, meliputi Bolaang Mongondow, Donggala, dan Toli-Toli.



Gambar 50 Rapat Pembahasan Progres ILASPP

Dalam rangka mempercepat kemajuan program, beberapa langkah strategis telah dan sedang diambil:

- Optimalisasi Anggaran: Melakukan pengalihan potensi sisa pagu untuk penguatan sarana prasarana arsip setelah mendapatkan persetujuan World Bank.
- Pengembangan Infrastruktur Digital: Melakukan penyempurnaan aplikasi Batasku (kolaborasi Kemendagri dan BIG) yang ditargetkan rampung pada Maret 2026.
- Peningkatan Kapasitas Produksi: Mempersiapkan *Map Production Center* dan pembentukan *Project Management Consultant* (PMC) yang ditargetkan berkontrak pada awal 2026.
- Sinkronisasi Kebijakan: Melakukan penyesuaian durasi kajian *One Spatial Planning Policy* agar lebih fokus pada penyelesaian *backlog* integrasi RDTR dengan sistem OSS.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian, ditemukan dinamika pelaksanaan sebagai berikut:

- Faktor Pendorong: Adanya dukungan teknis dari *Implementation Support Mission* dan kuatnya komitmen koordinasi dalam penyelesaian backlog RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS.
- Faktor Penghambat: Rendahnya realisasi anggaran kumulatif (6,6%) serta tantangan teknis dalam sinkronisasi data antar K/L masih menjadi perhatian utama. Hal ini menuntut penguatan fungsi pengawasan agar keterlambatan dokumen pendukung tidak menghambat target tahun 2026.

Guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program, Kemenko Infra merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. Standardisasi NSPK: Segera menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mendukung aksi perubahan iklim dan pengelolaan hutan berkelanjutan secara utuh.
2. Akselerasi Pemanfaatan Data: Mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah untuk segera memanfaatkan peta dasar 1:5.000 wilayah Sulawesi guna mitigasi bencana dan analisis spasial pembangunan.
3. Transparansi dan Aksesibilitas: Menyediakan data mentah dan produk turunan melalui *web service* atau penyimpanan *cloud* agar dapat diakses secara luas oleh pihak terkait.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi **Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi**

Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi adalah serangkaian upaya yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infra untuk mengoptimalkan kinerja sektor penerbangan nasional. Dengan kriteria keberhasilannya adalah implementasi sistem integrasi deklarasi di seluruh bandara internasional. Program ini dilatarbelakangi oleh kontribusi sektor penerbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang belum pulih ke tingkat sebelum pandemi Covid-19, di mana pada tahun 2023 baru mencapai Rp1.002 triliun dari potensi sebesar Rp1.902 triliun.



Gambar 51 Peninjauan kesiapan All Indonesia di Bandara Soeta

Berdasarkan audit tata kelola oleh BPKP, ditemukan belum optimalnya kolaborasi lintas sektor, KPI yang belum bersinergi, dan regulasi yang tumpang tindih. Sebagai respons, pemerintah melakukan Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi yang bertujuan menciptakan *Good Customer Experience* melalui penguatan tata kelola kolaborasi, transformasi digital, perbaikan infrastruktur, dan regulasi. Salah satu inisiatif utamanya adalah transformasi digital melalui "All Indonesia", yaitu integrasi sistem deklarasi penumpang (Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, dan Karantina) menjadi satu pintu untuk menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan kenyamanan penumpang.



Gambar 52 Lini Masa All Indonesia

Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi Tahun 2025 disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 29 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
-	100%	100%	100%	-	-

Secara nomenklatur, target spesifik terkait isu strategis Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi tidak dijabarkan secara mandiri di dalam Renstra Kemenko Infra maupun RPJMN Tahun 2025. Hal ini dikarenakan merupakan sub komponen yang terintegrasi di dalam indikator utama, yaitu “Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan”. Lebih lanjut, sebagai wujud eskalasi komitmen kinerja, target indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja ditetapkan secara optimal sebesar 100%, lebih progresif dibandingkan dengan proyeksi awal yang tercantum di dalam Renstra sebesar 92%.

Adapun untuk komparasi kinerja dengan tahun sebelumnya, Kemenko Infra belum memiliki data dasar (*baseline*) mengingat mandat isu strategis tersebut baru dieksekusi pada Tahun Anggaran 2025. Di samping itu, belum terdapat instansi pembanding, baik di tingkat nasional (K/L/D) maupun internasional, yang memiliki kesetaraan karakteristik, ruang lingkup program, maupun variabel pengukuran. Oleh karenanya, penyandingan capaian kinerja secara identik dan langsung (*apple-to-apple*) belum dapat disajikan dalam Laporan Kinerja periode ini.

Keberhasilan Kemenko Infra dalam mengoordinasikan K/L pada sistem deklarasi All Indonesia dapat dinarasikan sebagai pencapaian strategis dalam orkestrasi lintas sektor yang mengubah tata kelola birokrasi bandara dari terfragmentasi menjadi terintegrasi.



Gambar 53 Launching All Indonesia Bersama Para Stakeholder

Penyatuan Ego Sektoral Menjadi Layanan Satu Pintu: Kemenko Infra berhasil menjembatani dan menyatukan sistem dari empat instansi berbeda Imigrasi (Kemenimipas), Bea Cukai (Kemenkeu), Kesehatan (Kemenkes), dan Karantina (Barantin) yang sebelumnya berjalan sendiri sendiri.

Sebelum Koordinasi	Setelah Koordinasi
Penumpang harus mengisi 4 aplikasi/ formulir terpisah dengan data yang berulang (*redundant*), memakan waktu 10–15 menit, dan pola kerja K/L yang "silo" (sendiri-sendiri);	Tercipta satu aplikasi tunggal (All Indonesia) dengan *single input*, di mana data dibagi (*data sharing*) antarinstansi secara *real-time*. Durasi pengisian berhasil dipangkas drastis menjadi sekitar 2 menit 33 detik.



Gambar 54 Lini Masa All Indonesia

Efektivitas Kepemimpinan dalam Eksekusi Regulasi dan SOP: Keberhasilan ini didorong oleh serangkaian rapat koordinasi tingkat Menteri hingga Eselon I yang dipimpin Kemenko Infra untuk memetakan isu dan menyepakati solusi.

- **Legalitas Kuat:** Kemenko Infra mengawal penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama lintas CIQ (*Customs, Immigration, Quarantine*) sebagai landasan operasional, menggantikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sebelumnya terkotak-kotak;
- **Payung Hukum Jangka Panjang:** Kemenko Infra juga menginisiasi penyusunan Perpres tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan, yang diposisikan sebagai mekanisme orkestrasi kebijakan lintas sektor agar kolaborasi ini berkelanjutan.



Gambar 55 Launching All Indonesia

Mobilisasi *Stakeholder* Pendukung (Maskapai dan Operator Bandara): Koordinasi tidak hanya terbatas pada regulator (pemerintah), tetapi juga berhasil merangkul operator.

Sosialisasi Masif

Kemenko Infra memfasilitasi pertemuan dengan maskapai domestik dan asing agar mereka aktif mensosialisasikan pengisian All Indonesia sejak dari negara asal (*pre-flight, boarding, hingga in-flight*).

Hasil Nyata

Strategi ini berhasil mendorong 50,53% penumpang (sekitar 3,4 juta orang) untuk mengisi formulir di negara asal (*origin*) atau H-2 jam sebelum mendarat, yang secara signifikan mengurangi antrean di bandara kedatangan.



Gambar 56 Menko AHY Simulasi All Indonesia

Pengawalan Implementasi di Lapangan: Kemenko Infra memastikan kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas dengan membentuk struktur pengawasan yang solid.

- Koordinator Lapangan Gabungan: Dibentuk tim koordinator lapangan yang bertugas secara bergantian (mingguan) dari unsur Imigrasi, Bea Cukai, Karantina, dan Angkasa Pura untuk memantau aliran penumpang dan memutuskan pembukaan/penutupan *stopper* jika terjadi kepadatan.
- Monitoring *Real-time*: Pengembangan *dashboard monitoring* yang dapat diakses lintas instansi untuk evaluasi berbasis data secara rutin.

Terdapat beberapa tantangan teknis dan koordinatif yang sedang ditangani:

- Kendala Interoperabilitas Data: Integrasi penuh antara sistem Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum terlaksana karena Imigrasi sedang membangun ulang basis data (*rebuilding database*) pasca gangguan PDN, sehingga akses data masih dilakukan secara manual.
- Transisi eCD ke All Indonesia: Penonaktifan *Electronic Customs Declaration* (eCD) lama belum bisa dilakukan total karena aplikasi "All Indonesia" belum mengakomodasi pelintas batas darat (PLBN) dan fitur pelaporan barang ekspor.
- Isu Protokol Kesehatan: Masih terdapat pending kesepakatan (*bottleneck*) dalam SOP bersama terkait mekanisme notifikasi otomatis dari Imigrasi ke Kemenkes untuk penumpang berstatus "merah".

Percepatan program ini didorong oleh momentum kuat dari berbagai aspek:

- Rekomendasi Audit BPKP: Adanya landasan kuat dari hasil audit tata kelola yang merekomendasikan integrasi layanan dan transformasi digital.
- Potensi Kapasitas Bandara: Bandara strategis seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai masih memiliki ruang besar untuk optimalisasi kapasitas penumpang (masing-masing menuju 85 juta dan 32 juta pax/tahun).
- Komitmen Lintas Sektor: Dukungan penuh dari para pimpinan K/L yang terlihat pada kehadiran berbagai Menteri dan Wakil Menteri saat peluncuran program, memperkuat sinergi eksekusi di lapangan.

Sepanjang Tahun 2025, langkah-langkah taktis yang telah dieksekusi meliputi:

- Uji Coba & *Update* Sistem: Melakukan pembaruan sistem TIK Imigrasi secara masif di titik-titik pintu masuk negara per 25 September 2025 sebagai persiapan peluncuran.
- Rapat Koordinasi Tata Kelola: Menyelenggarakan rakor pendalaman konsep regulasi pada September 2025 untuk mempertajam substansi layanan menuju standar kelas dunia.
- Finalisasi Integrasi Pajak-Imigrasi: Melaksanakan pertemuan teknis dengan DJP Kemenkeu pada 3 Oktober 2025 untuk membahas mekanisme pertukaran data perlintasan dan foto wajah dari *autogate.*
- Penyelesaian SOP: Mengumpulkan dan mengolah *feedback* dari seluruh K/L untuk penyempurnaan SOP bersama, dengan target penyelesaian isu kesehatan dalam satu minggu.



4. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi **Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan**

Produktivitas air di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang stabil terhadap PDB, namun secara komparatif masih tertinggal dibandingkan negara produsen pangan lain seperti India dan Vietnam. Data menunjukkan bahwa Indeks Pertanaman (IP) nasional rata-rata baru mencapai 1,36 dari luas baku sawah nasional sebesar 7,46 juta hektare. Untuk mewujudkan swasembada pangan, Indonesia menargetkan peningkatan nilai IP minimal menjadi 2,0 yang berpotensi meningkatkan luas panen menjadi 14,9 juta hektare. Tantangan utama terletak pada kerusakan jaringan irigasi kewenangan daerah yang signifikan serta rendahnya komitmen operasi dan pemeliharaan (OP).

Sebagai respons strategis, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang merupakan kebijakan strategis yang diterbitkan pada 30 Januari 2025 untuk mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kebijakan ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
- Mempercepat pencapaian swasembada pangan.
- Mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dalam pelaksanaan Inpres ini Kemenko Infra memegang peran sentral dalam fungsi koordinasi dan pengendalian bersama kementerian terkait (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pertanian) dan pemerintah daerah, serta menjadi simpul pelaporan berkala untuk memantau kemajuan implementasi sebelum dilaporkan kepada Presiden. Cakupan kegiatannya meliputi jaringan irigasi tersier kewenangan pusat dan jaringan irigasi kewenangan daerah, tidak hanya untuk komoditas padi tetapi juga komoditas unggulan lainnya.

Hingga akhir tahun 2025, intervensi kebijakan melalui Inpres ini telah mencakup 561 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran Rp10,15 triliun, menjangkau layanan irigasi seluas 589.615,97 hektare di seluruh Indonesia.

Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2025 disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 30 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2025

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
-	100%	100%	100%	-	-

Secara nomenklatur, target spesifik terkait isu strategis Koordinasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tidak dijabarkan secara mandiri di dalam Renstra Kemenko Infra maupun RPJMN Tahun 2025. Hal ini dikarenakan merupakan sub-komponen yang terintegrasi di dalam indikator utama, yaitu “Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan”. Lebih lanjut, sebagai wujud eskalasi komitmen kinerja, target indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja ditetapkan secara optimal sebesar 100%, lebih progresif dibandingkan dengan proyeksi awal yang tercantum di dalam Renstra sebesar 92%.

Adapun untuk komparasi kinerja dengan tahun sebelumnya, kementerian belum memiliki data dasar (*baseline*) mengingat mandat isu strategis tersebut baru dieksekusi pada Tahun Anggaran 2025. Di samping itu, belum terdapat instansi pembanding, baik di tingkat nasional (K/L/D) maupun internasional, yang memiliki kesetaraan karakteristik, ruang lingkup program, maupun variabel pengukuran. Oleh karenanya, penyandingan capaian kinerja secara identik dan langsung (*apple-to-apple*) belum dapat disajikan dalam Laporan Kinerja periode ini.

Target koordinasi dan sinkronisasi telah tercapai 100%, keberhasilan ini ditandai dengan terlaksananya fungsi pengendalian secara menyeluruh pada setiap tahapan implementasi Inpres Irigasi yang terbagi dalam tiga tahap pelaksanaan dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tuntas — Tahap 1
- 41 Paket di 13 Provinsi
- 99,73% Progres Fisik (selesai tepat waktu)
- 95,68% Realisasi Keuangan
- Manfaat rehabilitasi telah dirasakan untuk menunjang kegiatan tanam sejak September 2025.

Signifikan — Tahap 2
- 345 Paket di 35 Provinsi
- 89,48% Progres Fisik
- 96,18% Realisasi Keuangan
- Tahap ini meliputi kegiatan irigasi, OP, serta Air Tanah dan Air Baku (ATAB).

Berjalan — Tahap 3
- 175 Paket
- 73,04% Progres Fisik
- 88,29% Realisasi Keuangan



Gambar 57 **Progres Inpres Irigasi**

Implementasi program ini telah memberikan dampak langsung berupa peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan efisiensi biaya:

- Peningkatan IP: Di D.I. Kampili (Sulsel), IP mencapai 253, memungkinkan tanam padi pada Musim Tanam III (MT III) untuk pertama kalinya. Di D.I. Batang Anai (Sumbar), IP meningkat dari 200% menjadi 230%.
- Efisiensi & Debit Air: Proyek JIAT SP Kelor (Gunungkidul) meningkatkan debit air hingga 40 liter/detik. Di JIAT Rejomulyo (Lampung), biaya operasional pompa turun hingga 75%.

Faktor Pendorong

1. Sinergi Kelembagaan: Kolaborasi efektif antara Kementerian PPN/Bappenas (perencanaan), Kementerian PU (konstruksi), dan Kementerian Pertanian (pemanfaat) di bawah koordinasi Kemenko Infra dan Kemenko Pangan.
2. Transformasi Infrastruktur: Perubahan saluran tanah menjadi konstruksi permanen pada jaringan tersier terbukti meningkatkan efisiensi aliran air dan daya tahan aset.
3. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan aplikasi SIPURI memfasilitasi proses verifikasi dan penilaian usulan kegiatan dari Pemerintah Daerah secara transparan.

Faktor Penghambat

1. Kerusakan Aset Daerah: Jaringan irigasi kewenangan daerah mengalami tingkat kerusakan paling signifikan, memerlukan intervensi yang masif.
2. Isu Komitmen OP: Masih rendahnya komitmen terhadap Operasi dan Pemeliharaan (OP) di tingkat lokal berpotensi mengancam keberlangsungan fungsi aset jangka panjang.
3. Tantangan Geografis: Kesulitan penyediaan sumber air di wilayah geografis menantang (seperti Gunungkidul) memerlukan solusi teknis khusus berupa Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT).

Kemenko Infra telah melakukan langkah konkret dalam mengawal implementasi Inpres melalui monitoring langsung (*on-site*) untuk memastikan akurasi pelaporan dan penyelesaian kendala:

1. Kunjungan Kerja Menteri Koordinator: Meninjau langsung proyek JIAT SP Kelor di Gunungkidul. Kunjungan ini memastikan inisiatif pemerintah dalam penyediaan air bersih dan irigasi di wilayah sulit air berjalan efektif, yang terbukti mampu meningkatkan panen menjadi tiga kali per tahun.
2. Supervisi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
   - Melakukan peninjauan ke Desa Rejomulyo, Lampung Selatan, untuk memvalidasi efisiensi biaya operasional pompa dan perluasan layanan irigasi.
   - Meninjau Daerah Irigasi Kampili, Sulawesi Selatan, untuk memastikan keberhasilan peningkatan IP dan pelaksanaan rehabilitasi saluran tersier yang mencapai realisasi ± 84%.
3. Fungsi Koordinasi: Kemenko Infra aktif menjadi koordinator dalam penyelesaian kendala lintas sektor dan memastikan seluruh tahapan dari perencanaan hingga serah terima aset berjalan sesuai koridor kebijakan.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi Triwulan IV Tahun 2025, direkomendasikan langkah-langkah strategis untuk keberlanjutan program pada Tahun Anggaran 2026:

1. Penyelesaian Tuntas (*Carry Over*): Memastikan penyelesaian sisa pekerjaan Tahap II dan III tahun 2025 secara tuntas pada awal tahun 2026 agar manfaatnya segera dirasakan maksimal oleh masyarakat.
2. Perencanaan Tahun 2026 yang Matang: Pemerintah Daerah harus segera mematangkan usulan kegiatan baru melalui aplikasi SIPURI. Hal ini krusial agar Kementerian PU dapat melakukan perencanaan tepat waktu dan melaksanakan pekerjaan dengan skala yang lebih besar.
3. Penguatan Komitmen Daerah: Perlu adanya peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam aspek Operasi dan Pemeliharaan (OP) pasca-konstruksi untuk menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi yang telah direhabilitasi.
4. Optimalisasi Sinergi: Melanjutkan pola koordinasi yang telah terbentuk antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan jaringan irigasi yang fungsional dan berkelanjutan.

5. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang Terintegrasi melalui *Transit-Oriented Development* (TOD)/*Transit-Oriented Affordable Housing* (TOAH)

Pembangunan hunian (baik rumah tapak maupun rumah susun/vertikal) yang dilakukan di lokasi strategis yang dekat dan terhubung dengan jaringan angkutan umum massal, serta dirancang untuk mendukung aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas hidup masyarakat. TOD adalah pendekatan tata ruang yang dikembangkan untuk mengurangi *urban sprawl* dan kemacetan, serta mendukung pembangunan kota yang efisien dan ramah lingkungan. Sedangkan TOAH adalah bagian dari TOD yang berfokus pada penyediaan hunian terjangkau secara ekonomi, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan konektivitas transportasi.

Program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian yang strategis, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program ini mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sistem transportasi massal guna meningkatkan aksesibilitas, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendorong efisiensi mobilitas perkotaan.

Adapun target pada tahun 2025 adalah terbangunnya 1 (satu) TOD/TOAH di Pulau Jawa yang terintegrasi dengan permukiman yang terjangkau MBR. Untuk tahun 2025, target TOD yang terbangun adalah TOD yang berlokasi di Stasiun Jatake, Tangerang.

Capaian Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui *Transit Oriented Development* (TOD)/*Transit-Oriented Affordable Housing* (TOAH) Tahun 2025 disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 31 Capaian Kinerja Penyediaan Hunian Tapak dan Vertikal yang Terintegrasi melalui TOD/TOAH

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
-	100%	100%	100%	-	-

Secara nomenklatur, target spesifik terkait isu strategis Penyediaan Hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui TOD/TOAH tidak dijabarkan secara mandiri di dalam Renstra Kemenko Infra maupun RPJMN Tahun 2025. Hal ini dikarenakan merupakan sub-komponen yang terintegrasi di dalam indikator utama, yaitu “Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan”. Lebih lanjut, sebagai wujud eskalasi komitmen kinerja, target indikator tersebut pada Perjanjian Kinerja ditetapkan secara optimal sebesar 100%, lebih progresif dibandingkan dengan proyeksi awal yang tercantum di dalam Renstra sebesar 92%.

Adapun untuk komparasi kinerja dengan tahun sebelumnya, kementerian belum memiliki data dasar (*baseline*) mengingat mandat isu strategis tersebut baru dieksekusi pada Tahun Anggaran 2025. Di samping itu, belum terdapat instansi pembanding, baik di tingkat nasional (K/L/D) maupun internasional, yang memiliki kesetaraan karakteristik, ruang lingkup program, maupun variabel pengukuran. Oleh karenanya, penyandingan capaian kinerja secara identik dan langsung (*apple-to-apple*) belum dapat disajikan dalam Laporan Kinerja periode ini.

Sampai dengan Desember 2025, konstruksi bangunan secara fisik stasiun sudah selesai. Namun, terdapat beberapa *checklist* tambahan dan penyelesaian akhir, khususnya pada jembatan DH-155 dan koneksi ke drainase utama yang ditargetkan selesai pada Januari 2026. Penyelesaian tangga dan evakuasi peron hulu-hilir dan galian pondasi masih berjalan.

Tabel 32 Capaian Stasiun Jatake

LOKASI	LUAS LAHAN	KONDISI EKSISTING
Stasiun Jatake, Sinar Mas Land *Kelurahan Jatake - Kelurahan Kadusirung, Tangerang*	2.435 m^2	Kontruksi TOD selesai 100%

Meskipun target dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan sebanyak 1 (satu) kawasan TOD/TOAH, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman melakukan upaya akselerasi untuk mendukung capaian target strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Fokus utama saat ini diarahkan pada pengembangan hunian terintegrasi di kawasan Jabodetabek melalui tiga lokasi utama dengan progres sebagai berikut:

- Stasiun Jatake: Konstruksi fisik bangunan telah rampung 100% per Desember 2025. Saat ini, koordinasi difokuskan pada pemenuhan administrasi izin operasional, Sertifikasi Laik Operasi (SLO), serta integrasi moda transportasi pendukung.
- Stasiun Tenjo Baru: Proses amandemen perjanjian konsesi terus berjalan, di mana Draf Addendum I telah difinalisasi. Sementara itu, proses Addendum II untuk perubahan status menjadi stasiun pemberhentian sedang menunggu penyelesaian regulasi pendelegasian kewenangan dari Menteri Perhubungan kepada DJKA.
- Stasiun Lumpang Parayasa: Telah dicapai kesepakatan pelepasan lahan Perumnas kepada PT KAI secara parsial dengan target penyelesaian administrasi selama 3 bulan. Selain itu, skema pembiayaan flyover serta kemitraan konsesi antara PT KAI, Perumnas, dan DJKA telah disepakati untuk segera ditindaklanjuti.
- Penguatan Regulasi (RPerpres TOD): Sebagai landasan hukum nasional, Naskah Urgensi telah diselesaikan dan Surat Permohonan Izin Prakarsa dari Menko Infra telah disampaikan kepada Presiden pada tanggal 2 Desember 2025.



Gambar 58 Kunjungan lapangan ke-3 (tiga) Lokasi Pembangunan Stasiun Baru "Jatake", "Lumpang", dan "Tenjo Baru"

Faktor Pendukung

1. Komitmen Stakeholder: Dukungan penuh dari kementerian teknis, BUMN (KAI, Perumnas), Pemerintah Daerah, dan sektor swasta dalam penyediaan lahan serta percepatan izin.

2. Koordinasi Intensif: Pelaksanaan rangkaian FGD yang melibatkan pemangku kepentingan pusat dan daerah untuk menyinkronkan kebijakan.

Faktor Penghambat

1. Kompleksitas Perizinan & Regulasi: Belum adanya payung hukum nasional (Perpres) menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakkonsistenan standar implementasi di lapangan.

2. Kendala Lahan & Pembiayaan: Ketidakpastian status lahan dan belum adanya mekanisme pembiayaan terpadu untuk infrastruktur pendukung seperti *flyover* dan akses jalan.



Gambar 59 Kunjungan Kerja Percepatan Pengembangan TOD

Upaya yang Dilakukan

01

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Pengembangan Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) serta harmonisasi regulasi perumahan, yang telah ditindaklanjuti melalui penyampaian permohonan persetujuan izin prakarsa RPerpres TOD kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 2 Desember 2025.

02

Pelaksanaan rapat koordinasi dan pemutakhiran progres pembangunan Stasiun Jatake, termasuk pembahasan rencana pengoperasian stasiun sebagai bagian dari pengembangan kawasan berbasis TOD.

03

Koordinasi pemutakhiran progres pengembangan Kawasan TOD di Stasiun Tenjo Baru dan Stasiun Lumpang Parayasa, dalam rangka memastikan kesiapan lahan, integrasi fungsi hunian dan transportasi, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

04	05	06
Koordinasi perencanaan pembangunan hunian berbasis TOD di Stasiun Manggarai Blok G, mencakup pembahasan rencana hunian, sarana dan prasarana pendukung, serta integrasi dengan sistem transportasi massal.	Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) serta pembahasan revisi Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2021 tentang KITB, guna memperkuat dukungan kebijakan terhadap pengembangan kawasan strategis nasional.	Pembahasan sinkronisasi kebijakan penyediaan lahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah, termasuk percepatan penyediaan lahan, penyesuaian regulasi, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.



Gambar 60 FGD Penyamaan Persepsi dan Integrasi Sektoral Transit Oriented Development

IKSS 2.2

Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian **di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Nilai Kepuasan Layanan merupakan instrumen strategis untuk mengukur keberhasilan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pelaksanaan survei secara periodik tidak hanya memberikan gambaran mengenai kualitas layanan, tetapi juga mencerminkan efektivitas koordinasi lintas unit kerja, kejelasan prosedur, serta daya tanggap atas pengaduan dan masukan. Indeks ini diperoleh melalui survei kepada *stakeholder* penerima layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian organisasi.

Hasil Survei Kepuasan Layanan menjadi masukan utama dalam perumusan rencana tindak lanjut, pemetaan unsur layanan yang perlu prioritas pembenahan, dan pembentukan sistem yang lebih adaptif dan responsif. Transparansi hasil dan keterlibatan masyarakat juga turut memastikan proses koordinasi-sinkronisasi-pengendalian berjalan dalam koridor partisipatif dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan kinerja layanan secara berkelanjutan. Survei ini dilakukan dengan model skala likert 1 sampai dengan 4. Penilaian dilakukan dengan mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kemenko Infra diperoleh dari nilai rata rata hasil survei yang telah diisi koresponden dengan empat kategori kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 33 Nilai Persepsi Tingkat Kepuasan Pelayanan Kemenko Infra

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERNAL KONVERSI	MUTUB PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Survei dilaksanakan pada Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2025 pada empat unit kerja eselon I di lingkup Kemenko Infra yaitu:

1. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
2. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan
4. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Data capaian kinerja Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025 disampaikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 34 Capaian Kinerja Layanan Kepuasan KSP Kemenko Infra

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
-	3.1	3,58	115,32%	3,1	-

Dalam Renstra Kemenko Infra Tahun 2025, Kemenko Infra telah menetapkan target Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah selaras, yakni sebesar 3,1. Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di lingkungan Kemenko Infra dipersepsikan "Sangat Baik" oleh para pemangku kepentingan, dengan nilai rata-rata IPKP gabungan sebesar 3,58 (skala 4) atau 89,46 (skala 100).

Adapun untuk komparasi kinerja dengan tahun sebelumnya, kementerian belum memiliki data dasar (*baseline*) mengingat indikator tersebut baru ditargetkan pada Tahun Anggaran 2025. Di samping itu, belum terdapat instansi pembanding, baik di tingkat nasional (K/L/D) maupun internasional, penyandingan capaian kinerja secara identik dan langsung (*apple-to-apple*) belum dapat disajikan dalam Laporan Kinerja periode ini.

Berikut adalah rincian hasil survei per Unit Kerja:

Tabel 35 Rincian hasil survey TW IV per Unit Kerja

UNIT KERJA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPKP (SKALA 4)	NILAI KONVERSI (SKALA 100)	KATEGORI KINERJA
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	60	3,47	86,71	Baik

UNIT KERJA	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPKP (SKALA 4)	NILAI KONVERSI (SKALA 100)	KATEGORI KINERJA
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	16	3,52	88	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	28	3,66	91,63	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.	6	3,66	91,5	Sangat Baik
Rata-rata	**110**	**3,58**	**89,46**	**Sangat Baik**

Total responden yang berpartisipasi dalam survei TW IV Tahun 2025 di empat deputi adalah 110 orang. Responden berasal dari beragam instansi pemerintah dan swasta, yang mencerminkan cakupan koordinasi kementerian yang luas. Beberapa instansi responden antara lain:

- Kementerian/Lembaga: Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenhub, KemenPU, Kementerian ATR/BPN, Kemendes PDTT, PKP, Kemenkes, Kemenperin, Kemenkeu, Kemenkunham, ESDM, Kemenpora, BMKG, BNPB;
- Pemerintah Daerah: Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Bappelitbangda;
- BUMN/Swasta: PT. Adi Karya, PT Hutama Karya, PLN, PT. KBS, PT. BYD, KIA, Siemens Energy, Longi Solar, PT. Indo Green Power, Kencana Tiara Gemilang, RTF, Maganghub; dan
- Asosiasi & Lainnya: Rei, UGM, ITB, ITS, IPB, Undip, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Semarang, UIN Syarif Hidayatullah, UNY, UNS, Universitas Sulawesi Barat, Universitas Siliwangi, ITERA, Universitas Singaperbangsa, Universitas Winaya Mukti, Universitas Terbuka, Polman Bandung.

Secara keseluruhan, capaian kinerja layanan di Kemenko Infra berhasil melampaui target yang ditetapkan pada setiap triwulannya. Berikut adalah rincian capaian penilaian hasil survei kepuasan layanan koordinasi secara triwulanan.

Tabel 36 Rekap Nilai Kepuasan Layanan KSP Kemenko Infra Triwulanan

PERIODE	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPKP	NILAI KONVERSI	KATEGORI KINERJA
Triwulan I	60	3,61	90,57	Sangat Baik
Triwulan II	191	3,60	89,65	Sangat Baik
Triwulan III	201	3,65	91,35	Sangat Baik
Triwulan IV	110	3,60	89,46	Sangat Baik

Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,1. Seluruh realisasi dari Triwulan I hingga Triwulan IV secara konsisten berada di atas angka 3,50, yang berarti persentase capaian selalu berada di atas 115% dari target yang ditetapkan.

Seluruh nilai rata-rata IPKP gabungan berada di rentang 89,21 hingga 91,35 (skala 100). Angka ini masuk ke dalam kategori mutu pelayanan "A" atau "Sangat Baik" berdasarkan interval penilaian (88,31 - 100). Kinerja tertinggi dicapai pada Triwulan III dengan nilai 3,65 (Konversi 91,35) yang juga diiringi dengan tingkat partisipasi responden tertinggi yaitu 201 orang.

Secara umum, aspek yang secara konsisten mendapatkan nilai tinggi adalah integritas pegawai (tidak ada permintaan imbalan atau pungli), tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan, dan respon petugas yang cepat dan profesional. Selain itu, kemudahan dalam memperoleh layanan sesuai prosedur juga dinilai sangat baik, bahkan menunjukkan tren peningkatan.

Meskipun masih dalam kategori "Baik" atau "Sangat Baik", beberapa aspek yang menjadi catatan untuk perbaikan adalah kemudahan akses dan kelengkapan informasi layanan, kecepatan waktu penyelesaian layanan, dan peningkatan kompetensi petugas.

Berdasarkan analisis hasil survei, Kemenko Infra akan fokus pada beberapa langkah perbaikan berkelanjutan:

1. Melanjutkan program peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan, *mentoring*, atau *coaching* internal yang berfokus pada pelayanan prima dan komunikasi publik.
2. Pada periode survei berikutnya, akan diupayakan untuk menjangkau lebih banyak responden dari berbagai latar belakang pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif.
3. Terus menjaga dan mempertahankan kualitas layanan yang sudah dinilai sangat baik oleh resnden, seperti sikap dan perilaku petugas yang profesional.



SS.3
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur **dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan**

SS.3 dimaksudkan untuk menjelaskan tercapainya target pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan. SS.3 memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tabel 37 Capaian Kinerja SS.3

INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/NASIONAL 2025
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	77,38	91,1	77,38*	84,93	91,1	-
Total				**84,93%**		

*Keterangan: *) Capaian Kemenko Marves Tahun 2024*

IKSS 3.1
Indeks Reformasi Birokrasi **Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu prioritas nasional yang tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Komitmen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya menjadi agenda internal pemerintah, tetapi juga bagian integral dari visi reformasi birokrasi untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan Kemenko Infra dalam melaksanakan kebijakan RB. Instansi penanggung jawab pengukuran adalah Kementerian PANRB, yaitu Deputi RBKUNWAS selaku koordinator dan kementerian/lembaga yang menjadi *leading institution* kebijakan RB pada tingkat meso. Pelaksanaan RB terbagi menjadi:

1. RB General, yang berfokus kepada perbaikan tata kelola instansi pemerintah; dan
2. RB Tematik, yang berfokus kepada perwujudan dampak RB yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Infra Tahun 2025 menggunakan hasil evaluasi RB Kemenko Marves Tahun 2024 sebagai *baseline* kebijakan, indikator, dan rekomendasi perbaikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan tata kelola pemerintahan, khususnya pada masa transisi kelembagaan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan RB tetap mengacu pada standar nasional yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Capaian Indeks RB Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 38 Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi

BASELINE (2024)	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RENSTRA	TARGET RPJMN/ NASIONAL 2025
77,38	**91,1**	**77,38***	**84,93%**	**91,1**	**91,1**

*Keterangan: *) Capaian Kemenko Marves Tahun 2024*

Hingga laporan ini disusun, Capaian Indeks RB Kemenko Infra Tahun 2025 masih dalam masa sanggah, sehingga nilai resmi Indeks RB Kemenko Infra belum dapat ditampilkan. Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Nomor B/234/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025, Indeks RB Kemenko Merves Tahun 2024 adalah **77,38** dengan kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Hasil Evaluasi RB Kemenko Marves 2024

PENILAIAN	BOBOT	2024
RB General	100	74,40
RB Tematik	10	2,98
Indeks RB	110	77,38
		BB

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) bersifat internal yang disampaikan oleh Kementerian PANRB melalui portal masing-masing instansi dan tidak dipublikasikan secara terbuka pada laman tertentu sebagai data komparatif antar K/L. Dengan demikian, nilai yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk dibandingkan secara langsung dengan instansi lain, melainkan digunakan sebagai instrumen evaluasi internal dan dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi. Matriks hasil evaluasi komponen RB Kemenko Infra Tahun 2025 sebagaimana disampaikan melalui portal RB Kemenko Infra sebagai berikut:

Tabel 40 Matriks Hasil Evaluasi Komponen RB Kemenko Infra Tahun 2025

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR INDEX
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1,63
2		Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	3,8
3		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	2
4		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	1,6
5		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	0 (*dikecualikan dari penilaian*)
6		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	3,8
7		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	2,92
8		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	1,42
9		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2	0,4
10		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	1,85
11		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	0 (*dikecualikan dari penilaian*)

NO.	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR INDEX
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pengelolaan Aset	2	1,9
13		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	1,5	0,3
14		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	0,93
15		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Hukum	1,5	1,5
16		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	0 (*dikecualikan dari penilaian*)
17		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	1,4
18		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	0 (*dikecualikan dari penilaian*)
19		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	1,5	0,91
20		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	0 (*dikecualikan dari penilaian*)
21		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	7,13
22		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Capaian Prioritas Nasional	3	0 (*dikecualikan dari penilaian*)
23		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Kementerian/Lembaga	7	7
24		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Opini BPK	5	5
25		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	4
26		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	0 (*dikecualikan dari penilaian*)
27		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	7,98
28		Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	0 (*dikecualikan dari penilaian*)
29	RB Tematik	Capaian RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Kementerian/Lembaga)	2	1,6
30		Capaian RB Tematik	Realisasi Investasi (Kementerian Lembaga)	2	1,88
31		Capaian RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Kementerian/Lembaga)	2	0,41 (*capaian 2024*)
32		Capaian RB Tematik	Laju Inflasi (Kementerian/ Lembaga)	2	- (*capaian 2024*)
33		Capaian RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Kementerian/Lembaga)	2	1,31 (*capaian 2024*)
34		Strategi Pembangunan	Percepatan Hilirisasi	0,01	- (tidak dinilai)
35		Strategi Pembangunan	Ketahanan Pangan	0,01	- (tidak dinilai)
36		Strategi Pembangunan	Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	0,01	- (tidak dinilai)
37		Strategi Pembangunan	Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan	0,01	- (tidak dinilai)

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan RB Kemenko Infra Tahun 2025 masih berada pada tahap transisi dan belum sepenuhnya mencapai kematangan sistemik. Ringkasan catatan dan rekomendasi per subkomponen sebagai berikut:

1 Sub-komponen Strategi Pelaksanaan RB General

Perencanaan Reformasi Birokrasi (RB) telah disusun dalam dokumen rencana aksi, namun kualitasnya masih menunjukkan orientasi administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada peningkatan kinerja. Beberapa catatan yang disampaikan:

- Hubungan sebab–akibat antara kondisi awal, rencana aksi, dan peningkatan indikator belum tergambar kuat sehingga kontribusi rencana aksi terhadap peningkatan skor indikator belum optimal.
- Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga belum sepenuhnya menunjukkan pengendalian berbasis risiko dan perbaikan berkelanjutan.

Oleh karena itu, ke depannya Kemenko Infra perlu memfokuskan perbaikan pada penguatan kualitas desain rencana aksi RB yang terintegrasi dengan sistem manajemen kinerja.

2 Sub-komponen Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi

Implementasi kebijakan Reformasi Birokrasi (RB) telah dilaksanakan, namun masih bersifat kegiatan serta belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi dan integrasi antar kebijakan. Beberapa catatan yang disampaikan:

- Transformasi sistem kerja belum sepenuhnya diikuti dengan penyempurnaan proses bisnis yang terdokumentasi secara komprehensif.
- Beberapa kebijakan masih berada pada tahap pemenuhan kewajiban regulatif dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi.

Hasil evaluasi subkomponen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mencapai tingkat kematangan yang diharapkan dalam kerangka evaluasi Kementerian PANRB.

3 Sub-komponen Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Subkomponen ini menilai kontribusi Reformasi Birokrasi (RB) terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi, termasuk keterkaitan dengan nilai SAKIP, akuntabilitas kinerja, dan efektivitas tata kelola. Beberapa catatan yang disampaikan:

- RB masih diposisikan sebagai program tersendiri, belum sepenuhnya terintegrasi dalam siklus manajemen kinerja (perencanaan–pelaksanaan–evaluasi pelaporan).
- RB belum seluruhnya dirumuskan secara tajam dan terukur untuk mencerminkan dampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas koordinasi, maupun penguatan peran strategis Kemenko Infra.

Ke depan, Kemenko Infra perlu menunjukkan bahwa kontribusi RB terhadap *outcome* organisasi diperkuat secara substantif, bukan hanya administratif.

4 Sub-komponen Capaian RB Tematik

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, Penilaian Rencana Aksi RB Tematik dilakukan atas:

- Rencana tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi untuk tema RB Pengentasan Kemiskinan dan RB Peningkatan Investasi.
- Capaian RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, RB Pengendalian Inflasi, dan RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri menggunakan nilai tahun sebelumnya.

Sementara 4 (empat) tema RB Tematik baru (Mendorong Hilirisasi, Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, Mendukung Ketahanan Pangan, dan Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan) disusun sebagai bentuk internalisasi dan komitmen Kemenko Infra terhadap prioritas pembangunan Tahun 2025–2029. Catatan evaluasi sebagai berikut:

- Kedalaman analisis permasalahan tematik dan penajaman indikator masih terbatas.
- Sasaran RB Tematik belum spesifik, terukur, dan relevan dengan tugas dan fungsi Kemenko Infra, serta rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya menunjukkan kontribusi nyata terhadap penyelesaian isu prioritas.

Hasil evaluasi pada subkomponen ini menunjukkan perlunya penajaman desain RB Tematik agar lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung terhadap sasaran strategis nasional.

Hasil evaluasi terhadap RB Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan RB di Kemenko Infra masih berada pada tahap transisi menuju kematangan tata kelola yang berbasis hasil. Sehingga pada periode selanjutnya perlu diarahkan pada transformasi RB dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis kinerja.

Untuk mendukung capaian indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Infra, upaya yang telah dilakukan selama periode Tahun 2025 yakni melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi baik yang ada di RB General maupun RB Tematik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41 Rencana Aksi RB Kemenko Infra 2025

NO.	INDIKATOR	PELAKSANAAN RENCANA AKSI
		RB GENERAL
1	Penyederhanaan Struktur Organisasi	· Pelaksanaan Audiensi Kebutuhan Jabatan pada Unit Kerja · Permohonan persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional kepada Kementerian PANRB · Penyusunan Rancangan Kepmenko Peta Jabatan yang baru sesuai hasil audiensi dan persetujuan Kementerian PANRB · Penyusunan organisasi berdasarkan kebijakan penyederhanaan struktur
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	· Penyusunan RPermenko tentang Sistem Kerja · Pembentukan Tim Kerja di seluruh Unit Kerja Eselon II · Penyusunan Proses Bisnis · Penyusunan Standar Operasional Prosedur dengan sistem kerja penyederhanaan birokrasi
3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	· Pelaksanaan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Kemenko Infra · Pendampingan implementasi manajemen risiko setiap Unit Pemilik Risiko Eselon II · Penyusunan laporan implementasi Manajemen Risiko setiap Unit Pemilik Risiko Eselon II · Pelaksanaan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP Terintegrasi Kemenko Infra
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	· Menyusun Nota Dinas Pemberitahuan Pembangunan ZI Menuju WBK kepada Unit Kerja Eselon I · Menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK · Menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat · Menyampaikan SPT Tahunan dan LHKPN Tahun 2024 · Melaksanakan Evaluasi AKIP setiap Unit Kerja Eselon I Tahun 2024 · Melaksanakan "Survei Persepsi Anti Korupsi" dan "Survei Persepsi Kualitas Pelayanan" secara Mandiri sesuai dengan SE MenPAN RB Nomor 4 Tahun 2023 · Menyusun renaksi aksi/kerja pembangunan ZI atas isu/permasalahan setiap area perubahan · Monitoring dan evaluasi untuk membandingkan antara target dengan realisasi aksi · Melakukan Identifikasi Potensi Risiko pada aspek Pencapaian Kinerja, Pelayanan, dan Integritas serta menetapkan Rencana Tindak Pengendaliannya · Melaksanakan penanganan pengaduan yang meliputi jumlah pengaduan yang masuk, aduan yang telah ditindaklanjuti, serta aduan yang telah diselesaikan · Mendorong upaya penciptaan inovasi yang masif untuk menjawab permasalahan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat/*stakeholder* · Melakukan Evaluasi atas Penilaian Mandiri ZI Tahun 2025 · Melaksanakan pengusulan Unit Kerja yang memenuhi persyaratan pembangunan ZI menuju WBK
5	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	· Menyiapkan Matriks Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2024 yang memuat langkah perbaikan nilai AKIP · Menetapkan indikator kinerja yang relevan, spesifik, dan dapat mengukur ketercapaian sasaran yang dikawal · Menyusun pohon kinerja dengan jenjang kinerja yang memiliki hubungan sebab-akibat yang tepat untuk mendorong tercapaianya *ultimate outcome* serta pola hubungan kinerja yang berkaitan (*crosscutting*) secara spesifik · Menyelaraskan PK Tahunan dengan Renstra · Menyusun Manual IKU yang memuat rumus perhitungan indikator kinerja yang dikawal secara detail dan spesifik

NO.	INDIKATOR	PELAKSANAAN RENCANA AKSI
		· Berdiskusi dengan unit kerja dan/atau instansi di luar Kemenko Marves dalam mengembangkan pola hubungan kinerja yang berkaitan (*crosscutting*) · Menyusun Rencana Aksi yang relevan, spesifik, dan cukup untuk mendorong tercapainya target sasaran kegiatan secara optimal · Validasi Capaian Kinerja Tahun 2025 level Eselon I · Penyusunan Laporan Kinerja yang menyajikan penjelasan faktor pendorong dan penghambat tercapainya target indikator · Melakukan migrasi server aplikasi pengelola kinerja (SIK-M) menjadi aplikasi pengelola kinerja (SIK-INFRA) beserta perubahan nomenklatur · Menyempurnakan aplikasi SIK-INFRA untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi progress capaian kinerja · Bimbingan Teknis Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SIK-INFRA) · Benchmark dengan evaluator K/L/P dan Kementerian PANRB dalam melakukan evaluasi AKIP sesuai standar yang dibuat oleh Kementerian PANRB · Evaluasi AKIP Internal oleh Tim Evaluator Inspektorat · Penyusunan Dokumen Tindak lanjut AKIP internal oleh Tim Evaluator Inspektorat
6	Indeks Perencanaan Pembangunan	· Melakukan penyelarasan Sasaran Strategis Renja K/L dengan Sasaran Strategis Renstra K/L · Melakukan penyelarasan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renja K/L dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra K/L · Melakukan penyelarasan Total Pagu Anggaran pada RKA sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	· Penyusunan Domain Proses Bisnis · Penyusunan Domain Layanan · Penyusunan Domain Data · Penyusunan Domain Aplikasi · Penyusunan Domain Infrastruktur · Penyusunan Domain Keamanan
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	· Pelaksanaan Bimtek Pemberkasan Arsip · Penyusunan Laporan Monev Penggunaan SRIKANDI · Pelaksanaan pengunggahan informasi kearsipan dan objek digital pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) · Pembentukan Tim *helpdesk* Srikandi Kemenko Infra · Penyusunan pelaporan terhadap penyelenggaraan SIKN dan JIKN sebagai simpul jaringan kepada pusat jaringan nasional
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	· Pencocokan dan Penelitian Data Keuangan Tahun 2025
10	Indeks Pengelolaan Aset	· Penyusunan Laporan BMN *Unaudited, Audited*, dan Semester 1 · Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Semester 1, Semester 2, dan Tahunan · Penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal dan bersama DJKN · Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) · Pelaksanaan Penghapusan BMN Rusak Berat dengan Penjualan melalui Lelang · Penyusunan Penetapan Status Penggunaan BMN · Pelaksanaan Penjualan BMN Tanpa Lelang · Penyusunan dokumen Penggunaan Sementara BMN · Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terkait aset
11	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	· Rapat klarifikasi internal dengan unit kerja untuk menyusun rekomendasi dan tindak lanjut aduan · Menyusun laporan tindak lanjut aduan masyarakat melalui SP4N LAPOR
12	Indeks Kualitas Kebijakan	· Sosialisasi IKK Tahun 2025 dan penyampaian rekomendasi penilaian IKK Tahun 2023 oleh LAN · Penentuan Lokus Peraturan Unit Kerja · Koordinasi dengan Unit Kerja yang menjadi Lokus IKK Tahun 2025 · Penilaian mandiri dan melengkapi bukti dukung IKK pada sistem LAN
13	Indeks Reformasi Hukum	· Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/ memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan · Meningkatkan kompetensi ASN perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) pusat yang berkualitas · Meningkatkan kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan · Melaksanakan penataan *Database* Peraturan Perundang-undangan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan
14	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	· Penyiapan pendampingan pemenuhan dokumen data dukung untuk persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral · Sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral
15	Indeks Tata Kelola Pengadaan	· Pelaksanaan Proses Pengumuman Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SiRUP · Pelaksanaan *Tender* melalui e-Tendering · Pelaksanaan e-Purchasing melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring · Pelaksanaan non e-Tendering dan non e-Purchasing · Pendampingan Pencatatan Paket Transaksional ke dalam e-Kontrak

NO.	INDIKATOR	PELAKSANAAN RENCANA AKSI
		· Penyusunan Pemenuhan Pengelola PBJ · Penyusunan Pemenuhan PPK Bersertifikat Kompetensi · Penyusunan Bukti Dukung Domain Kelembagaan · Penyusunan Bukti Dukung Domain SDM · Penyusunan Bukti Dukung Domain Proses · Penyusunan Bukti Dukung Domain Sistem informasi
16	Indeks Sistem Merit	1. Perencanaan · Menyusun dan menetapkan Peta Jabatan yang ditandatangani Menteri Koordinator · Menyusun Kepmenko rencana kebutuhan pegawai lima tahun 2. Pengadaan · Menyusun Kebijakan internal tentang Pengadaan ASN · Melaksanakan pengadaan ASN secara transparan, objektif, terbuka dan tidak diskriminatif 3. Pengembangan Karier · Menyusun Kebijakan Internal tentang Manajemen Talenta · Menyusun Pedoman Pengembangan Kompetensi · Menyusun pedoman tentang Pelaksanaan Magang 4. Promosi dan Mutasi · Menyusun kebijakan internal tentang pedoman pengisian JPT yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif 5. Manajemen Kinerja · Menyusun Perjanjian Kinerja yang berdasarkan pada Rencana Strategis Instansi · Menerapkan metode penilaian kinerja secara terukur berdasarkan Permenpan 6 Tahun 2022 melalui e-kinerja BKN 6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin · Mengintegrasikan data hukuman disiplin dalam aplikasi I'Dis B
17	Indeks Pelayanan Publik	· Pengusulan Unit Lokus Evaluasi Pelayanan Publik · Persiapan ruangan dan infrastruktur layanan publik · Penyusunan Kebijakan Standar Pelayanan · Pembuatan Maklumat Pelayanan
18	Indeks SPBE	· Penyiapan pemenuhan dokumen data dukung SPBE · Penilaian Mandiri SPBE
19	Capaian Prioritas Nasional	· Menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pada Renstra sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMN agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai · Menyelaraskan Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan pada Renja dengan Renstra KL · Memanfaatkan forum Mitra K/L untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang ada · Memanfaatkan forum Bilateral *Meeting* untuk penyusunan Ranwal Renja untuk memastikan terwujudnya kesuaian antara Renja, Renstra, dan RKP · Memanfaatkan forum Trilateral *Meeting*, Rakorbangpus, dan Musrenbangnas untuk memastikan keselarasan perencanaan Renja K/L dan pengganggaran RKA K/L dengan RKP · Melalukan *tagging* Indikator RPJMN yang menjadi amanah Kemenko Infra berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2025
20	Capaian IKU	· Penajaman Manual IKU · Validasi Capaian Kinerja tahun 2025 level Eselon I · Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan dan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang memuat rekomendasi perbaikan strategi pencapaian target sesuai hasil validasi kinerja
21	Opini BPK	· Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited dan Audited Tahun 2024 · Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 · Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2025 · Penyusunan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
22	Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	· Penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksanaan BPK TA 2024
23	Indeks BerAKHLAK	· Pelaksanaan webinar dan *sharing knowledge* budaya kerja BerAKHLAK · Pembuatan *voice over* budaya kerja BerAKHLAK · Pembuatan konsep *mobile game* budaya kerja BerAKHLAK · Penggunaan Logo secara masif dan terstruktur · Publikasi Konten BerAKHLAK secara berkala · Membangun Forum Komunikasi BerAKHLAK Kemenko Infra · Penyusunan Kebijakan Implementasi BerAKHLAK · Penyusunan Contoh Perilaku BerAKHLAK · Pemberian Penghargaan bagi ASN terbaik dalam implementasi BerAKHLAK · Penyusunan Konsep *Jingle* BerAKHLAK Kemenko Infra · Melaksanakan Monev Rencana Kerja BerAKHLAK
24	Survei Penilaian Integritas	· Pembuatan Formulir Pelaporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi · Pembuatan revisi Permenko Gratifikasi yang telah diharmonisasi · Melakukan Sosialisasi terkait Gratifikasi dan Penguatan Nilai Integritas · Identifikasi Benturan Kepentingan melalui Pengisian Formulir Daftar Kepentingan Pribadi · Pembuatan revisi Permenko WBS yang telah diharmonisasi

NO.	INDIKATOR	PELAKSANAAN RENCANA AKSI
25	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	· Rapat tindak lanjut hasil evaluasi SKM · Menyusun laporan tindak lanjut evaluasi hasil SKM
	RB TEMATIK	
1	Tema: Pengentasan Kemiskinan	· Koordinasi pembahasan awal penyusunan rancangan perubahan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 · Koordinasi pembukaan alur dan distribusi logistik dengan lintas K/L · Koordinasi peningkatan frekuensi penerbangan dan pelayaran dari Bengkulu ke Pulau Enggano · Koordinasi dan sinkronisasi infrastruktur sapras yang sudah direvitalisasi untuk operasional sekolah rakyat · Koordinasi dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian konstruksi TOD Jatake
2	Tema: Peningkatan Investasi	· Monitoring dan evaluasi berkala progres integrasi RDTR · Koordinasi hasil Audit BPKP terkait Audit Tata Kelola Bandara · Koordinasi percepatan pembangunan *water taxi* · Koordinasi integrasi *customs declaration*
3	Tema: Mendorong Hilirisasi	· Identifikasi kelayakan pembangunan PLTS Terapung pada bendungan *on going* · Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)
4	Tema: Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	· Penyusunan rancangan narasi urgensi Permenko Renaksi PPKT · Penyusunan draf Permenko Renaksi PPKT · Penyusunan draf matriks lampiran Permenko Renaksi PPKT
5	Tema: Mendukung Ketahanan Pangan	· Rapat koordinasi percepatan alih fungsi pengendalian alih fungsi lahan sawah (pengajuan izin prakarsa) · Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan optimalisasi program lintas K/L untuk mendukung program Tol Laut · Koordinasi penguatan muatan balik angkutan tol laut dari daerah 3TP · Koordinasi dan sinkronisasi monitoring implementasi Inpres Irigasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemantauan Penyelesaian Konstruksi Tahap 1 · Koordinasi dan sinkronisasi usulan IJD oleh Pemerintah Daerah untuk ditelaah lebih lanjut
6	Tema: Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan	· Koordinasi dan sinkronisasi jumlah rombel dan siswa yang diusulkan untuk operasional sekolah rakyat

Sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas perencanaan, pada tahun 2025 Inspektorat juga telah melaksanakan Evaluasi Reformasi Birokrasi *Ex Ante* sebagaimana disampaikan melalui Lembar Hasil Evaluasi Nomor LHE-5/PW.03.01/2025 tanggal 18 September 2025 perihal Hasil Evaluasi *Ex Ante* Reformasi Birokrasi Tahun 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian rencana aksi RB terhadap indikator RB nasional, logika perencanaan, serta potensi efektivitas implementasinya.

LHE dimaksud juga merupakan instrumen pengendalian awal guna memastikan bahwa pelaksanaan RB tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kinerja dan dampak. Tahun 2025 menjadi periode penting untuk memastikan bahwa seluruh rencana aksi RB benar-benar diimplementasikan secara konsisten, dipantau secara berkala, dan dievaluasi berbasis kinerja. Simpulan hasil evaluasi *ex ante*, rekomendasi, serta rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan dalam pengelolaan RB Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 42 **Hasil Evaluasi *Ex Ante* dan Rencana TL 2026**

HASIL EVALUASI *EX ANTE*		RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2026
PERMASALAHAN UTAMA	**REKOMENDASI PERBAIKAN**	
Kualitas perencanaan RB masih berorientasi pada pemenuhan administrasi, dengan target indikator yang belum sepenuhnya progresif	Meningkatkan kualitas perencanaan RB yang berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*) dan peningkatan kinerja berkelanjutan	Menyusun rencana aksi RB 2026 dengan target indikator yang lebih progresif, mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, serta memperkuat keterkaitan antara sasaran, indikator, dan rencana aksi
Keterkaitan antara rencana aksi, indikator RB, dan dampak yang diharapkan belum tergambar secara kuat	Memperkuat logika sebab akibat antara rencana aksi RB dan pencapaian indikator RB Kementerian PANRB	Menyempurnakan rencana aksi RB agar lebih relevan terhadap indikator RB yang dinilai serta memperjelas kontribusi setiap rencana aksi terhadap pencapaian indikator

HASIL EVALUASI EX ANTE		RENCANA TINDAK LANJUT TAHUN 2026
PERMASALAHAN UTAMA	**REKOMENDASI PERBAIKAN**	
Implementasi rencana aksi RB belum sepenuhnya terpantau secara sistematis	Menguatkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB	Menetapkan mekanisme monitoring pelaksanaan rencana aksi RB secara berkala dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pelaporan kinerja
Integrasi RB dengan SAKIP dan sistem perencanaan penganggaran belum optimal	Mengintegrasikan pelaksanaan RB ke dalam siklus manajemen kinerja instansi	Menyelaraskan rencana aksi RB dengan Renstra, Renja, dan RKA serta memanfaatkan hasil evaluasi RB sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja
Implementasi kebijakan RB (sistem kerja, SPIP, ZI, SPBE) belum sepenuhnya menunjukkan kematangan sistemik	Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan dan sistem pendukung RB	Melakukan penyempurnaan proses bisnis, SOP, dan pemanfaatan sistem digital agar mendukung efektivitas kerja dan pengambilan keputusan
Pemanfaatan hasil evaluasi RB *Ex Ante* belum sepenuhnya optimal sebagai alat pengendalian	Mengoptimalkan peran evaluasi *ex ante* dalam pengendalian kualitas RB	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi RB *Ex Ante* secara terstruktur dan menjadikannya dasar penyempurnaan pelaksanaan RB
Sasaran dan indikator RB Tematik masih terlalu luas dan belum sepenuhnya terukur	Menajamkan perumusan sasaran dan indikator RB Tematik	Menyederhanakan sasaran RB Tematik serta menyusun indikator yang spesifik, terukur, dan relevan dengan tugas dan fungsi Kemenko Infra
Rencana aksi RB Tematik belum sepenuhnya menunjukkan kontribusi nyata terhadap permasalahan prioritas	Memperkuat relevansi dan dampak rencana aksi RB Tematik	Menyusun rencana aksi RB Tematik yang fokus pada peran koordinatif Kemenko Infra dan berdampak langsung terhadap capaian prioritas nasional
Peran APIP dalam pengendalian kualitas RB perlu diperkuat	Menguatkan peran APIP dalam pengendalian dan penjaminan kualitas RB	Melanjutkan pelaksanaan evaluasi RB *Ex Ante* serta memastikan tindak lanjut rekomendasi APIP dilaksanakan secara konsisten

Dengan pendekatan tersebut, Reformasi Birokrasi diharapkan tidak hanya memenuhi indikator penilaian Kementerian PANRB, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kinerja dan tata kelola Kemenko Infra secara berkelanjutan.

3.2 Capaian **Kinerja Lainnya**

1. Koordinasi Pelaksanaan **Arus Mudik Lebaran Tahun 2025**

Penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran Tahun 2025 mencapai kesuksesan luar biasa dengan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi, mencapai 90,9% menurut survei Litbang Kompas dan 93,6% menurut Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan. Keberhasilan ini juga ditandai dengan penurunan drastis angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, berkat koordinasi strategis lintas sektor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut penyelenggaraan mudik dan arus balik Lebaran Tahun 2025 sebagai yang terbaik sepanjang sejarah. Keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini tercermin dari data berikut:

- Penurunan Kecelakaan: Angka kecelakaan lalu lintas turun sebesar 34,31%, dengan total 4.640 kasus;
- Korban Jiwa Berkurang: Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan menurun tajam hingga 55,95%, menjadi 548 orang. Selama Operasi Ketupat 2025, penurunan korban meninggal bahkan mencapai 91,7%;
- Pelanggaran Lalu Lintas Turun: Tercatat penurunan pelanggaran lalu lintas sebesar 31% dibandingkan tahun 2024;
- Jumlah Pemudik: Sebanyak 146,48 juta orang melakukan perjalanan mudik, atau sekitar 52% dari populasi Indonesia; dan

- Perputaran Ekonomi: Aktivitas mudik menghasilkan perputaran ekonomi yang signifikan, mencapai Rp137,975 triliun.

Menko AHY memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemudik. Berikut adalah kontribusi utamanya:

Koordinasi Lintas Sektor

Menko AHY memimpin rapat koordinasi strategis pada 5 Februari 2025 yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Korlantas Polri, dan pemangku kepentingan lainnya. Fokus utama rapat ini adalah memastikan kesiapan infrastruktur, ketersediaan transportasi umum, keterjangkauan tarif, dan pengelolaan mobilitas pemudik.

Pemantauan dan Keputusan Cepat di Lapangan

Pada puncak arus mudik, 28 Maret 2025, Menko AHY bersama jajaran terkait memantau situasi secara *real-time* dari Jasa Marga *Tollroad Command Center* (JMTC). Dengan memanfaatkan lebih dari 3.000 kamera CCTV, tim dapat mengambil keputusan taktis dengan cepat, seperti penerapan rekayasa lalu lintas *contraflow* dan *one way* untuk mengatasi kepadatan.

Kebijakan Pro-Rakyat

Berbagai kebijakan diterapkan untuk mengurai kepadatan dan meringankan beban masyarakat:

- Rekayasa Lalu Lintas: Pemberlakuan *contraflow* dan *one way* di Tol Trans Jawa serta pembatasan operasional truk besar terbukti efektif mengurai kemacetan.
- Diskon Tarif Tol: Menko AHY mendorong pemberian diskon tarif tol sebesar 20% di ruas Cikampek Utama-Kalikangkung pada periode tertentu, yang berhasil menyebar waktu perjalanan pemudik.
- Distribusi Waktu Perjalanan: Kebijakan *Flexible Working Arrangement* (WFA) untuk ASN serta penyesuaian libur sekolah membantu mendistribusikan lalu lintas agar tidak menumpuk di tanggal tertentu.

Peningkatan Transportasi Umum dan Keamanan

Kapasitas angkutan umum di berbagai moda seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat ditingkatkan untuk melayani 27,8 juta penumpang. Selain itu, dilakukan pemeriksaan keamanan (*rampcheck*) terhadap bus untuk memastikan kelayakan armada. Program mudik gratis juga didukung melalui pengembangan Aplikasi Nusantara Hub untuk integrasi data yang lebih baik.

Infrastruktur Siap dan Mitigasi Bencana

Kondisi jalan nasional dipastikan dalam kondisi mantap (98,47%) dan jembatan (89,44%) sebelum periode mudik dimulai. Fasilitas di *rest area* ditingkatkan, dan masjid-masjid diimbau untuk beroperasi 24 jam sebagai posko alternatif. Koordinasi dengan BMKG juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana alam.

Meskipun sukses, beberapa tantangan masih menjadi catatan untuk perbaikan di masa depan:

- Tarif Tiket Pesawat: Masih ada keluhan dari masyarakat mengenai kenaikan harga tiket pesawat yang tinggi.
- *Travel* Gelap: Maraknya penggunaan *travel* ilegal menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penguatan angkutan di perdesaan.
- Program Mudik Gratis: Kurangnya integrasi dalam program mudik gratis menyebabkan adanya kursi yang kosong.
- Keterbatasan Anggaran: Proses pemeriksaan keamanan bus pariwisata terhambat oleh pemangkasan anggaran.

Berdasarkan evaluasi, beberapa rekomendasi diajukan untuk penyelenggaraan mudik berikutnya:

- Membuat regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi tarif tiket pesawat.
- Mengintegrasikan seluruh program mudik gratis melalui platform digital seperti Aplikasi Nusantara Hub.
- Meningkatkan anggaran untuk pemeriksaan keamanan, khususnya untuk bus pariwisata.

Kesuksesan mudik Lebaran Tahun 2025 adalah buah dari kerja keras dan sinergi berbagai pihak yang dikoordinasikan dengan baik, menghasilkan perjalanan yang lebih aman, lancar, dan nyaman bagi jutaan masyarakat Indonesia.



2. Penyelenggaraan *International Conference on Infrastructure* (ICI)

Pembangunan infrastruktur merupakan pilar utama untuk mewujudkan agenda pertumbuhan, pemerataan, dan ketahanan nasional. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi melalui proyek-proyek yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh nusantara. Upaya ini mendesak mengingat Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar: tekanan demografi, target pertumbuhan ekonomi 8%, dan krisis iklim.



Gambar 61 Penyelenggaraan ICI

Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah telah menetapkan lima prioritas strategis, mulai dari infrastruktur ketahanan pangan dan air, transisi energi bersih, pemerataan konektivitas, pengembangan kota tangguh, hingga reformasi sistem pembiayaan melalui skema KPBU dan obligasi hijau.

Menjawab kebutuhan strategis tersebut, lahirlah inisiatif *International Conference on Infrastructure* (ICI) 2025 dari arahan langsung Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di awal tahun 2025. Presiden menekankan pentingnya sebuah forum berskala internasional untuk memperkuat kerja sama dan menarik partisipasi investor global.

Dengan tema ***"Sustainable Infrastructure for Resilient Future"***, konferensi ini dirancang sebagai wadah untuk pertukaran pengetahuan, inovasi, dan praktik terbaik dalam perencanaan serta pembiayaan proyek infrastruktur.



Gambar 62 Presiden Memuji Kepemimpinan AHY



Gambar 63 Menko AHY pada Penyelenggaraan ICI

ICI 2025 diselenggarakan di JICC Senayan, Jakarta, pada 11–12 Juni 2025. Acara ini dihadiri oleh Presiden RI, jajaran menteri, duta besar, kepala daerah, serta para pemimpin dunia usaha. Dengan partisipasi hampir 7.000 peserta dari 26 negara, termasuk investor dan lembaga pembiayaan terkemuka seperti World Bank, IFC, Macquarie, dan GIC, ICI 2025 menjadi panggung penting bagi kolaborasi internasional.

Sebagai hasil nyata, Kemenko Infra menawarkan 46 proyek infrastruktur senilai Rp200 triliun kepada investor. Proyek-proyek ini mencakup sektor strategis seperti transportasi (kereta cepat Jakarta-Surabaya), ketahanan lingkungan (*Giant Sea Wall*), dan energi terbarukan, dengan skema pembiayaan utama melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Penyelenggaraan ICI 2025 memberikan dampak signifikan bagi pembangunan nasional. Dalam jangka pendek, acara ini berhasil meningkatkan kepercayaan investor dan mempercepat implementasi kebijakan kebijakan. Untuk jangka panjang, konferensi ini mendorong pemerataan ekonomi melalui konektivitas, menciptakan lapangan kerja, mempromosikan infrastruktur hijau, dan meningkatkan akses layanan publik.

Secara keseluruhan, ICI 2025 tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di forum global tetapi juga memproyeksikan potensi *multiplier effect* hingga Rp500 triliun dalam investasi infrastruktur hingga tahun 2030, sejalan dengan tujuan akhir pembangunan, yaitu memberdayakan masyarakat.

3. Kemenko Infra **Raih Terbaik I Indeks Reformasi Hukum 2025 kategori Kementerian**

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum selaku *leading sector* untuk mengukur kualitas reformasi hukum pada instansi pemerintah. Penilaian IRH merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Penilaian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tujuan utama IRH adalah untuk mewujudkan tata kelola hukum yang lebih baik, efisien, transparan dan akuntabel, serta memastikan regulasi yang diterbitkan tepat guna dan tidak tumpang tindih.

Dalam pelaksanaannya IRH terdiri dari 4 (empat) variabel dan beberapa indikator, yaitu: tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kompetensi Perancang Perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reviu, dan Penataan *Database* Peraturan Perundang-undangan.



Gambar 64 Penyerahan Penghargaan Terbaik I IRH Tahun 2025 Kategori Tingkat Kementerian.

Kemenko Infra berhasil meraih penghargaan Terbaik I IRH Tahun 2025 Kategori Tingkat Kementerian. Kemenko Infra mendapatkan nilai 100 dengan kategori AA (Istimewa). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G.L. Kalake yang mewakili Menko Infra.

3.3 Realisasi **Anggaran**

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan tahun anggaran 2025 berakhir telah terealisasi sebesar Rp215.518.430.460,00 (Duaratus Limabelas Miliar Limaratus Delapanbelas Juta Empatratus Tigapuluh Ribu Empatratus Enampuluh Rupiah) dari total pagu sebesar Rp216.520.067.000,00 (Duaratus Enambelas Miliar Limaratus Duapuluh Juta Enampuluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 99,54%.

Realisasi dengan jumlah anggaran terbesar pada Sekretariat Kementerian Koordinator sebesar Rp196.742.565.299,00 (Seratus Sembilanpuluh Enam Miliar Tujuhratus Empatpuluh Dua Juta Limaratus Enampuluh Lima Ribu Duaratus Sembilanpuluh Sembilan Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp197.718.157.000,00 (Seratus Sembilanpuluh Tujuh Miliar Tujuhratus Delapanbelas Juta Seratus Limapuluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 99,51%, Sementara realisasi anggaran terendah pada Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar sebesar Rp4.059.853.478,00 (Empat Miliar Limapuluh Sembilan Juta Delapanratus Limapuluh Tiga Ribu Empatratus Tujuhpuluh Delapan Ru-piah) dari pagu anggaran sebesar Rp4.059.853.478,00 (Empat Miliar Enampuluh Sembilan Juta Delapanratus Tujuhpuluh Enam Ribu Rupiah) atau 99,75%.

Adapun rincian realisasi anggaran tiap unit Eselon I sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 43 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Tahun 2025

DESKRIPSI	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI		SISA
		Rp	%	
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	216.520.067.000	215.518.430.460	99.54%	1.001.636.540
Sekretariat Kementerian Koordinator	197.718.157.000	196.742.565.299	99,51%	975.591.701
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	5.389.619.000	5.389.468.808	100%	150.192
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	4.301.970.000	4.301.703.451	99,99%	266.549
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	5.040.445.000	5.024.839.424	99,69%	15.605.576
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	4.069.876.000	4.059.853.478	99,75%	10.022.522

Dari total pagu efektif sebesar sebesar Rp216.520.067.000,00 (Duaratus Enambelas Miliar Limaratus Duapuluh Juta Enampuluh Tujuh Ribu Rupiah) sampai dengan tahun anggaran 2025 realisasi anggaran belanja Kemenko Infra mencapai Rp.215.518.430.460,00 (Duaratus Limabelas Miliar Limaratus Delapanbelas Juta Empatratus Tigapuluh Ribu Empatratus Enampuluh Rupiah) atau 99,54%.

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, adapun detail realisasi anggaran per jenis terlihat pada rincian berikut:

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp71.196.188.788,00 (Tujuhpuluh Satu Miliar Seratus Sembilanpuluh Enam Juta Seratus Delapanpuluh Delapan Ribu Tujuhratus Delapanpuluh Delapan Rupiah) dari pagu efektif Rp71.721.368.000,00 (Tujuhpuluh Satu Miliar Tujuhratus Duapuluh Satu Juta Tigaratus Enampuluh Delapan Ribu Rupiah) 99,27% dari anggaran belanja pegawai;
- Belanja Barang dengan realisasi Rp127.170.494.645,00 (Seratus Duapuluh Tujuh Miliar Seratus Tujuhpuluh Juta Empatratus Sembilanpuluh Empat Ribu Enamratus Empatpuluh Lima Rupiah) dari pagu sebesar Rp127.641.469.000,00 (Seratus Duapuluh Tujuh Miliar Enamratus Empatpuluh Satu Juta Empatratus Enampuluh Sembilan Ribu Rupiah) 99,63% dari anggaran belanja barang; dan
- Belanja Modal dengan realiasi sebesar Rp17.151.747.027,00 (Tujuhbelas Miliar Seratus Limapuluh Satu Juta Tujuhratus Empatpuluh Tujuh Ribu Duapuluh Tujuh Rupiah) dari pagu Rp17.157.230.000,00 (Tujuhbelas Miliar Seratus Limapuluh Tujuh Juta Duaratus Tigapuluh Ribu Rupiah) 99,97% dari anggaran belanja modal.

Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 44 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan III 2025

URAIAN	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	71.196.188.788	99,27%
Belanja Barang	127.641.469.000	127.170.494.645	99,63%
Belanja Modal	17.157.230.000	17.151.747.027	99,97%
Total Belanja	216.520.067.000	215.518.430.460	99,54%

Sumber: Aplikasi SAKTI diolah

Persentase realisasi belanja s.d. tahun 2025, belanja pegawai 99,27%, belanja barang 99,63% dan belanja modal 99,97% dari total pagu efektif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025.

3.4 Analisa Sumber Daya

1. Kondisi Sumber Daya Pegawai

Dari total 409 Pegawai di lingkungan Kemenko Infra pada tahun 2025, terdiri dari 224 orang laki-laki dan 185 orang perempuan. Tingkat pendidikan sebanyak 9 pegawai merupakan lulusan S3, dan 125 pegawai yang merupakan lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah lulusan S1, yakni mencapai 232 pegawai. Sisanya merupakan lulusan DIV sebanyak 15 pegawai, lulusan DIII sebanyak 17 pegawai, DI sebanyak 2 orang dan SLTA/SMK 9 pegawai. Kemenko Infra ke depan merencanakan peningkatan *grade* calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2.

Adapun data pegawai Kemenko Infra seperti terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 64 Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025

Efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia pada Kemenko Infra Tahun 2025 dapat dianalisis sebagai berikut:

- SDM mampu mendukung pencapaian kinerja organisasi sebagaimana digambarkan dari capaian kinerja organisasi yang sangat baik yakni sebesar 100,04%, meskipun organisasi berada dalam fase transisi kelembagaan pasca pemisahan dari Kemenko Marves.
- Komposisi pegawai yang didominasi oleh generasi usia produktif dengan tingkat pendidikan mayoritas S1 dan S2 menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Proporsi pegawai fungsional dan pelaksana yang cukup besar memungkinkan distribusi beban kerja operasional berjalan relatif optimal.

Ke depan, guna mengoptimalkan kontribusi SDM terhadap pencapaian kinerja organisasi akan dilakukan pemetaan pengembangan kompetensi yang lebih terarah dan berkelanjutan.

2. Implementasi **Aplikasi**

Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di lingkungan Kemenko Infra yakni SIK-INFRA (pengukuran kinerja), Core Kemenko Infra, HRIS, JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kemenko Infra. Adapun efisiensi yang telah dirasakan dengan adanya implementasi beberapa aplikasi tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Core Kemenko Infra dilaksanakan untuk menunjang budaya *digital workplace* di Kemenko Infra melalui keseragaman proses, sentralisasi penyimpanan data, dan nantinya dapat dilakukan analisis terhadap data. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efisiensi baik dari proses maupun biaya pengembangan *digital platform* di Unit Eselon I dalam hal duplikasi aplikasi.

   Selain bersifat digitalisasi, Core Kemenko Infra juga dikembangkan dengan prinsip simplifikasi proses bisnis, sehingga dapat menyederhanakan birokrasi serta mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas. Sebagai contoh, integrasi antara presensi kehadiran dengan pengukuran kinerja pegawai. Selain itu, akan mempermudah pelaporan dan pengisian *logbook* dikarenakan perekaman tugas secara otomatis setiap harinya.

2. Efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan fungsi. Penggunaan modul Marves HR yang dapat diakses kapan saja sangat membantu proses pelaksanaan tugas dan fungsi data kepegawaian. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan ketika seorang pejabat/pegawai berada di kantor, sekarang dapat dilakukan kapan saja bahkan ketika seorang pejabat/pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.

3. Sistem JDIH telah memfasilitasi layanan hukum secara keseluruhan dari mulai perancangan, advokasi dan informasi hukum sehingga tidak perlu mengeluarkan kembali anggaran untuk pembangunan sistem sejenis karena sudah terfasilitasi dalam satu layanan di sistem JDIH.

Selain implementasi Aplikasi Internal Kemenko Infra, dalam pelaksanaan tugas Kemenko Infra juga menggunakan beberapa aplikasi dari eksternal seperti SRIKANDI, SAKTI, E-Monev BAPPENAS, KRISNA, dan Monev Kemenkeu yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kinerja.

3. Konsolidasi Perangkat **Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna**

Pada tahun 2025, Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik (Biro DKIP) sebagai Unit TIK Pusat telah melaksanakan program konsolidasi perangkat infrastruktur TIK Kemenko Infra (*server, storage,* jaringan, dan lain-lain untuk *common application*) dan perangkat pengguna Kemenko Infra (*Personal Computer and Tablet*). Pengadaan perangkat pendukung tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan layanan Kemenko Infra dan penyelenggaraan SPBE.

Seluruh kebutuhan infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada unit Eselon I dikonsolidasikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan unit Eselon I dapat berfokus dalam pengembangan aplikasi utama (*core application*) dan tidak lagi menganggarkan kebutuhan belanja infrastruktur TIK atas *common application* dan perangkat pengguna. Kebutuhan dimaksud disampaikan secara berjenjang melalui Unit TIK masing-masing unit Eselon I, untuk selanjutnya diusulkan ke unit TIK Pusat.

Melalui konsolidasi ini juga dapat menghilangkan adanya kemungkinan redundansi penganggaran belanja TIK serta menghilangkan *idle capacity* infrastruktur TIK karena hasil pengadaan dapat digunakan oleh seluruh unit Eselon I (*sharing resource*). Selain itu, konsolidasi juga memungkinkan terciptanya standardisasi spesifikasi dan harga perangkat. Jika pengadaan diadakan oleh masing-masing unit Eselon I secara mandiri, dapat mengakibatkan keberagaman harga untuk satu perangkat TIK yang sama dan dapat berpotensi menjadi temuan auditor.

Hal lain yang menjadi manfaat konsolidasi adalah memungkinkan terciptanya *economies of scale* dikarenakan kapasitas infrastruktur TIK yang dikonsolidasikan cukup besar dan terjadi penghematan biaya karena pembelian yang dilakukan dalam jumlah besar. Dari sisi pengadaan, adanya konsolidasi menghemat sumber daya waktu dan manusia, untuk pengelolaan infrastruktur TIK dan lisensi-lisensi yang digunakan untuk operasional TIK di Kemenko Infra proses pengadaan diadakan secara terpusat yang langsung dikelola Biro DKIP. Berikut ini merupakan data anggaran belanja TIK Tahun 2025 per unit Eselon I:

Tabel 45 **Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2025**

UNIT ESELON 1	ANGGARAN BELANJA TIK (Rp)
Sekretariat Kementerian Koordinator	3.152.111.000,00
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3.670.000,00
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	43.650.000,00
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	14.850.000,00
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	4.300.000,00
Total	**3.218.581.000,00**

Sumber: Biro DKIP, 2025

4. Penggunaan **Sarana dan Prasarana**

Penggunaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Kemenko Infra tahun 2025 dilaksanakan sejalan dengan kebijakan penyesuaian sistem kerja pegawai secara *hybrid*, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan tugas kedinasan melalui kombinasi *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA), dengan tetap memastikan keberlangsungan tugas dan fungsi seluruh unit kerja secara efektif.

Dalam implementasinya, pengaturan kehadiran pegawai dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja Eselon II, sehingga pemanfaatan ruang kerja tidak lagi bersifat statis dan penuh setiap hari. Kondisi tersebut mendorong optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perkantoran, baik ruang kerja, ruang rapat, maupun fasilitas penunjang lainnya, sesuai dengan kebutuhan operasional dan pola kehadiran pegawai.



Gambar 65 **Infografis Pelaksanaan WFA Kemenko Infra**

Penyesuaian ini juga mendukung efisiensi pemanfaatan aset negara, efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan, serta kebijakan efisiensi belanja, dengan tetap menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pembagian ruang kerja sebagai berikut.

Tabel 46 **Pembagian Ruang Kerja**

UNIT ESELON 1	GEDUNG (Lt.)
Sekretariat Kementerian Koordinator	1 (Utara)
Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	12 (Utara)
Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi	12 (Selatan)
Biro Umum dan Keuangan	6 (Selatan) dan 14 (selatan)

UNIT ESELON 1	GEDUNG (Lt.)
Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik	6 (Utara)
Inspektorat	17
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	7
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	13
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	16
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	19 dan 14 (Utara)
Ruang PPID	1
Ruang Rapat	2 dan ada disetiap ruang unit eselon I dan Biro
Klinik	21
Ruang Gym	21
Studio Musik	21
Lobby	GF (dasar)
Area Parkir	Halaman Lingkungan Kantor & Gd. Parkir bersama BRIN

5. Implementasi **Kebijakan SDM**

Selama periode Kinerja Tahun 2025, Kemenko Infra telah melaksanakan kegiatan pertumbuhan pegawai sebagai berikut:

- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas;
- Jumlah pegawai PPPK telah ditetapkan dan diangkat sebanyak 78 orang; dan
- Telah ditetapkan SK PNS bagi pegawai di lingkungan Kemenko Infra

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara serta memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif, telah disusun Kepmenko Nomor 138 Tahun 2025 tentang pedoman pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Kemenko Infra.

3.5 Rekomendasi **Hasil Evaluasi SAKIP**

Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 Nomor B/120/AA.05/2025, SAKIP Kemenko Infra terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan langkah tindak lanjut dan peningkatan kinerja SAKIP Kemenko Infra ke depan, di antaranya:

01

Menyusun rantai hasil yang menegaskan nilai tambah fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kemenko Infra berbasis hubungan kausal yang jelas antara intervensi koordinatif dan *outcome* pembangunan.

02

Penetapan *Critical Success Factors* (CSF) perlu didasarkan pada diagnosis masalah dan analisis data, serta target kinerja (terutama indikator layanan koordinasi) ditetapkan lebih progresif dan berbasis *benchmarking*.

03

Meningkatkan kualitas analisis capaian melalui *root cause analysis*, pemetaan risiko lintas-K/L, dan identifikasi implikasi strategis terhadap koordinasi.

04

Hasil pengukuran kinerja harus dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategi, penajaman mekanisme sinkronisasi kebijakan, dan perbaikan langkah aksi.

05

Mewajibkan pelaporan kinerja yang bersifat evaluatif, memuat analisis penyebab, kesenjangan target, implikasi terhadap sasaran, serta tindakan korektif.

06

Pelaporan berkala perlu menyajikan progres tindak lanjut secara terstruktur agar efektivitas penyelesaian hambatan koordinasi dapat dipantau dan tidak terjadi pengulangan isu.

07

Membangun mekanisme monitoring tindak lanjut LHE internal yang terdokume-ntasi, dengan penanggung jawab, indikator penyelesaian, dan prosedur penutupan formal.

08

Kualitas evaluasi internal perlu ditingkatkan melalui analisis akar masalah yang lebih tajam serta rekomendasi yang spesifik dan operasional, sehingga benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi koordinasi.

Proyek Pengendalian

Banjir Air di Bengkulu







04
PENUTUP






4.1 Kesimpulan

1 Pada tahun 2025 terdapat tiga Sasaran Strategis dan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen Perjanjian Kinerja Kemenko Infra, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) menunjukan capaian yang cukup tinggi (100,02%), di mana mayoritas IKSS mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, di antaranya:

- Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar 100%;
- Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar 3,58 (115%); dan
- Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar 99,88%.

2 Hingga laporan ini disusun, capaian Indeks RB Kemenko Infra Tahun 2025 masih dalam masa sanggah, sehingga nilai resmi Indeks RB Kemenko Infra belum dapat ditampilkan. Berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Nomor B/234/RB.06/2025 tanggal 25 April 2025, Indeks RB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2024 adalah 77,38 dengan kategori “BB”.

3 Pemanfaatan anggaran Tahun 2025 menunjukan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh realisasi anggaran sebesar 99,54% terhadap pagu efektif, yang secara proposional mendukung capaian kinerja yang sangat baik (100,04%). Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran telah diarahkan untuk mendukung sasaran strategis secara efektif.

4 Tantangan utama yang dihadapi selama Tahun 2025 meliputi:

1. Penyesuaian organisasi dalam masa transisi kelembagaan;
2. Keterbatasan dan distribusi kompetensi SDM yang belum sepenuhnya optimal;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya ruang kerja; serta
4. Dinamika kebijakan nasional yang memerlukan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

5 Untuk memitigasi tantangan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah strategis berupa penguatan koordinasi lintas unit serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya guna menjaga keberlangsungan pencapaian kinerja.

4.2 Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pada tahun 2026, direkomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelaraskan IKSS sesuai dengan Renstra Kemenko Infra Tahun 2025-2029.
2. Memperkuat keterkaitan antara perencanaan kinerja dan penganggaran.
3. Menyempurnakan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja melalui penajaman indikator kinerja dan penguatan *cascading* kinerja.
4. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia, melalui penataan penugasan berbasis kebutuhan organisasi dan peningkatan kompetensi pegawai.
5. Menguatkan koordinasi dengan K/L dan instansi terkait yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infra dalam peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas capaian kinerja pada tahun mendatang, dengan pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematika analisis yang lebih komprehensif.
6. Menajamkan kembali rencana aksi setiap kegiatan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, dan optimal.

Lampiran

Tautan Bukti Dukung Laporan Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025

Eviden LKj Kemenko Infra 2025

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Harimurti Yudhoyono
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Maret 2025
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Agus Harimurti Yudhoyono

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 177.559.342.000
2	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp 52.440.658.000
JUMLAH ANGGARAN		**Rp 230.000.000.000***

*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp102.281.843.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor SP DIPA-132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025.

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur
dan Pembangunan Kewilayahan

Agus Harimurti Yudhoyono

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI)				✓
		2. Indeks Ketahanan Air Nasional				✓
		3. Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)				✓
		4. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				✓
		5. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional				✓
IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1. Kebijakan Satu Tata Ruang (*One Spatial Planning Policy - OSPP*)	✓	✓	✓	✓
		2. *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP)	✓	✓	✓	✓
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi	✓	✓	✓	✓
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	✓	✓	✓	✓
		5. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang Terintegrasi Melalui *Transit-Oriented Development* (TOD)/*Transit-Oriented Affordable Housing* (TOAH)	✓	✓	✓	✓

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Hasil pengukuran tingkat kepuasan kementerian/ lembaga/*stakeholders* terhadap pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk berkoordinasi dan bersinergi	✓	✓	✓	✓
IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025				✓

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur
dan Pembangunan Kewilayahan

Agus Harimurti Yudhoyono